

LAPORAN TAHUNAN 2014

MENUJU MASYARAKAT INFORMASI INDONESIA



Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

LAPORAN TAHUNAN 2014



Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia



DAFTAR ISI

5	BAB 1 - KILAS KERJA 2014
6	Peristiwa Penting
10	Sidang Internasional Yang Diikuti Oleh Kemkominfo
11	Highlight Laporan Keuangan
14	BAB 2 - PROFIL KEMENTERIAN
15	Visi Dan Misi
16	Struktur Organisasi
17	Sumber Daya Manusia
18	Reformasi Birokrasi & Tata Kelola
21	BAB 3 - PELAYANAN PUBLIK
22	Peningkatan Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio Melalui E-Licensing
23	Pelayanan Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Online
24	Upgrade Layanan Domain .Go.id
25	Layanan Aduan Di Bidang Pers
26	Layanan Aduan Konten Negatif Di Internet (Trust+Positif)
27	BAB 4 – KEBIJAKAN BIDANG FREKUENSI RADIO
28	Kebijakan Penataan Frekuensi
29	Penyusunan Dan Rencana Kanal Spektrum Frekuensi Radio Dalam Rangka Implementasi Penyiaran Televisi Digital
30	Kebijakan Pengelolaan Filling Satelit
31	Rencana Pitalebar Indonesia
33	Persiapan Migrasi Frekuensi Khusus Maritim Dari Analog Ke Digital

34	Migrasi TV Analog Ke Digital
36	Kebijakan Kewajiban Pelayanan Universal / Universal Service Obligation (KPU/USO)
37	Kebijakan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
37	Kebijakan Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik
38	BAB 5 - PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN AKSESIBILITAS
39	Program KPU/USO
44	Pembangunan Monitoring Sistem Frekuensi Radio Tahap VI
45	BAB 6 - PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
46	Teledensitas Teleponi
47	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Penyelenggara Telekomunikasi
49	BAB 7 - PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
50	Pemeringkatan E-Government
51	Pengembangan Dan Implementasi Private Network Security (PNS Box)
52	Pengembangan Dan Implementasi Government Service Bus (GSB)
53	Sarana Dan Prasarana E-Learning Di Sekolah
54	Relawan TIK
54	Pusat Komunitas Kreatif
55	Penerapan Aplikasi E-Business Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)
58	Layanan Bidang E-Government
60	Pembangunan Prototype Community Access Point (Cap) Dan Mobile Community Access Point (M-Cap)
62	BAB 8 - KEAMANAN INFORMASI DAN JARINGAN INTERNET NASIONAL
63	Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi
64	Keamanan Jaringan Internet
70	BAB 9 - PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
71	Pembangunan Dan Penguatan Media Center
74	Bantuan Mobil Dan Motor Pusat Teknologi Informasi Komunitas
76	BAB 10 - PENELITIAN PENGEMBANGAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
77	Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informatika
79	Pengembangan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informatika
84	BAB 11 - EKONOMI BIDANG SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
85	Pengujian Perangkat
87	Standarisasi Perangkat
88	Perkembangan Ekspor Impor Dan Perangkat Telekomunikasi
91	Peran Sektor Pos Dan Telekomunikasi Dalam Pendapatan Nasional

PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**Assalamu'alaikum
Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.**

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan tugas dan fungsi bagi kemajuan dunia Komunikasi dan Informatika melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beberapa target dapat tercapai di tahun 2014, sebagaimana yang telah direncanakan, kendati masih banyak pekerjaan rumah yang menanti untuk diselesaikan.

Pada era reformasi birokrasi, tahun 2014 merupakan serangkaian langkah panjang dari perjalanan transformasi dan reformasi birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pada tahun ini, seluruh pejabat dan pegawai telah berupaya keras untuk membawa Kementerian Komunikasi dan Informatika ke fase yang lebih baik.

Tahun 2014 pula, merupakan tahun dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami masa transisi kepemimpinan. Sehingga dibutuhkan kemampuan beradaptasi oleh semua pihak agar program-program yang sudah dicanangkan dapat terlaksana dengan baik.

Melalui Laporan Tahunan ini, Saya berharap, seluruh pejabat, pegawai, dan pemangku kepentingan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat lebih memperkaya informasi mengenai pencapaian yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selama periode 2014.

Media Laporan Tahunan ini diharapkan juga menjadi media komunikasi kepada masyarakat agar publik juga dapat mengetahui pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan turut berpartisipasi dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia.

Jakarta, April 2015

Suprawoto

BAB 1

KILAS KINERJA

2014

- Peristiwa Penting
- Sidang Internasional yang Diikuti oleh Kemkominfo
- Highlight Laporan Keuangan



- Peristiwa Penting
- Sidang Internasional yang Diikuti oleh Kemkominfo
- Highlight Laporan Keuangan

PERISTIWA PENTING

12 Feb
2014

Penyerahan Bantuan Sinabung

Medio Februari 2014 lalu, Gunung Sinabung yang terletak di Sumatera Utara kembali meletus. Bantuan berdatangan dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tepatnya tanggal 12 Februari 2014, Tifatul Sembiring selaku Menkominfo menyerahkan mobil bantuan dan bahan pokok kepada Gubernur Sumatera Utara, Gatot Puju.



27 Feb
2014

Men's Obsession Award

Berhasil meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun ke tahun, membuat Menkominfo Tifatul Sembiring dianugerahi penghargaan dari majalah Men's Obsession untuk kategori *Most Inspirational Minister*.



22-27
Mar
2014

Pekan Informasi Nasional

Pembukaan Pekan Informasi Nasional yang berlangsung di Padang ditandai dengan penggungtingan pita secara simbolis oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Kegiatan yang berlangsung 22-27 Mei 2014 ini, bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seputar teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, dilakukan pula temu wicara dengan Kelompok Informasi Masyarakat, seminar, dan pertunjukan rakyat.



24 Mar
2014

Peluncuran SMS Broadcast Pemilu

Tanggal 24 Maret 2014, bertempat di Ruang Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan peluncuran SMS Broadcast untuk pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, Kepala Bagian Umum Sekretariat Bawaslu RI, Jajang Abdullah dan anggota KPU, Sigit Pamungkas.



16 Apr
2014

Rakorda Indonesia Timur

Pada tanggal 16 April 2014 terjalin rapat koordinasi kerjasama lintas daerah (Rakorda) bidang Komunikasi dan Informatika wilayah Indonesia Bagian Timur. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempererat koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Rakorda 2014 diselenggarakan di Swiss-BELHOTEL, Palu.



22 Apr
2014

Kartini Next Generation Award

Untuk memberikan apresiasi kepada wanita Indonesia yang telah berhasil memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di berbagai bidang baik untuk peningkatan kapasitas, pengetahuan, e-literasi maupun kesejahteraan di masyarakat maka dilaksanakan Kartini Next Generation Award pada 22 April 2014 dengan tema "Woman as Agent of Change".



19 Jun
2014

MoU Kemkominfo dan OJK

Untuk memberi rasa aman bagi masyarakat dalam pemasaran, telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 Juni 2014. Dewan Komisaris OJK diwakili Muliawan Darmansyah Hadad, sedangkan perwakilan dari pihak Kemkominfo adalah Tifatul Sembiring selaku Menkominfo.



15 Jul
2014

Apel Siaga Lebaran 2014

Menjelang momen Lebaran, biasanya terjadi lonjakan arus informasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Apel Siaga Lebaran guna mengetahui kesiapan operator dalam menghadapi lonjakan arus informasi.



23 Ags
2014

Sail Raja Ampat 2014

Bertempat di Pantai WTC, 23 Agustus 2014, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono membuka acara Sail Raja Ampat. Pada kesempatan tersebut Presiden sempat menandatangani sampul perangko yang merupakan salah satu layanan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo.



29 Ags
2014

Indonesia Information Communication Technology Award (INAICTA)

INAICTA merupakan ajang tahunan lomba karya cipta kreativitas dan inovasi di bidang TIK yang terbesar di Indonesia. INAICTA diselenggarakan untuk mendorong berkembangnya karya dan produk TIK lokal dibarengi dengan peningkatan kualitasnya. Di tahun 2014, puncak acara diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2014. Terdapat 1007 karya yang masuk di INAICTA 2014 yang terbagi ke dalam 15 kategori, yang diikuti oleh para pelajar SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan Tinggi dan kalangan profesional.



22 Sept
2014

Chief Editor Meeting

Di Penghujung jabatan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring memberikan arahan mengenai pencapaian kinerja Kementerian yang telah dipimpinnya selama periode 2009-2014. Pada event yang digelar tanggal 22 September 2014 ini, Tifatul juga memberikan medali penghargaan kepada mitra kerja Kemkominfo dan insan pers.



27 Sept
2014

Bhakti Postel ke-69

Penyelenggaraan Peringatan Hari Bhakti POSTEL ke-69 berlangsung tanggal 27 September 2014 di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia, di Bandung. Tema peringatan Bhakti POSTEL kali ini adalah "Memperkuat Konektivitas Postel dan Penyiaran Nasional untuk Menyatukan Bangsa".



•Peristiwa Penting

- Sidang Internasional yang Diikuti oleh Kemkominfo
- Highlight Laporan Keuangan



SERAH TERIMA JABATAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

27 Oktober 2014

30 Okt
2014**Forum ASEAN Community 2015**

Untuk membekali generasi muda Indonesia dalam Komunitas ASEAN 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Forum Sosialisasi dengan tema "Indonesia Menuju Komunitas ASEAN 2015: Peluang dan Tantangan". Sebanyak 150 mahasiswa dan pelajar hadir dalam forum tersebut.

27-30
Nov
2014**Asia Pacific Information and Communication Technology Award (APICTA)**

APICTA merupakan forum pemberian penghargaan tertinggi bagi pemenang lomba kreativitas dan inovasi piranti lunak. Forum bertujuan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi di bidang pengembangan piranti lunak dari individu, UKM atau perusahaan yang bergerak di industri Telematika. Di ajang ini, Indonesia menorehkan prestasi dengan memperoleh 8 merit dari 24 karya yang diajukan.

11 Nov
2014**Video Conference dengan CEO Vimeo**

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara melakukan komunikasi dengan CEO Vimeo Kerry Trainor melalui video conference. Pada kesempatan tersebut Menteri mengajukan permintaan kepada Kerry Trainor agar situs berbagi video dapat dibuka kembali di Indonesia.

20 Nov
2014**Rapat Koordinasi Nasional**

Menkominfo Rudiantara bersama pejabat Eselon I, II, III, seluruh kepala UPT, dan para peserta menghadiri Rapat Koordinasi Nasional yang bertempat di Pusat TIK Nasional, Ciputat, 20 November 2014. Pada rapat koordinasi ini membahas program prioritas dalam lima tahun ke depan diantaranya adalah pemenuhan Hak Warga Negara untuk memperoleh informasi, memanfaatkan informasi, dan menyebarluaskan untuk meningkatkan kepribadian dan lingkungan sosial sesuai Pasal 28 F UUD 1945.



- Peristiwa Penting
- Sidang Internasional yang Diikuti oleh Kemkominfo
- Highlight Laporan Keuangan

SIDANG INTERNASIONAL YANG DIKUTI OLEH KEMKOMINFO

Jenewa, Swiss
19-20 Maret 2014

Sidang Committee
Technical Barrier to Trade
(TBT)

- Sidang terkait standarisasi alat dan perangkat telekomunikasi
- Kewajiban kepada pemohon sertifikasi telepon selular yang mewajibkan pemberian surat penetapan IMEI dari lembaga yang berwenang

Nay Pyi Taw,
Myanmar
17-22 Maret 2014

ASEAN-Japan Comprehensive
Economic Partnership
Sub-Committee on Service
(AJCEP-SCS) on
Telecommunication

- Sidang terkait standarisasi alat dan perangkat telekomunikasi
- Kewajiban kepada pemohon sertifikasi telepon selular yang mewajibkan pemberian surat penetapan IMEI dari lembaga yang berwenang

Busan,
Korea Selatan
20 Okt - 7Nov 2014

ITU PLENIPOTENTIARY
CONFERENCE 2014

- Pemilihan anggota Council ITU dan pemilihan Radio Regulation Body (RRB) dimana Indonesia terpilih kembali menjadi salah satu negara anggota Council ITU untuk periode 2015-2019 pada Region E
- Membahas proposal terkait standarisasi dan spektrum frekuensi radio.
- Indonesia telah melakukan standarisasi ukuran green ICT dan metoda pengukurannya.
- Usulan "Flight Tracking"

Yangon, Myanmar
24 November 2014

38th Session of the
Management Committee
(MC-38) of the Asia-Pacific
Telecommunity

- Membahas dan memfinalisasi Preliminary APT Common Proposals (PACPs) dan koordinasi negara anggota APT
- Membahas dan memfinalisasi *the working method of APG*
- Menyetujui 8 (delapan) laporan APT, 9 (sembilan) liaison statement untuk APG dan ITU-R, 2 (dua) kuesioner dan 2 (dua) surat permintaan update informasi untuk merevisi 2 (dua) laporan APT
- Mengesahkan Mr. Kohei Satoh (Jepang) sebagai chairman baru untuk APG dan Ms. Zhu Keer (China) dan Mr. Le Van Tuan (Vietnam) sebagai Vice Chair baru
- Menyetujui 2 (dua) laporan baru APT, merevisi 2 (dua) laporan APT, menyetujui 3 (tiga) kuesioner dan 1 (satu) *liaison statement* ke ITU-T SG, serta wacana restrukturisasi ASTAP.

Yangon, Myanmar
25-29 November
2014

Sidang the 13th Session of the
General Assembly of the
Asia-Pacific Telecommunity
(APT GA-13)

- Membahas konsep Rencana Strategis APT 2015-2017
- Mengesahkan konsep *strategic action plan* APT untuk periode 2015-2017 sebagai implementasi *Ministerial Statement of APT*
- Mencatat statement beserta regulatory dan policy updates dari Indonesia
- Mengesahkan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara APT dengan International Amateur Radio Union Region 3 (IARU) yang bertujuan untuk membangun kolaborasi antara anggota APT dengan IARU

HIGHLIGHT LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Anggaran Kemkominfo



Rp **15,938 T**

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Rp **38,476M**

Realisasi Belanja Pinjaman/PHLN



Rp **2,086 T**

Realisasi Belanja Rupiah Murni



Rp **2,124 T**

Realisasi Belanja TA 2014

Ringkasan Laporan Keuangan Kemkominfo 2014



Rp **10,903 T**

Jumlah aset Kemkominfo 2014

Rp **1,206 T**

Jumlah Ekuitas Dana Kemkominfo 2014

Rp **9,697 T**

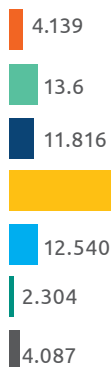
Jumlah Kewajiban Kemkominfo 2014



7,29%

Terjadi peningkatan aset sebesar 7,29% di tahun 2014

Penerimaan Negara Bukan Pajak



Rp **15.938.533.024.611**

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2014



- BMN
- Jasa
- Pendidikan
- Iuran dan Denda
- Lain-lain
- Jasa Layanan Umum
- BLU Lainnya

- Peristiwa Penting
- Sidang Internasional yang Diikuti oleh Kemkominfo
- Highlight Laporan Keuangan

Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu kementerian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan cara menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 dengan realisasinya. Laporan ini mencakup unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014. Ringkasan atas Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014

Uraian	TA 2014		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan Negara			
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp 13.000.452.098.000	Rp 15.938.533.024.611	122.60%
Belanja Rupiah Murni	Rp 3.612.516.590.000	Rp 2.086.215.271.993	57.75%
Belanja Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri (PHLN)	Rp 50.438.740.000	Rp 38.476.799.584	76.28%
Jumlah Belanja	Rp 3.662.955.330.000	Rp 2.124.692.071.577	58,00%

Neraca

Neraca yang dijabarkan di bawah ini menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Ringkasan neraca per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Ringkasan Laporan Keuangan Anggaran TA 2014

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Jumlah (Rp)	%
ASET				
Aset Lancar	8.616.339.438.866	7.724.113.293.932	892.226.144.934	11.55
Aset Tetap	1.997.947.067.965	2.055.740.213.471	57.793.145.508	2.81
Aset Lainnya	388.309.873.912	382.597.894.468	94.288.020.555	24.64
Jumlah Aset	10.903.964.195.900	10.163.434.673.795	740.529.522.105	7.29

Tabel 1.2 Ringkasan Laporan Keuangan Anggaran TA 2014 (lanjutan)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Jumlah (Rp)	%
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	9.697.320.896.006	7.491.938.695.512	2.205.382.200.494	29.44
Jumlah Kewajiban	9.697.320.896.006	7.491.938.695.512	2.205.382.200.494	29.44
EKUITAS				
Ekuitas Dana Lancar	1.080.981.457.140	232.174.598.420	1.313.156.055.560	365.59
Ekuitas Dana Investasi	2.287.624.757.034	2.439.321.379.863	151.696.622.829	6.22
Jumlah Ekuitas Dana	1.206.643.299.894	2.671.495.978.283	1.464.852.678.389	54.83
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.903.964.195.900	10.163.434.673.795	740.529.522.105	7.29

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 15.938.533.024.611 atau mencapai 122,60 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp13.000.452.098.000. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya pada Tahun Anggaran 2014 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	2.770.104.000	4.139.305.144	149.43
Pendapatan Jasa	10.696.408.587.000	13.600.623.959.426	127.15
Pendapatan Pendidikan	9.044.090.000	11.816.240.001	130.65
Pendapatan Iuran dan Denda	-	396.519.139	100.00
Pendapatan Lain-Lain	2.292.229.317.000	12.549.632.832	0.55
Pendapatan Jasa Layanan Umum	-	2.304.319.897.774	100.00
Pendapatan BLU Lainnya	-	4.687.470.295	100.00
Jumlah	13.000.452.098.000	15.938.533.024.611	122.60

BAB 2

PROFIL KEMENTERIAN

- Visi dan Misi
- Struktur Organisasi
- Sumber Daya Manusia
- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola



VISI DAN MISI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

VISI

Terwujudnya Indonesia informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI

MISI

Meningkatnya kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI

Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

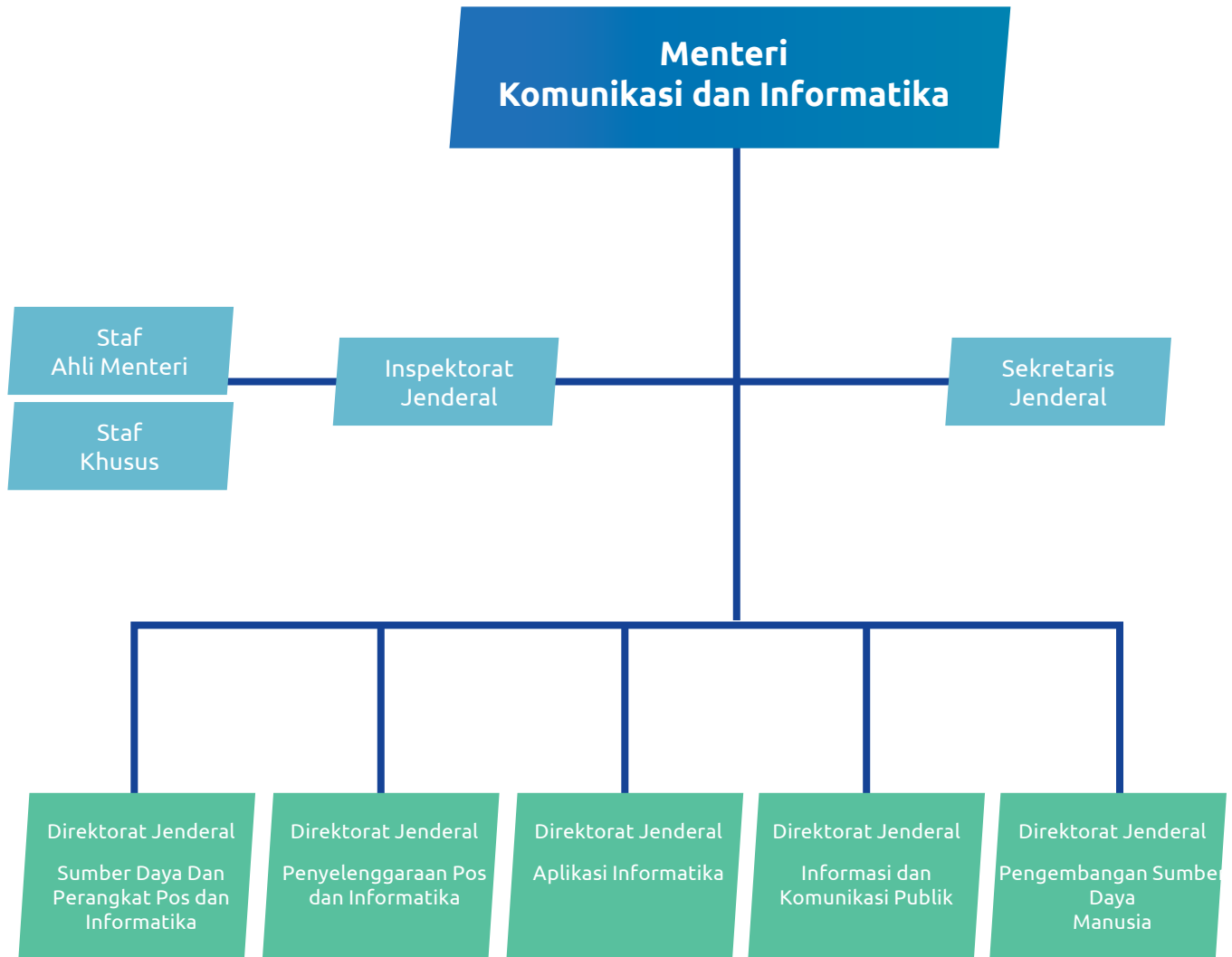
Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa

Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan

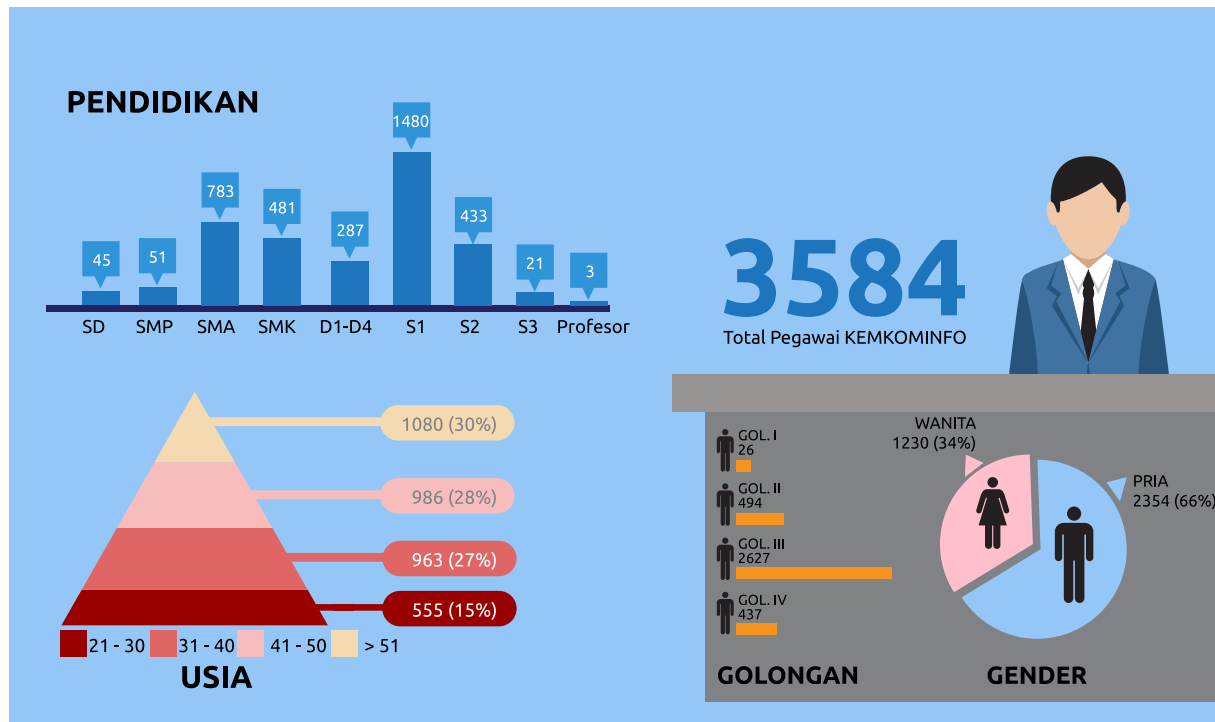
Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global

- Visi dan Misi
- Struktur Organisasi
- Sumber Daya Manusia
- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

STRUKTUR ORGANISASI



PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA



Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Sumber daya manusia yang *capable* dan berintegritas menjadi kekuatan tersendiri bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sampai periode Desember 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika diperkuat oleh 3.584 pegawai yang terbagi dalam tujuh Eselon I dan tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan strata pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika diperkuat oleh pegawai yang bergelar profesor sebanyak tiga orang. Sedangkan yang bergelar Doktor (S3) berjumlah 21 orang. Untuk jenjang pascasarjana berhasil diraih oleh 433 orang. Pegawai yang bergelar sarjana menempati jumlah terbanyak dengan 1480 pegawai.

Berdasarkan Usia

Usia pegawai yang produktif membuat roda organisasi berjalan secara dinamis. Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh pegawai dengan usia produktif antara 31-40 sejumlah 963 pegawai dan yang berusia 41-50 terdapat 986 pegawai. Sedangkan sebanyak 1080 pegawai berada di kelompok usia senior, yakni berusia diatas 50 tahun.

Berdasarkan Gender

Pembinaan dan pengembangan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan prinsip kebijakan pembinaan pegawai yang pro-gender. Pegawai pria di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 2.354 orang atau sebesar 66 persen, sementara pegawai perempuan sebanyak 1.230 orang atau 34 persen.

- Visi dan Misi
- Struktur Organisasi
- Sumber Daya Manusia
- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Jabatan

Komposisi SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika dikelompokkan berdasarkan jabatan sebanyak 2.846 adalah kelompok jabatan Pelaksana. Komposisi berikutnya adalah Pejabat Eselon IV A/B sebanyak 492 orang, pejabat Eselon III A/B sebanyak 186 orang. Untuk kelompok pejabat Eselon II A/B sebanyak 49 orang dan kelompok pejabat Eselon I A/B sebanyak 10 orang.

Berdasarkan Golongan Ruang

Komposisi SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika dikelompokkan berdasarkan golongan ruang yaitu sebanyak 26 orang adalah kelompok golongan I. Komposisi berikutnya adalah golongan II sebanyak 494 orang. Golongan III sebanyak 2.627 orang, Golongan IV sebanyak 437 orang.

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Tata Kelola Organisasi

Quick Wins merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal kementerian / lembaga serta pemerintah daerah. *Quick Wins* Kemkominfo tahun 2014 telah dilaporkan masing-masing Unit Kerja pelaksana dan telah diserahkan ke Inspektorat untuk dievaluasi lebih lanjut. *Quick Wins* yang telah dicapai pada tahun 2014 hasilnya antara lain :

- Standar pelayanan di PPID telah dibuat dalam bentuk SOP yang menjadi acuan bagi pengguna layanan dalam pengurusan. Dengan SE Sekjen no. 11 Tahun 2014
- Pelayanan sertifikasi REOR perpanjangan telah menggunakan metode jemput bola, sehingga waktu pengerjaan sertifikat REOR Perpanjangan dari semula memerlukan waktu 14 hari kerja sekarang menjadi 1 (satu) hari kerja.
- Waktu layanan persetujuan nama domain .go.id yang semula sesuai dengan SOP dan ISO adalah 5 hari dengan capaian *Quick Wins* dipercepat menjadi maksimum 4 hari kerja. Selanjutnya akan dievaluasi kembali jika memungkinkan direncanakan akan lebih dipercepat lagi untuk waktu yang akan datang.

Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2014

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh Kementerian PAN&RB mendapat penilaian 57.85 dengan kategori CC yang artinya cukup baik/memadai dengan catatan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi di Kemkominfo, antara lain :

- Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi
Nilai akuntabilitas kinerja Kemkominfo adalah 66.46 (B) dan nilai survey internal kapasitas organisasi 3.48 dari skala 5, artinya pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan Kemkominfo dapat dikatakan baik, tetapi perlu beberapa perbaikan di beberapa area antara lain keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pelaksanaan RB, meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani akuntabilitas kinerja, pengembangan *e-government* yang terintegrasi dan perlu melakukan pemetaan proses bisnis kegiatan utama untuk dapat menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien.
- Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pencapaian sasaran ini belum tercapai dengan baik. Opini Laporan Kinerja Kemkominfo masih wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP), perlu perhatian lebih dari pimpinan untuk melakukan pembenahan terhadap pengelolaan dan pengawasan keuangan di lingkungan internal Kemkominfo.
- Peningkatan kualitas layanan publik. Kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemkominfo sudah cukup baik. Dari survey eksternal kualitas pelayanan indeks kepuasan masyarakat menunjukkan angka 3.03 dari skala
- Upaya peningkatan kualitas layanan publik dapat dilakukan dengan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi, sistem *punishment/reward* bagi pelaksana layanan dan penyempurnaan SOP dan evaluasi pelaksanaannya.

Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan salah satu hal penting dalam proses Reformasi Birokrasi dan Transformasi kelembagaan di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk menjaga agar organisasi tetap berjalan sesuai dengan koridor tugas dan fungsinya, disusunlah suatu indikator penilaian pegawai. Sesuai dengan PP 46 tahun 2011 tentang penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan penilaian SKP sejak Januari 2014 dan periode penilaian pada awal bulan Januari 2015. Penilaian terhadap seluruh pegawai dilakukan secara berjenjang oleh atasan. Tujuan dari pelaksanaan penilaian SKP agar metode penilaian kinerja pegawai menjadi lebih jelas, serta bisa menjadi alat pengendali strategis bagi manajemen secara berjenjang, dari level eselon I hingga level staf pelaksana. Penilaian SKP ini dimaksudkan sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat pegawai, juga untuk dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Dengan pelaksanaan SKP, diharapkan penilaian kinerja pegawai bisa menjadi lebih objektif, adil dan transparan.

Pengawasan dan Pencegahan Korupsi

Agenda Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan pengawasan yang intensif dari aparat pengawasan internal Kementerian. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga ke tahap monitoring dan evaluasi, baik terhadap efektivitas pelaksanaan program maupun terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Untuk mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo, beberapa hal yang telah dilakukan antara lain sbb :

1. Evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang berjalan di seluruh Satker dalam menjalankan tugasnya.
2. Pendampingan dalam penerapan Manajemen Risiko dan mengembangkan *self-assessment tools* atas pengelolaan Manajemen Risiko.

3. Peningkatan SDM, yang tidak saja dilakukan guna memenuhi kompetensi, karakter dan budaya yang dibutuhkan untuk mencapai opini WTP, melainkan juga untuk mengantisipasi penerapan atas akuntansi berbasis akrual.

Terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penciptaan *good governance* di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian/ Lembaga-nya. Salah satu aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda dalam tahun 2014 di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Pengendalian Gratifikasi dengan target berupa pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi dan penyusunan laporan Unit Pengendali Gratifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dibentuk dengan Keputusan Menteri Nomor 686 Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014, dimana anggotanya terdiri dari perwakilan seluruh Satuan Kerja yang ada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. Sosialisasi mengenai Gratifikasi

Aksi selanjutnya yang menjadi tugas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) adalah tersosialisasinya pemahaman tentang gratifikasi dan tersedianya Laporan UPG mengenai gratifikasi yang disampaikan kepada KPK. Untuk itu pada tanggal 17 September 2014 telah dilakukan sosialisasi mengenai Gratifikasi dan Pengelolaan UPG. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar dan komprehensif bagi jajaran Kementerian Komunikasi

Gambar 2.1 Kegiatan Sosialisasi mengenai Pengendalian Gratifikasi



Gambar 2.2 Kegiatan Sosialisasi LHKPN dan Asistensi Pengisian LHKPN



- Visi dan Misi
- Struktur Organisasi
- Sumber Daya Manusia
- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

dan Informatika tentang pengertian gratifikasi yang dalam kondisi tertentu dapat terkategori menjadi tindak pidana korupsi, serta bagaimana aparaturnya mengendalikannya agar terhindar dari gratifikasi baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya peningkatan komitmen anti korupsi di lingkungan Kemkominfo.

3. Sosialisasi LHKPN dan Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan hal-hal yang terkait dengan itu, yang menjadi salah satu kewajiban bagi Penyelenggara Negara tertentu untuk menyampaikannya ke KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, melalui kegiatan ini kita berharap akan adanya peningkatan kepatuhan para penyelenggara Negara di lingkungan Kemkominfo dalam penyampaian LHKPN, yang selanjutnya tentu akan memberi pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja Kementerian secara keseluruhan.

4. Sosialisasi Praktik Pengadaan Barang dan Jasa yang Bebas KKN

Kegiatan Sosialisasi Praktik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014, dengan peserta sebanyak 127 orang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pendalaman pemahaman terkait dengan perkembangan yang terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa Pemerintah, khususnya menyangkut pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ternyata banyak liku-likunya dan bila kita tidak hati-hati dapat "terjerembab" ke dalam suatu kesalahan yang dapat merugikan keuangan Negara.

5. Bimbingan Teknis Whistle Blowing System LKPP

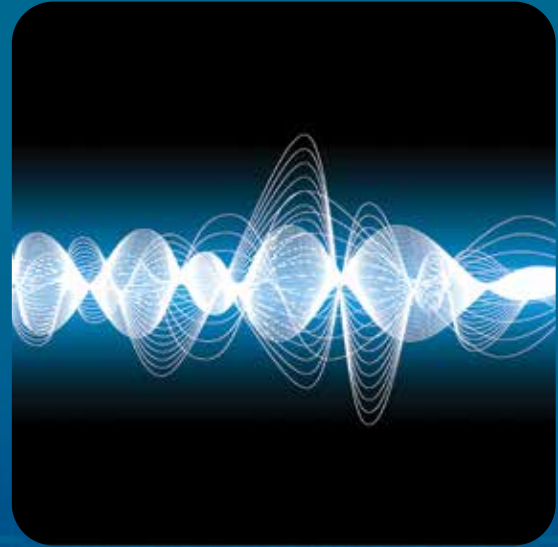
Sebagai bagian dari upaya penerapan praktik pengadaan barang dan jasa yang bebas dari KKN telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) *Whistle Blowing System* pada tanggal 18 September 2014 di Jakarta. Tujuan dari dilaksanakannya WBS ini antara lain :

- Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa;
- Mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa; dan
- Meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *whistle blower* dalam rangka pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

BAB 3

PELAYANAN PUBLIK

- Peningkatan Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio melalui E-licensing
- Pelayanan Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Online
- Upgrade layanan domain.go.id
- Layanan aduan di bidang Pers
- Layanan aduan konten negatif di internet (Trust+ Positif)



- Peningkatan Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio melalui E-licensing
- Pelayanan Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Online
- Upgrade layanan domain.go.id
- Layanan aduan di bidang Pers
- Layanan aduan konten negatif di internet (Trust+ Positif)

PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN FREKUENSI RADIO MELALUI E-LICENSING

Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen menerapkan perizinan frekuensi radio secara daring melalui e-licensing dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan frekuensi radio yang mudah, cepat dan pasti yang penerapannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Perizinan perizinan frekuensi radio melalui *e-licensing* untuk permohonan baru ISR sudah dimulai sejak 17 April 2013, dimana sebelumnya juga sudah diimplementasikan tools pendukung perizinan yang dapat diakses secara daring, seperti simulasi tarif BHP Frekuensi Radio dan pengunduhan SPP BHP Frekuensi Radio secara daring, termasuk monitoring status pembayaran BHP Frekuensi Radio dan status proses perizinan frekuensi radio.

Sejak tanggal 11 Agustus 2014 telah dilakukan penyempurnaan modul *e-licensing* melalui modul

SPECTRAweb yang diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan dalam modul elicensing sebelumnya sehingga dapat lebih memperlancar proses pelayanan perizinan frekuensi radio. Dalam rangka mendukung kelancaran proses peralihan *e-licensing* ke modul SPECTRAweb, telah dilakukan beberapa kali koordinasi, evaluasi dan asistensi bersama para pengguna frekuensi radio, khususnya para operator seluler dan BWA, sekaligus untuk menjaring masukan dan partisipasi dari para pengguna layanan dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan frekuensi radio. Guna mendukung kelancaran proses perizinan melalui *e-licensing*, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melakukan penyesuaian *Standard Operational Procedure (SOP)* proses perizinan frekuensi radio berbasis *e-licensing*, sekaligus menyempurnakan SOP sebelumnya, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi setiap petugas pelayanan perizinan frekuensi radio melalui *e-licensing*.

Tabel 3.1 Jumlah Pemohon ISR tahun 2014

Keterangan	Dinas	Dinas Maritim dan Penerbangan	Dinas Satelit	Total
Jumlah Permohonan	355	10,655	5,665	16,675
CetakSPP	355	-	5,665	6,020
CetakISR	355	9,057	3,484	12,893

*)tidak termasuk permohonan ISR yang ditolak

Keterangan	Dinas	Dinas Maritim dan Penerbangan	Dinas Satelit	Total
Selesai diproses	352	9,057	3,484	12,893
Tepat Waktu	352	9,057	3,484	12,893
Tidak Tepat Waktu	0	0	0	0
Jumlah Hari Kerja (rata-rata)	21.65	34.51	22.4	26.1
Layanan/Dinas			ISR Perpanjangan	
Tepat Waktu	a. Radio Siaran	1614		
	b. TV Siaran Analog	383		
	c. TV Siaran Digital	75		
Tidak Tepat Waktu	a. Stasiun Kapal Laut	5613		
	b. Radio Pantai	384		
	c. Stasiun Pesawat Udara	650		
	d. Darat Udara	829		
Dinas Satelit	24946			
TOTAL	34494			

PELAYANAN PERIZINAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SECARA ONLINE

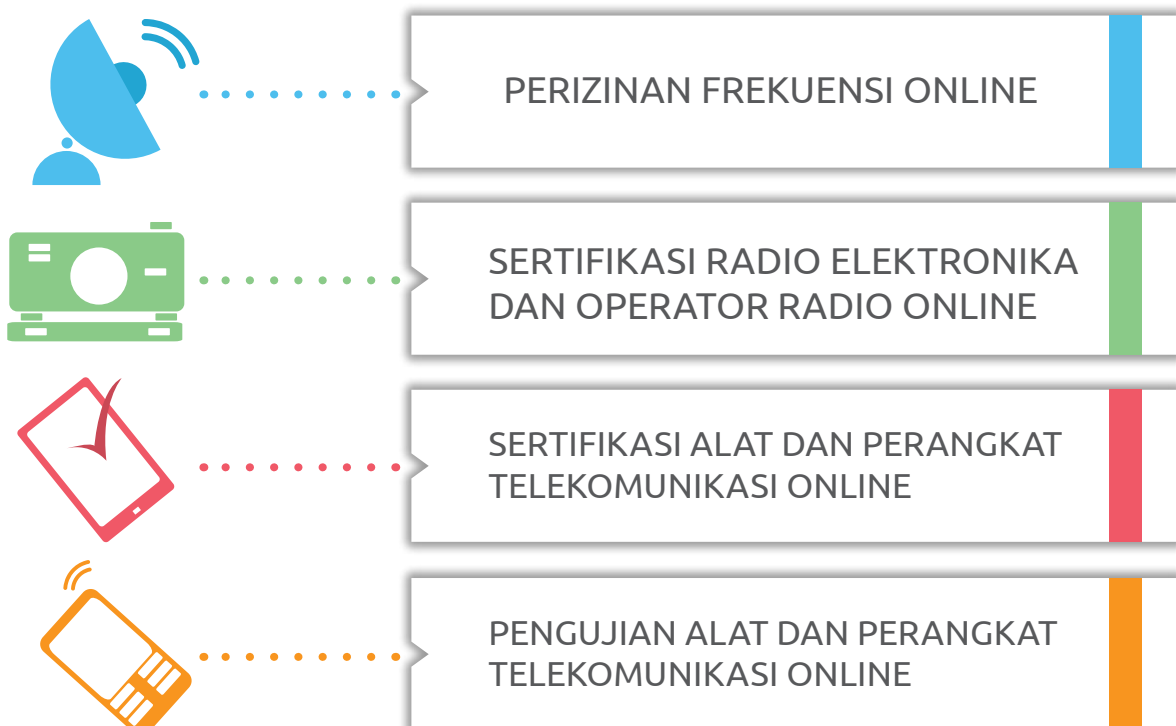
Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, disebutkan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin Pemerintah (Menteri), dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis maupun lebar pita frekuensi. Untuk memperlancar proses pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio perlu dilakukan pengaturan tentang Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Online. Pengaturan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio secara online selain dimaksudkan untuk menciptakan perizinan yang transparan dan akuntabel, juga bertujuan menjadikan proses perizinan menjadi lebih cepat, efisien dan efektif. Hal ini

merupakan *conditio sine quom* ditengah meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap berbagai layanan perizinan spektrum frekuensi radio baru yang terus berkembang dan bermunculan yang menuntut keakuratan, keamanan dan percepatan proses baik dari segi waktu maupun biaya.

Pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur tentang Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Online, dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang mewajibkan pengguna frekuensi radio berizin dan membayar biaya penggunaan frekuensi radio dan, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Jenis layanan online dari perizinan frekuensi yang dilaksanakan oleh Kemkominfo adalah:



- Peningkatan Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio melalui E-licensing
- Pelayanan Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Online
- Upgrade layanan domain.go.id
- Layanan aduan di bidang Pers
- Layanan aduan konten negatif di internet (Trust+ Positif)

UPGRADE LAYANAN DOMAIN.GO.ID

Saat ini regulasi mengenai pengelolaan nama domain di Indonesia diatur dengan Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2013. Dalam Permen tersebut diatur empat klasifikasi nama domain yakni : nama domain tingkat generik, nama domain tingkat tinggi, nama domain tingkat kedua dan nama domain tingkat turunan. Berdasarkan SK Menkominfo Nomor 806 Tahun 2014 pengelolaan nama domain tingkat tinggi (registri) dikelola oleh Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI).

Khusus untuk instansi pemerintah (K/L), dasar hukum penyelenggaraan yakni Permenkominfo Nomor 28 Tahun 2006. Permen ini akan direvisi menjadi Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara yang sampai saat ini belum disahkan. Terdapat hal-hal

penting yang diatur, diantaranya : adanya aturan mengenai penonaktifan nama domain Instansi Penyelenggara Negara.

Klasifikasi Penggunaan nama domain Instansi Penyelenggara Negara antara lain : alamat elektronik resmi Instansi, layanan publik dan kegiatan berskala nasional. Server Nama Domain dan Alamat IP wajib di wilayah hukum NKRI. Pelayanan Nama Domain K/L merupakan salah satu dari tiga *Quick Wins* Kementerian Kemkominfo. Berdasarkan pemetaan hasil tahun 2014 telah mencapai target yakni waktu persetujuan layanan 4 hari dengan SLA 90% sesuai dengan ISO 2008:9001. Capaian kinerja untuk nama domain tahun 2014 sebesar 100% dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Pemohon Domain tahun 2014

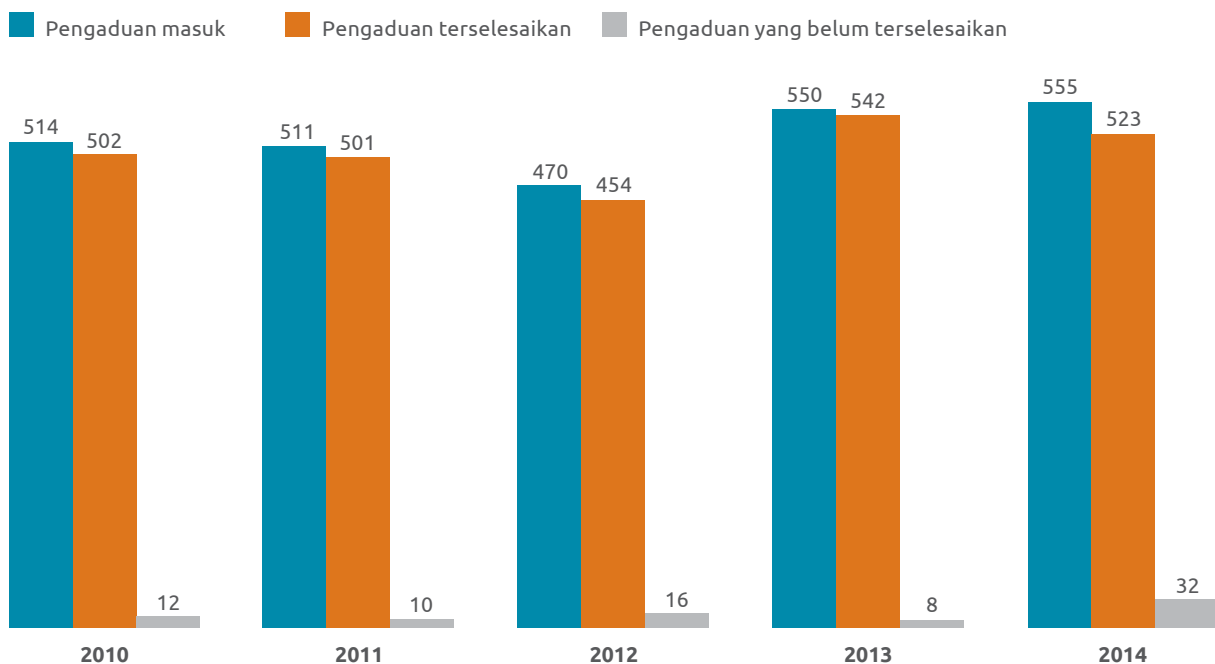
Bulan	Pemohon	Approval	Reject	Tertunda
Jan	72	28	44	0
Feb	26	12	14	0
Mar	70	32	38	0
Apr	44	28	16	0
Mei	23	8	15	0
Jun	32	13	19	2
Jul	24	11	13	0
Agt	25	13	12	0
Sept	9	3	6	0
Okt	12	5	7	0
Nop	18	12	6	0
Des	25	10	15	0

LAYANAN ADUAN DI BIDANG PERS

Pada tahun 2014, pengaduan kasus pers yang masuk ke Dewan Pers sebanyak 555 kasus, kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 523 kasus, sisanya 32 kasus

akan diselesaikan pada tahun 2015. Pengaduan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rincian jumlah pengaduan dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Pengaduan yang Masuk, Terselesaikan, Belum terselesaikan Tahun 2010 s.d 2014



Sumber : Bagian Pengaduan Sekretariat Dewan Pers

Adapun bentuk penyelesaian dari 523 kasus tersebut yaitu 30 kasus dengan cara mediasi (25 kasus dimediasi di Jakarta, 5 kasus di daerah), 281 kasus melalui surat-menyurat, 28 kasus diselesaikan dengan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), 184 kasus melalui komunikasi langsung dengan pihak terkait dan lain-lain. PPR dikeluarkan oleh Dewan Pers apabila proses penyelesaian kasus tersebut tidak berhasil diselesaikan melalui proses mediasi.

Hasil mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan Dewan Pers adalah keputusan atau rekomendasi yang 80 persen menyatakan media atau jurnalis melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalis dalam berbagai bentuk. Adapun sanksi yang dijatuhkan Dewan Pers untuk pelanggaran kode etik adalah pemuatan hak jawab, pemuatan hak jawab disertai dengan permintaan maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik untuk jurnalis atau redaktur yang melakukan kesalahan atau pelanggaran kode etik. Dari jumlah itu, 95 persen dari putusan Dewan Pers ditaati oleh media atau jurnalis bersangkutan.

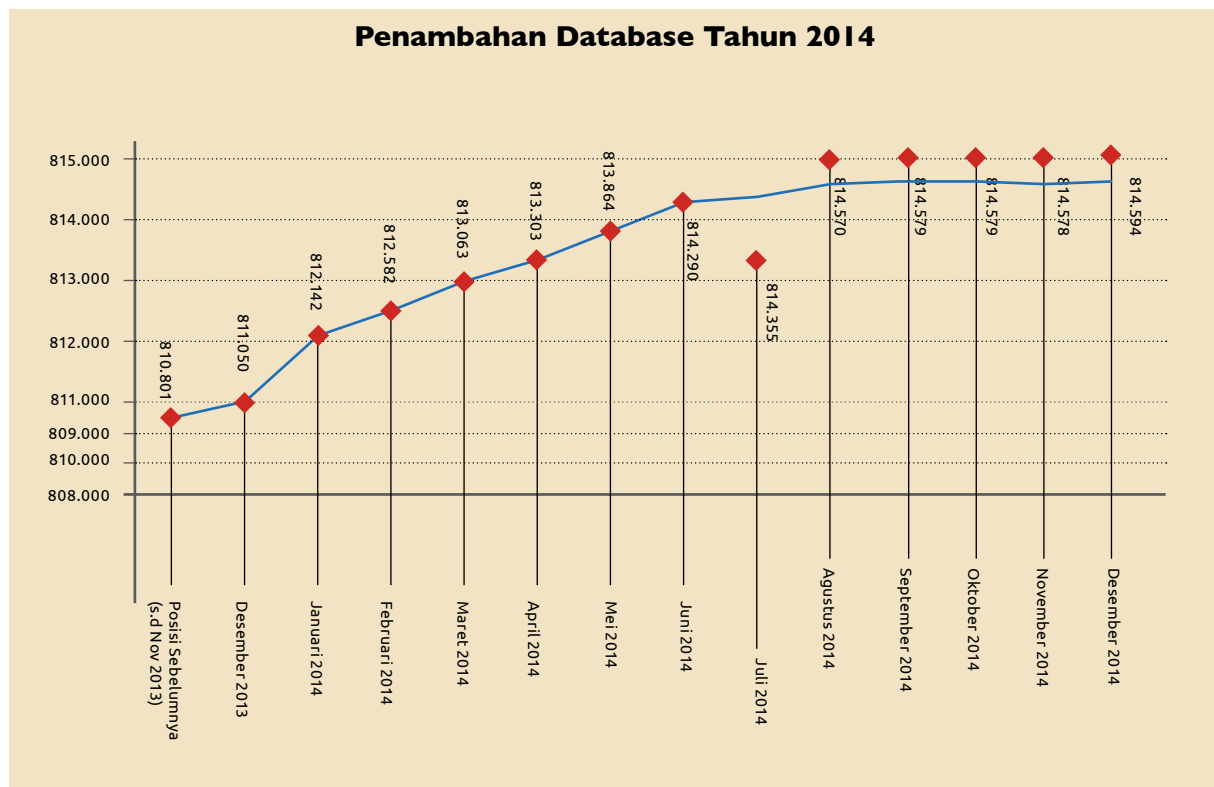
- Peningkatan Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio melalui E-licensing
- Pelayanan Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Online
- Upgrade layanan domain.go.id
- Layanan aduan di bidang Pers
- Layanan aduan konten negatif di internet (Trust+ Positif)

LAYANAN ADUAN KONTEN NEGATIF DI INTERNET (TRUST+POSITIF)

Telah dikembangkan model penyaringan konten internet yang dapat digunakan masyarakat menuju internet sehat dan aman. Model ini disebut Trust+Positif menjadi acuan bagi seluruh Internet Service Provider (ISP). Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah:

- Pengembangan filtering/penyaringan;
- Memfasilitasi untuk membuat referensi bersama secara nasional;
- Melakukan updating secara terus menerus;
- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ISP-ISP untuk proses updating dari sisi ISP;
- Menyiapkan RPM tata cara pemblokiran black list trust+ positif;
- Melakukan survey lapangan terhadap warnet-warnet secara sampling di beberapa kota.

Tabel 3.4 Jumlah Aduan Konten Negatif Tahun 2014



Konten-konten yang disaring melalui model Trust+Positif ini adalah konten yang memuat unsur pornografi dan kegiatan ilegal lainnya seperti : situs obat tanpa izin edar, situs perdagangan ilegal, situs kekerasan, dan lain-lain. Masyarakat dapat mengadakan situs-situs negatif untuk dilakukan penyaringan ke aduankonten@mail.kominfo.go.id atau trustpositif.kominfo.go.id.

BAB 4

KEBIJAKAN BIDANG FREKUENSI RADIO

- Kebijakan Penataan Frekuensi
- Penyusunan dan Rencana Kanal Spekfrekrad dalam rangka Implementasi Penyiaran Televisi Digital
- Pengelolaan Filling Satelit Indonesia
- Rencana Pitalebar Indonesia
- Persiapan Migrasi Frekuensi Khusus Maritim dari Analog ke Digital
- Migrasi TV Analog ke Digital
- Kebijakan Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO)
- Kebijakan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
- Kebijakan Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik



- Kebijakan Penataan Frekuensi
- Penyusunan dan Rencana Kanal Spektrekrad dalam rangka Implementasi Penyiaran Televisi Digital
- Pengelolaan Filling Satelit Indonesia
- Rencana Pitalebar Indonesia
- Persiapan Migrasi Frekuensi Khusus Maritim dari Analog ke Digital

- Migrasi TV Analog ke Digital
- Kebijakan Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO)
- Kebijakan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
- Kebijakan Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

KEBIJAKAN PENATAAN FREKUENSI

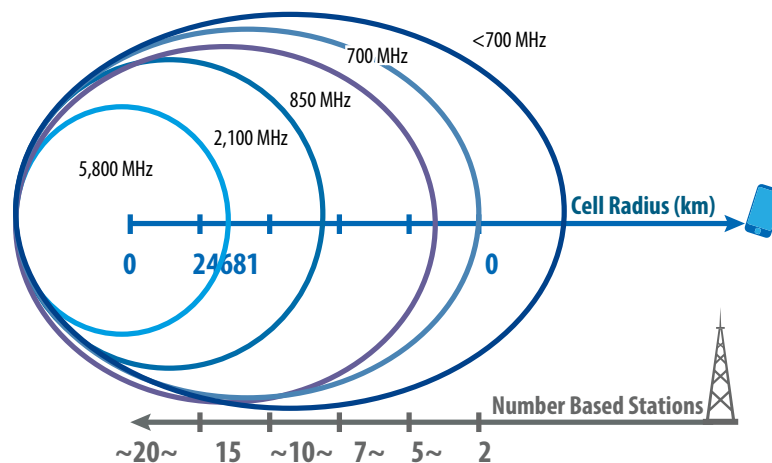
Penataan Frekuensi 800 MHz

Teknologi senantiasa berkembang pesat mengikuti dinamika waktu. Termasuk pula diantaranya teknologi telekomunikasi pada jaringan seluler yang dari waktu ke waktu meningkat secara signifikan, termasuk dalam perkembangan teknologi *Code Division Multiplex Access* (CDMA) pada pita frekuensi 800MHz.

Sejatinya, pita 800MHz merupakan salah satu pita yang sangat ideal untuk penggelaran jaringan *broadband* karena karakteristik propagasinya sehingga memungkinkan jangkauan yang luas dibandingkan pita seperti 1800 atau 2100MHz.

Diagram berikut menunjukkan perbandingan jangkauan dan jumlah BTS (cell) yang dibutuhkan untuk berbagai macam pita layanan seluler.

Gambar 4.1 Perbandingan Jangkauan dan Jumlah BTS



Pada tahun 2014, untuk mengantisipasi sempitnya pita lebar yang dimiliki operator pada frekuensi 800 MHz dan bersatunya teknologi generasi lanjut 4G (*Long Term Evolution*), Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan kebijakan baru agar pemanfaatan pita frekuensi 800MHz lebih optimal. Tujuan utama penataan 800MHz ini adalah:

1. Penetrasi akses komunikasi pita lebar di pedesaan (rural), termasuk untuk percepatan pencapaian antar get Indonesia BroadbandPlan dan MP3EI, baik dari prosentasi penetrasi maupun target kecepatan minimum.
2. Penyehatan industri, dimana kondisi operator CDMA 800MHz (FWA dan Seluler) yang telah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, dimana seluruh operator CDMA tersebut, mengalami kerugian yang signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Pada September 2014 terbitlah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800MHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Keputusan ini diikuti dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 798, Nomor 799, Nomor 800 dan Nomor 801 Tahun 2014 mengenai penetapan pita frekuensi 800MHz kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Indosat, PT Smartfren Telecom, dan kepada PT Bakrie Telecom.

PENYUSUNAN DAN RENCANA KANAL SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PENYIARAN TELEVISI DIGITAL

Pada tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penyusunan konsep (draft) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan penyiapan kanal transisi digital di wilayah-wilayah layanan siaran yang akan bersiaran digital setelah hasil seleksi multiplexer dilakukan.

Awalnya target tahun 2014 adalah 1 (satu) draft dokumen Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang pengaturan penggunaan pita spektrum frekuensi radio UHF untuk keperluan transisi televisi siaran digital terestrial pada zona-zona layanan yang belum diadakan seleksi penyelenggara multiplexer tv digital. Draft dokumen tersebut akan mengatur penggunaan kanal transisi se-Indonesia.

Namun dipertengahan tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempertimbangkan

untuk terlebih dahulu melakukan perubahan (revisi) terhadap Masterplan kanal UHF TV bersiaran analog sebagaimana tertuang dalam Kepmen 76/2003. Revisi terhadap Kepmen 76/2003 perlu dilakukan untuk mendukung proses simulcast dan penataan kanal transisi TV digital. Revisi termasuk perubahan jumlah kanal TV serta pengaturan perubahan data teknis termasuk perluasan wilayah layanan siaran TV analog.

Hingga akhir tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan 1 (satu) draft dokumen Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang pengaturan penggunaan pita spektrum frekuensi radio UHF untuk keperluan transisi televisi siaran digital terestrial serta 1 (satu) Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2014 tentang rencana induk (masterplan) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan televisi siaran analog pada pita UHF.

- Kebijakan Penataan Frekuensi
- Penyusunan dan Rencana Kanal Spekfrekrad dalam rangka Implementasi Penyiaran Televisi Digital
- **Pengelolaan Filling Satelit Indonesia**
- Rencana Pitalebar Indonesia
- Persiapan Migrasi Frekuensi Khusus Maritim dari Analog ke Digital

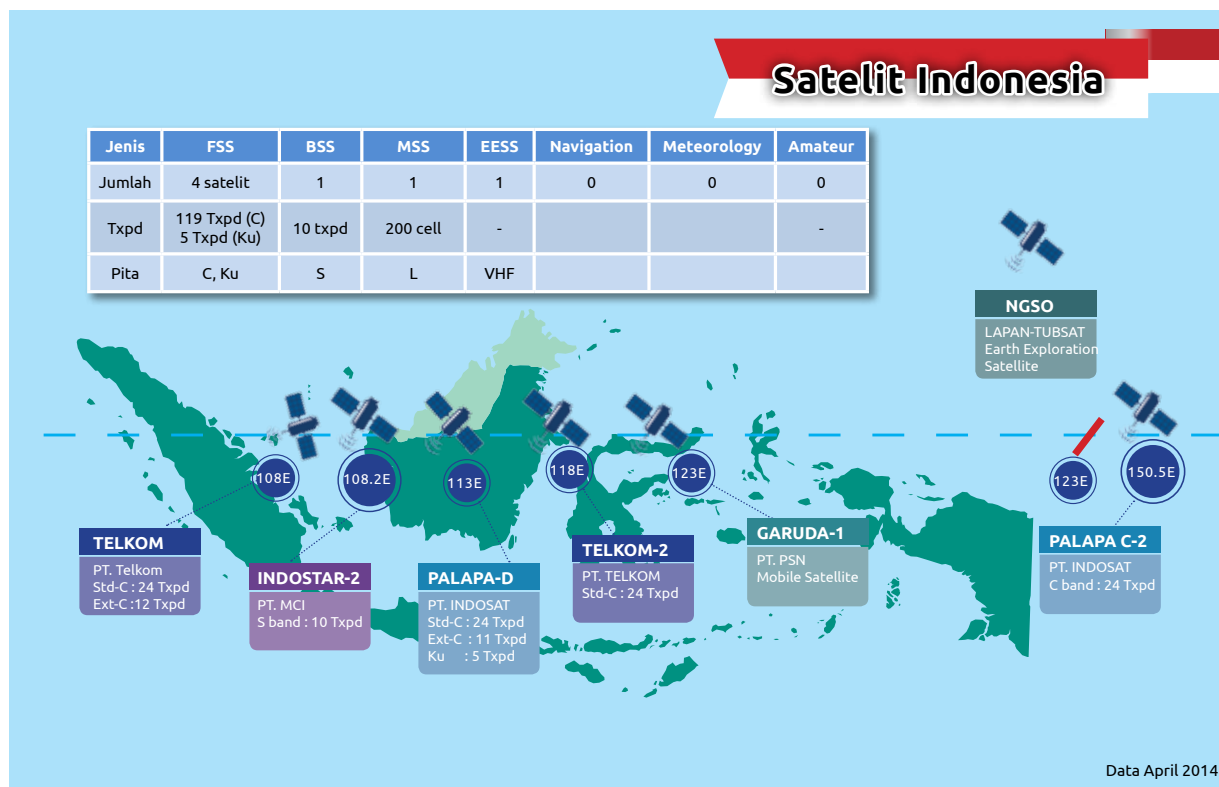
- Migrasi TV Analog ke Digital
- Kebijakan Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO)
- Kebijakan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
- Kebijakan Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

PENGELOLAAN FILLING SATELIT INDONESIA

Slot Orbit dan spektrum frekuensi radio satelit merupakan sumber daya alam yang terbatas yang tidak dapat dimiliki oleh suatu negara. Pengaturan penggunaan slot orbit di angkasa diatur oleh International Telecommunication Union (ITU). Data satelit Indonesia yang beroperasi pada Semester-1 Tahun 2014 sesuai tertera dalam Gambar 5.12 dengan 7 jenis mencakup FSS, BSS, MSS, EESS, navigasi, meteorology, amatir. Pemerintah saat ini mengembangkan jenis navigasi, meteorologi dan amatir terkait dengan keamanan dan persatuan bangsa.

Untuk menjaga Filling Indonesia agar tidak terganggu oleh adanya Filling baru yang didaftarkan oleh negara lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus memberikan tanggapan atas publikasi *Filling Satelit* yang dikeluarkan ITU pada waktunya. Sepanjang tahun 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan tanggapan untuk 12 publikasi jaringan satelit ITU yaitu publikasi BRIFIC 2767 sampai dengan BRIFIC 2778.

Gambar 4.2 Data Satelit Indonesia Semester-1 Tahun 2014



RENCANA PITALEBAR INDONESIA

Sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pitalebar, Pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat telah menyelesaikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pitalebar nasional yang dituangkan dalam Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 atau RPI, melalui Peraturan Presiden Nomor

96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. Sebagai peraturan pitalebar yang pertama ditetapkan, RPI jelas menjadi milestone penting dalam pembangunan TIK nasional, dan diharapkan RPI dapat menjadi titik awal bagi percepatan pembangunan pitalebar di Indonesia.

RENCANA PITALEBAR INDONESIA (RPI)

Broadband dalam dokumen Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) didefinisikan sebagai akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung (always-on) dan memiliki kemampuan tripple-play dan mampu memenuhi standar kualitas layanan (Qos) dan kualitas pengalaman (QoE) pengguna.



- Kebijakan Penataan Frekuensi
- Penyusunan dan Rencana Kanal Spekfrekrad dalam rangka Implementasi Penyiaran Televisi Digital
- Pengelolaan Filling Satelit Indonesia
- Rencana Pitalebar Indonesia
- Persiapan Migrasi Frekuensi Khusus Maritim dari Analog ke Digital

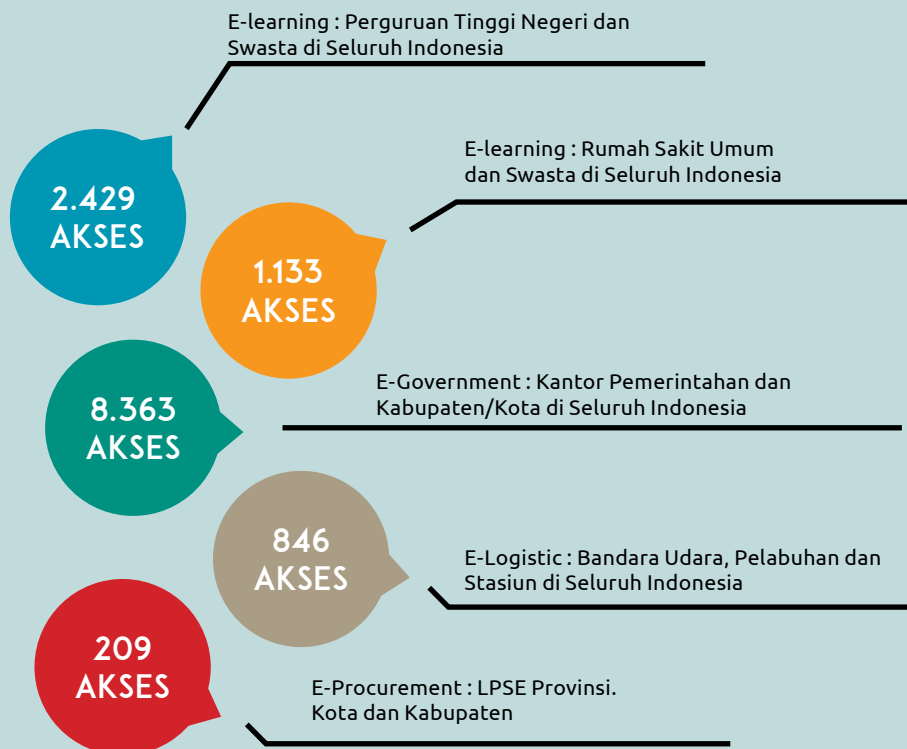
- Migrasi TV Analog ke Digital
- Kebijakan Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO)
- Kebijakan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
- Kebijakan Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

Peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019 telah dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tanggal 15 Oktober 2014. Kesenambungan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 melalui sektor prioritas pembangunan pitalebar Indonesia difokuskan untuk mendukung lima sektor, yang terdiri atas: e-Pemerintahan, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik; dan e-Pengadaan, maka Kementerian Komunikasi

dan Informatika telah menyusun Inpres Percepatan Pengembangan Infrastruktur *Broadband* Untuk Mendukung Perluasan Implementasi *E-Learning*, *E-Health*, *E-Procurement*, *E-Government*, *E-Logistic* Dan Layanan Konvergensi Di Indonesia.

Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait (kementerian/instansi, pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi) dalam menyusun target cakupan wilayah layanan dan pencapaian.

Target Inpres Percepatan Pengembangan Infrastruktur Broadband



PERSIAPAN MIGRASI FREKUENSI KHUSUS MARITIM DARI ANALOG KE DIGITAL

Kebutuhan frekuensi maritim terus meningkat mengikuti pertumbuhan jumlah pelabuhan di setiap negara. Indonesia memaknai alokasi frekuensi maritim sebagai salah satu elemen yang sangat penting. Lokasi Indonesia yang strategis, yaitu diapit Benua Australia, Asia dan Amerika, serta berada diantara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang sangat berpotensi menjadi negara transit bagi armada transportasi laut dari pelbagai penjuru dunia.

Komunikasi radio untuk kepentingan maritim merupakan komunikasi radio yang berhubungan dengan keselamatan transportasi melalui laut. Dalam Radio Regulation (RR) ITU-R, alokasi frekuensi untuk kepentingan komunikasi radio maritim meliputi *Maritime Mobile Services, Radio Navigation Services, Radio Determination Services, Radio Location Service* baik servis terrestrial maupun satelit.

Di Indonesia pengaturan serta penentuan kanal frekuensi dilakukan bersama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Departemen Perhubungan. Sementara, penggunaan komunikasi radio maritim untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dikoordinasikan bersama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan TNI.

Untuk hubungan komunikasi radio maritim internasional dikoordinasikan melalui ITU (*International Telecommunication Union*), IMO (*International Maritime Organization*) maupun INMARSAT (*International*

Maritime Satellite). Frekuensi radio stasiun pantai, komunikasi GMDSS (*Global Maritime Distress and Safety Services*), maupun frekuensi komunikasi radio, terutama yang bekerja di HF, dapat menembus batas negara. Terkait hal ini, ITU telah memberikan dan menentukan penjatahan (allotment) kanal frekuensi untuk setiap negara. Pita frekuensi radio yang digunakan adalah pita frekuensi yang dalam tabel alokasi Radio Regulation terdapat alokasi *Maritime Mobile Services, Mobile Services, Maritime Mobile Satellite Services, Radio Navigation Services*.

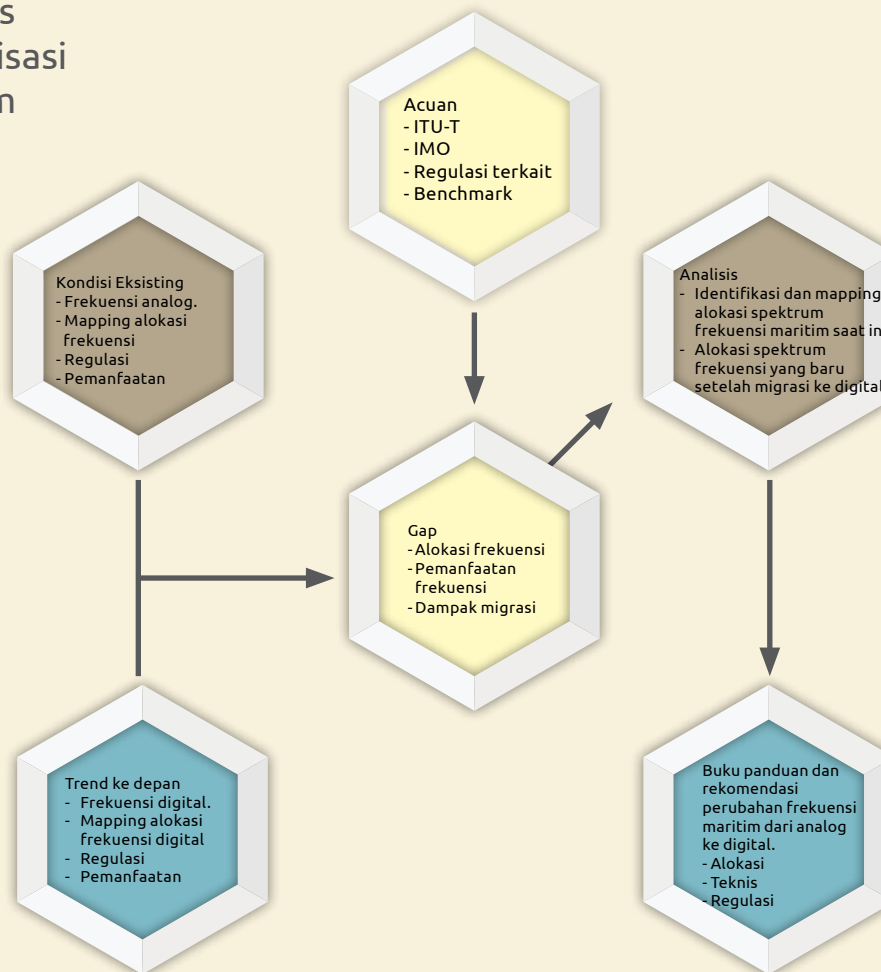
ITU (*International Telecommunication Union*) telah menerbitkan Final Act ITU terkait rencana migrasi frekuensi dinas maritim dari analog ke digital. Perubahan tersebut diikuti dengan perubahan alokasi frekuensi khusus Dinas Bergerak Maritim pada pita HF dan VHF. Perubahan tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2017. Terkait hal tersebut, maka implementasi teknologi maritim yang moderen diperlukan untuk dapat menunjang kapal-kapal yang akan transit di Indonesia. Teknologi moderen tersebut akan mengusung penggunaan teknologi dengan frekuensi digital. Regulator, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berperan aktif dalam penataan roadmap dari teknologi yang akan datang tersebut, sehingga penggunaannya sesuai dengan keadaan geografis dan global.

Kerangka analisa dan tahapan persiapan migrasi dari analog teknologi radio komunikasi maritim dari analog ke digital ini merupakan tahapan yang menggambarkan proses analisa perubahan frekuensi maritim dari analog ke digital serta keterkaitannya dengan teknis, bisnis dan regulasi terkait.

- Kebijakan Penataan Frekuensi
- Penyusunan dan Rencana Kanal Spekfrekrad dalam rangka Implementasi Penyiaran Televisi Digital
- Pengelolaan Filling Satelit Indonesia
- Rencana Pitalebar Indonesia
- Persiapan Migrasi Frekuensi Khusus Maritim dari Analog ke Digital

- Migrasi TV Analog ke Digital
- Kebijakan Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO)
- Kebijakan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
- Kebijakan Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

Progres Digitalisasi Maritim

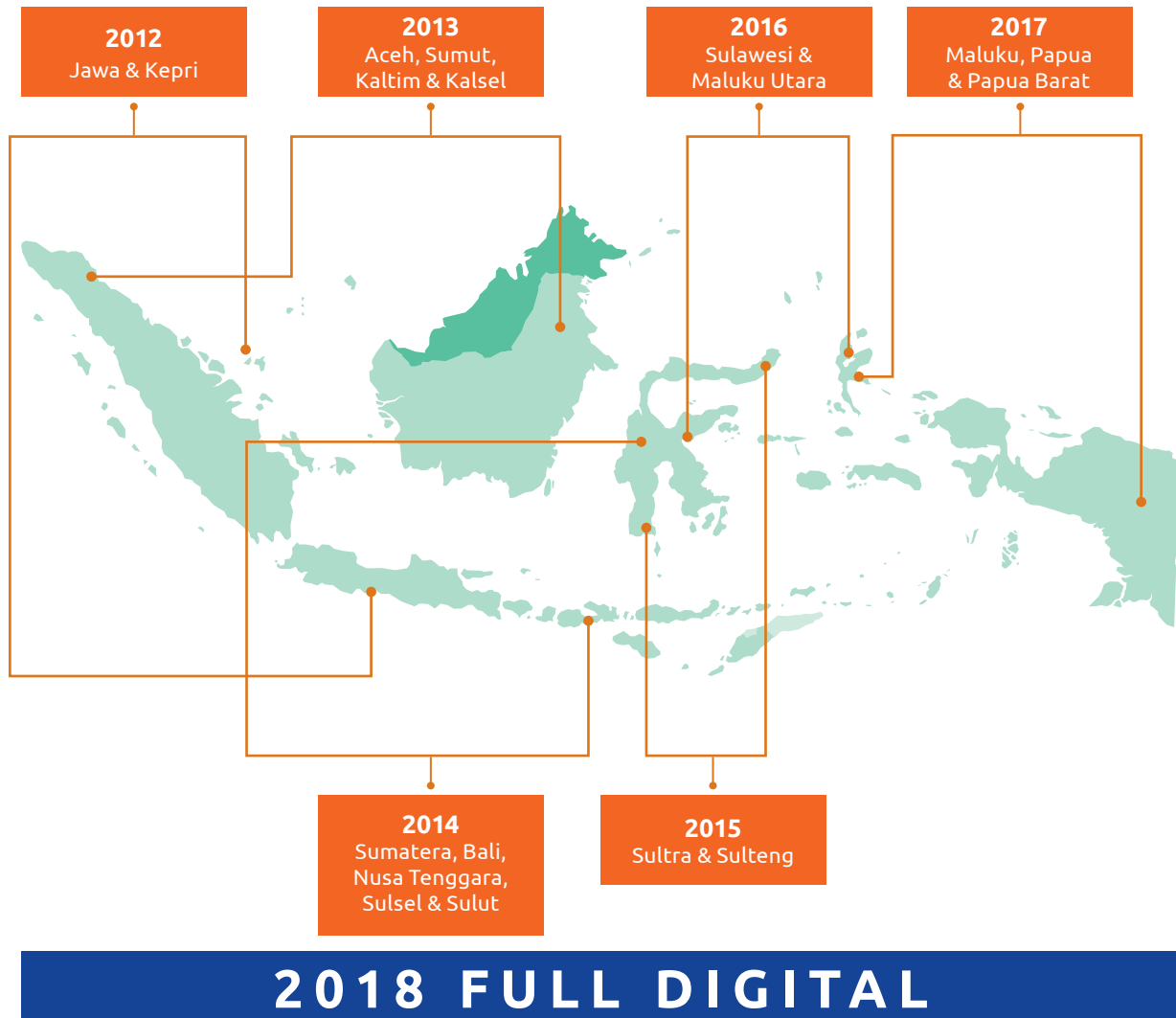


MIGRASI TV ANALOG KE DIGITAL

Sistem siaran televisi digital adalah metode penyiaran televisi dimana format video dan audio yang dipancarkan berupa format digital dan di transmisi dengan metode digital. Kualitas siaran digital adalah relatif sama dalam suatu wilayah jangkauan dan secara drastis menurun hingga menimbulkan suatu *cliff* atau 'jurang' yang memisahkan antara wilayah jangkauan dengan *no-service* area. Penyiaran analog tidak menghasilkan kualitas gambar dan suara yang memadai di pesawat televisi, sedangkan penyiaran digital membantu kualitas penerimaan sinyal gambar dan suara di televisi agar sesuai dengan sinyal asalnya. Sinyal digital bisa diterima tanpa perlu mengganti perangkat televisi, melainkan dapat tetap digunakan dengan bantuan *set-top-box* (alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV).

Pada tahun 2014 telah diterbitkan Kepmenkominfo No. 431 tahun 2014 tentang Penetapan Alokasi Service ID dan Permen Kominfo Nomor 26 tahun 2014 tentang perubahan Permen 32/2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV digital dengan Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan penyelenggara penyiaran *multipleksing* di wilayah Jabodetabek (2 operator Mux yaitu RCTI dan RTV). Seluruh lokasi di Pulau Jawa (5 Provinsi), Kep. Riau, Aceh, Sumatera Utara, Kalsel dan Kaltim telah terjangkau siaran digital (61% jangkauan yang meliputi populasi). Untuk menyosialisasikan migrasi ke TV Digital ini telah dilakukan kegiatan *mall to mall* di 10 lokasi, nobar Final Piala Dunia, sosialisasi pada kegiatan Rakornas Kominfo dan Bakohumas, dan layanan informasi Call Center TV Digital 500801.

Rencana Jangkauan Siaran TV Digital



Dalam implementasinya, manfaat dan peluang dari penyiaran televisi digital antara lain:

1. Perspektif Konsumen: Kualitas gambar dan suara lebih baik (jernih, tajam, dan tidak "bersemut), pilihan program siaran lebih banyak (1 kanal bisa 12 program), layanan interaktif seperti (*Electronic Program Guide/EPG*, cuaca, arus lalin, bahkan belanja), *High Definition Television* (HDTV), *Early Warning System* (EWS);
2. Perspektif Lembaga Penyiaran: Efisiensi infrastruktur dan biaya operasional;
3. Perspektif Industri Kreatif: Menumbuhkan industri konten kreatif dan inovatif;
4. Perspektif Industri Perangkat: Peluang industri manufaktur nasional untuk memproduksi *Set Top Box* lokal;
5. Perspektif Pemerintah: Efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio (*digital dividend*).

Sebagai dukungan regulasi terhadap implementasi penyiaran TV digital, pada tahun 2009 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39 tahun 2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*). Peraturan ini merupakan kerangka dasar atau kerangka pemikiran awal bagaimana melaksanakan implementasi penyiaran TV digital.

- Kebijakan Penataan Frekuensi
- Penyusunan dan Rencana Kanal Spekfrekrad dalam rangka Implementasi Penyiaran Televisi Digital
- Pengelolaan Filling Satelit Indonesia
- Rencana Pitalebar Indonesia
- Persiapan Migrasi Frekuensi Khusus Maritim dari Analog ke Digital

- Migrasi TV Analog ke Digital
- Kebijakan Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO)
- Kebijakan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
- Kebijakan Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

KEBIJAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL/UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (KPU/USO)

Belum meratanya pembangunan dan akses komunikasi dan informasi, khususnya untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tidak layak secara ekonomi menjadikan adanya kesenjangan dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga pemerintah pun merasa perlu untuk melakukan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika.

Untuk menciptakan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi bagi daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tidak layak secara ekonomi, pemerintah melalui Program Kewajiban Pelayanan Universal / *Universal Service Obligation* (KPU/USO) yang dananya bersumber dari kontribusi penyelenggara telekomunikasi.

Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) yaitu kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah pelayanan universal. Akses dalam pengertian ini adalah penyediaan akses telekomunikasi di wilayah USO, sedangkan wilayah pelayanan universal adalah Desa atau sebutan lain dan atau Ibukota Kecamatan yang belum terjangkau akses telekomunikasi.

Dalam melaksanakan program KPU/USO secara konseptual dirasa sangat bermanfaat, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Sehingga, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan dengan menggunakan parameter sebagai berikut:

Gambar 4.3 Alur Pelaksanaan program KPU/USO



KEBIJAKAN PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

Dalam menangani situs internet yang bermuatan negatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Latar belakang dikeluarkannya peraturan menteri ini adalah makin berkembangnya situs negatif di internet dan membutuhkan aturan teknis penanganannya.

Bagian pertama dari PM ini adalah pembagian situs negatif menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 1) Pornografi dan 2) Kegiatan ilegal lainnya. Dasar dari pornografi adalah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sedangkan yang dimaksud Kegiatan Ilegal Lainnya adalah segala konten yang melanggar peraturan perundang-undangan (contohnya situs obat tanpa izin edar, situs perdagangan ilegal, situs kekerasan, dan lainnya). Bagian kedua dari Peraturan Menteri ini terkait dengan tata cara penanganan situs-situs tersebut diatas.

KEBIJAKAN TATA CARA PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

Untuk mendukung penyelenggaraan sistem elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

Peraturan Menteri ini merupakan turunan dari PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (5) yang

mengharuskan Menteri Kominfo untuk menjabarkan aturan teknis terkait dengan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik. PM ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar. Bagian pertama adalah pihak-pihak yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diwajibkan untuk mendaftar sebagai PSE. Bagian kedua adalah tata cara pendaftarannya yang kesemuanya dilakukan secara *online*.

BAB 5

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN AKSESIBILITAS



- Program KPU/USO
- Pembangunan Monitoring Sistem Frekuensi Radio Tahap VI



PROGRAM KPU/USO

Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO) merupakan komitmen bersama negara-negara seluruh dunia yang tergabung dalam organisasi telekomunikasi *International Telecommunication Union* (ITU) pada deklarasi Tokyo 2003. Dalam deklarasi *World Summit on Information Society* (WSIS) disebutkan bahwa setiap negara harus mewujudkan tersedianya akses telepon dan

internet. Tujuan KPU/USO antara lain mengatasi kesenjangan digital dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mendukung meratanya penyediaan akses layanan telekomunikasi baik layanan telepon maupun internet di wilayah perkotaan dan perdesaan khususnya daerah rural yang tidak menguntungkan secara ekonomi.

SUCCESS STORY PROGRAM USO (UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION)

Desa Dering di Desa Mareu Kabupaten Aceh Jaya



Salah satu daerah yang sudah “berdering” adalah Desa Mareu, Kabupaten Aceh Jaya. Desa Mareu adalah sebuah desa yang menjadi bagian wilayah Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Lokasinya di ujung paling Timur Kabupaten Aceh Jaya, tepatnya pada garis batas dengan Kabupaten Aceh Besar. Desa ini masih berada pada wilayah blank spot sehingga belum mendapat akses telekomunikasi.

Sebelum konflik, Desa Mareu dihuni sebanyak 25 KK. Ketika konflik memanas sekitar tahun 2002, Desa Mareu pun tercerabut. Entah siapa pihak yang menyulut api, tiba-tiba saja desa yang sunyi itu berubah menjadi kobaran si jago merah.

Desa Mareu nyaris menjadi “tinggal nama” hingga 29 April 2013, dimana sebuah Tim Supervisi/Recovery USO. Telkomsel Desa Dering menginjakkan kakinya di bumi desa.

Tanggal 29 April 2013, ketika Teknisi USO Desa Dering memulai eksistensinya, boleh dikata menjadi tonggak

berdenyutnya kembali jantung kehidupan di Desa Mareu. Sejak hari itu upaya mengangkat kembali ke permukaan sebuah desa yang “hilang”. Bagi Tim USO Desa Dering, Mareu menyodorkan tantangan tersendiri dalam proses *Recovery*. Secara geografis, lokasi sasaran bukanlah wilayah yang mudah dijangkau. Desa ini sama sekali tidak dapat dicapai dengan kendaraan bermotor beroda dua maupun empat.

Setelah bantuan Desa Dering masuk di Desa Mareu, melalui akses telekomunikasi (*voice call*) Telkomsel dengan perangkat Antena Visat dan BTS PICO yang berkapasitas jarak Radius 200 M, pembangunan di Desa tersebut akhirnya berangsur-angsur meningkat.

Desa Mareu kini sudah bertempat tinggal 9 KK (36 jiwa) yang menghuni 9 unit rumah. Para penduduk ini mencari penghidupan dengan bercocok tanam padi sawah dan ladang, kacang-kacangan dan nilam. Guna menjaga tanaman mereka dari gangguan babi hutan, dibangun pagar sepanjang 278 meter dengan tinggi 1,5 meter.

- Program KPU/USO
- Pembangunan Monitoring Sistem Frekuensi Radio Tahap VI

Memang, Mareu belum banyak berpenghuni seperti masa sebelum konflik (25 KK), tapi setidaknya desa tersebut kini sudah menampakkan kembali keberadaannya sebagai hunian manusia dengan telah bermukimnya 9 (sembilan) KK warga Mareu yang dulu mengungsi. Ketika malam tiba, kita dapat melihat

kerlip lampu minyak tanah menembus kegelapan desa, dari celah dinding kayu rumah. Dikarenakan belum adanya Aliran Listrik dari PT. PLN. Namun kemudian aliran listrik yang sebelumnya menjalar ke desa ini, kini telah dapat diterangi dari perangkat bantuan Desa Dering berupa SPS (Solar Panel Surya).

Kisah para Bikers di daerah Jawa Tengah dalam mengelola Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)



PLIK Banyubiru, Semarang



Susanto, *Bikers* – Mitra PLIK Gunungpati, Semarang

PLIK Gunungpati, PLIK Sidorejo, PLIK Banyubiru adalah sebagian dari beberapa PLIK yang dikelola oleh kalangan muda yang berasal dari kalangan bikers (anak-anak motor). Dasar pemilihan mitra ini karena di usia produktif mereka mempunyai kemampuan untuk mengelola bisnis, akan tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk itu. Selama ini sebagian dari mereka hanya menghabiskan waktu dan energi mereka untuk jalan-jalan/touring dengan motor mereka.

Melalui PLIK, mereka tidak hanya bisa menjadi produktif, tetapi mereka juga belajar bertanggung jawab, disiplin dan banyak hal lain yang lebih bermanfaat. Mereka juga bisa mendapatkan sarana untuk bersosialisasi, bahkan mendapatkan penghasilan tambahan dari komunitas melalui internet. Berkat PLIK mereka lebih fokus dan terarah dalam menjalani kehidupan mereka. Bukan tidak mungkin mereka akan menjadi pengusaha layanan telekomunikasi atau layanan internet yang lebih hebat di masa depan.



PLIK Sidorejo, Kab. Salatiga

Kisah peran M-PLIK di Bangka dalam menayangkan video conference sebagai strategi sosialisasi kepada masyarakat



Health Professional Education Quality (HPEQ) Project dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan MPLIK Bangka Tengah menayangkan siaran langsung konferensi akan melalui telemedia (*video conference*) yang menghubungkan beberapa center di tiap wilayah Indonesia dan dapat diakses melalui MPLIK oleh semua orang yang terkoneksi dengan internet melalui live streaming (hpeq.dikti.go.id/streaming). Acara yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 November 2012, mengusung tema “Mengangkat Budaya Akademik melalui Penggunaan TIK dalam rangka Mengintegrasikan Sistem Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan” dan memiliki misi untuk memberikan dukungan kebijakan Kemendikbud pada pendidikan tinggi kesehatan melalui optimalisasi TIK.

Wi-fi Kabupaten untuk mewujudkan internet gratis di Kabupaten Nabire



Sebagai wujud nyata pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mendukung meratanya pemenuhan kebutuhan informasi dan keterbukaan informasi publik di pelosok daerah diseluruh Kabupaten di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) melaksanakan program Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO). Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kab. Nabire yakni Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kab. Nabire, terdapat pelayanan dalam dua bentuk program yaitu MPLIK (Mobil Pelayanan Internet Kecamatan) dan Internet Wifi Kabupaten Jalin KPU/USO.

Internet Wifi Kabupaten di Kabupaten Nabire dipasang 3 titik lokasi internet wifi gratis. 3 titik lokasi tersebut antara lain :

- POP (Lokasi menara pemancar) Kantor Bupati Nabire;
- POP (Lokasi menara pemancar) SMAN 1 Nabire;
- POP (Lokasi menara pemancar) SMPN 5 Nabire.

Untuk mengakses layanan internet wifi Kabupaten ini secara gratis, pengguna cukup berada ditempat yang dapat menjangkau sinyal wifi melalui hotspot pada laptop, smartphone, Tab, atau perangkat yang mempunyai fitur wifi, pada ketiga lokasi diatas. Melakukan koneksi pada BPPPTI-JALIN KPU/USO, dan Login pada halaman login yang muncul.

- Program KPU/USO
- Pembangunan Monitoring Sistem Frekuensi Radio Tahap VI

Program yang sudah berjalan semenjak tahun 2012 ini dapat terus difungsikan dan didukung oleh Pemerintah Daerah Kab. Nabire. Sebab Kewajiban KPU/USO merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya pelayanan publik bagi setiap warga negara melalui proses percepatan peningkatan pemerataan fasilitas komunikasi informasi warga masyarakat yang tinggal di desa-desa khususnya desa terpencil.

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mendukung program ini bisa jadi merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat juga semakin memiliki kebutuhan akan pentingnya telekomunikasi dan informatika dalam mendukung pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya.

Pembangunan sarana/tugu berkode pos untuk wilayah perbatasan dan pulau terdepan Indonesia



Tugu Berkode Pos di Merauke, Bintang, Sanggau, dan Pulau Sebatik

Sesuai Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 188/KEP/M.KOMINFO/3/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Wilayah Penempatan dan Pembangunan Sarana/Tugu Berkode Pos untuk Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan Indonesia, bahwa penempatan dan Pembangunan Sarana/Tugu Berkode Pos untuk wilayah perbatasan sejumlah 110 lokasi yang terdiri dari 18 (delapan belas) lokasi di wilayah perbatasan dan 92 (sembilan puluh dua) di lokasi Pulau Terdepan, dan sekaligus untuk mendukung Kedaulatan Wilayah Yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memudahkan dalam meningkatkan Layanan Pos yang bertujuan dalam memudahkan mengidentifikasi wilayah dan sekaligus sebagai tanda batas wilayah administrasi suatu negara sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya persengketaan batas wilayah demi terpeliharannya keutuhan NKRI.

Pada tahun 2014, telah dilaksanakan pembangunan di 6 (enam) titik/lokasi Sarana/Tugu Berkode Pos di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan di Indonesia. Adapun titik/lokasi tersebut adalah Sarana/Tugu Berkode Pos di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan di Indonesia adalah Kab. Keerom, Kab. Sota, Kb. Sangihe, Kab. Nunukan, Kep. Riau, dan Morotai.

Tabel 5.1 Jumlah Pembangunan Tugu/Berkode Pos Tahun 2012-2014

Tahun	Realisasi	Realisasi Lokasi
2012	6	Kab. Sanggau, Kec. Sekayang; Kab. Sintang, Kec. Kutunggau Hulu; Kab. Bengkayang, Kec. Jagoi Babang; Kab. Sambas, Kec. Paloh; Kab. Belu, Kec. Tasifeto Timur; Kab. Timor Tengah Utara (TTU), Kec. Bikomi Nilulat.
2013	5	Kab. Kapuas Hulu, Kec. Badau; Kab. Sambas, Kec. Sajingan Besar; Kab. Nunukan, Kec. Sebatik Tengah; Kab. Malinau, Kec. Kayan Hulu; Kab. Bintang, Kec. Teluk Sebong.
2014	6	Kab. Keerom, Kab. Sota, Kb. Sangihe, Kab. Nunukan, Kep. Riau, dan Morotai

Penyelenggaraan Layanan Pos Universal



Layanan Pos Universal adalah Layanan Pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/ atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat yang lain di dunia. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, untuk menjamin kesinambungan Layanan Pos Universal tetap dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang telah ditugaskan oleh Pemerintah saat ini yaitu PT.Pos Indonesia sebagai penyelenggara Pos sampai jangka waktu paling lama lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Upaya pemerintah untuk menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Pos Universal dilakukan melalui pemberian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Oleh karena itu Penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah harus memperhatikan aspek kualitas, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Pada tahun 2014 jumlah alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan layanan Pos Universal yang diberikan pemerintah kepada pelaksanaan layanan Pos Universal sebesar Rp. 322.689.000.000 yang digunakan untuk membantu operasional 2.325 Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPC LPU). Perkembangan alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan Layanan Pos Universal dari jumlah KPC LPU sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagai berikut :

Tabel 5.2 Perbandingan Jumlah KPC LPU 2009-2014

Tahun	Nilai Anggaran (Rp.)	Jumlah KPCLU
2010	175.000.000.000	2.363
2011	257.000.000.000	2.278
2012	272.470.000.000	2.298
2013	209.170.000.000	2.320
2014	322.689.000.000	2.325

- Program KPU/USO
- Pembangunan Monitoring Sistem Frekuensi Radio Tahap VI

PEMBANGUNAN MONITORING SISTEM FREKUENSI RADIO TAHAP VI

Dalam pengelolaan monitoring Sistem Frekuensi Radio (SFR) secara optimal, monitoring SFR adalah suatu hal yang penting. Monitoring SFR merupakan mata sekaligus telinga yang melihat kondisi riil pemanfaatan SFR di lapangan. Informasi yang diperoleh dari monitoring SFR akan dijadikan input untuk pengambilan keputusan selanjutnya dalam tahapan-tahapan pengelolaan SFR.

Terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Spektrum yang ada, SPFR harus mampu terintegrasi dalam hal memperoleh informasi data pengguna frekuensi radio yang uptodate. Hal ini sangat bermanfaat untuk keperluan monitoring dan penertiban di lapangan serta pengelolaan hasil observasi, validasi dan pengukuran untuk keperluan analisa dan perbaikan data bagi kepentingan manajemen spektrum secara keseluruhan. Tujuan yang hendak dicapai melalui pembangunan sistem ini antara lain adalah :

- Meminimalisir jumlah gangguan penggunaan spektrum di 4 (empat) lokasi (UPT Banten, Merauke, Kendari dan Ternate).

- Meminimalisir pengguna frekuensi ilegal di 4 (empat) lokasi tersebut
- Menertibkan penggunaan frekuensi
- Meningkatkan PNBP
- Meningkatkan optimalisasi ketersediaan spektrum ke depan untuk manfaat pada sektor telekomunikasi (menyumbang deflasi dan efek berganda pada perekonomian nasional)
- Mengamankan frekuensi strategis antara lain untuk penggunaan layanan telekomunikasi bergerak dan untuk keperluan instansi pemerintah tertentu (pertahanan dan keamanan negara)

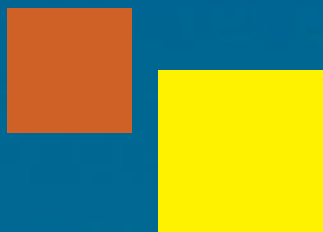
Output dari pembangunan sistem ini adalah pembangunan Stasiun Monitor Stasiun Bergerak Mon-DF H/V/UHF di 4 (empat) UPT (UPT Banten, Merauke, Kendari dan Ternate)

Realisasi Pembangunan SMFR Di Seluruh Indonesia Tahun 2009 - 2013

No	Tahap Pelaksanaan	Tahun	St. TETAP V-UHF		St. BERGERAK V-SHF		St. TETAP HF	
			Lokasi /UPT	Jumlah Sistem	Lokasi UPT	Jumlah Unit	Lokasi/UPT	Jumlah Site
1	Tahap I	2009	Surabaya	1	Surabaya (2 Mon & 2DF)	4		
	Tahap II	2010	Denpasar, Batam	2	Banda Aceh, Medan, Batam, Samarinda	4	Kupang, Tangerang	2
3	Tahap III	2011	Semarang, Tangerang, Pekanbaru	3	Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Gorontalo, Padang, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, Balikpapan	10	Medan, Samarinda	2
4	Tahap IV	2012	Jakarta, Bandung	2	Jambi, Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Mataram, Makassar, Manado, Kupang, Ambon, Jayapura	10		
5	Tahap V	2013	Medan, Makassar	2	Denpasar, Pekanbaru, Palu, Palangkaraya	4	Merauke	1
TOTAL				10		32		5

BAB 6 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

- Teledensitas Teleponi
- Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Penyelenggara Telekomunikasi



- Teledensitas Teleponi
- Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Penyelenggara Telekomunikasi

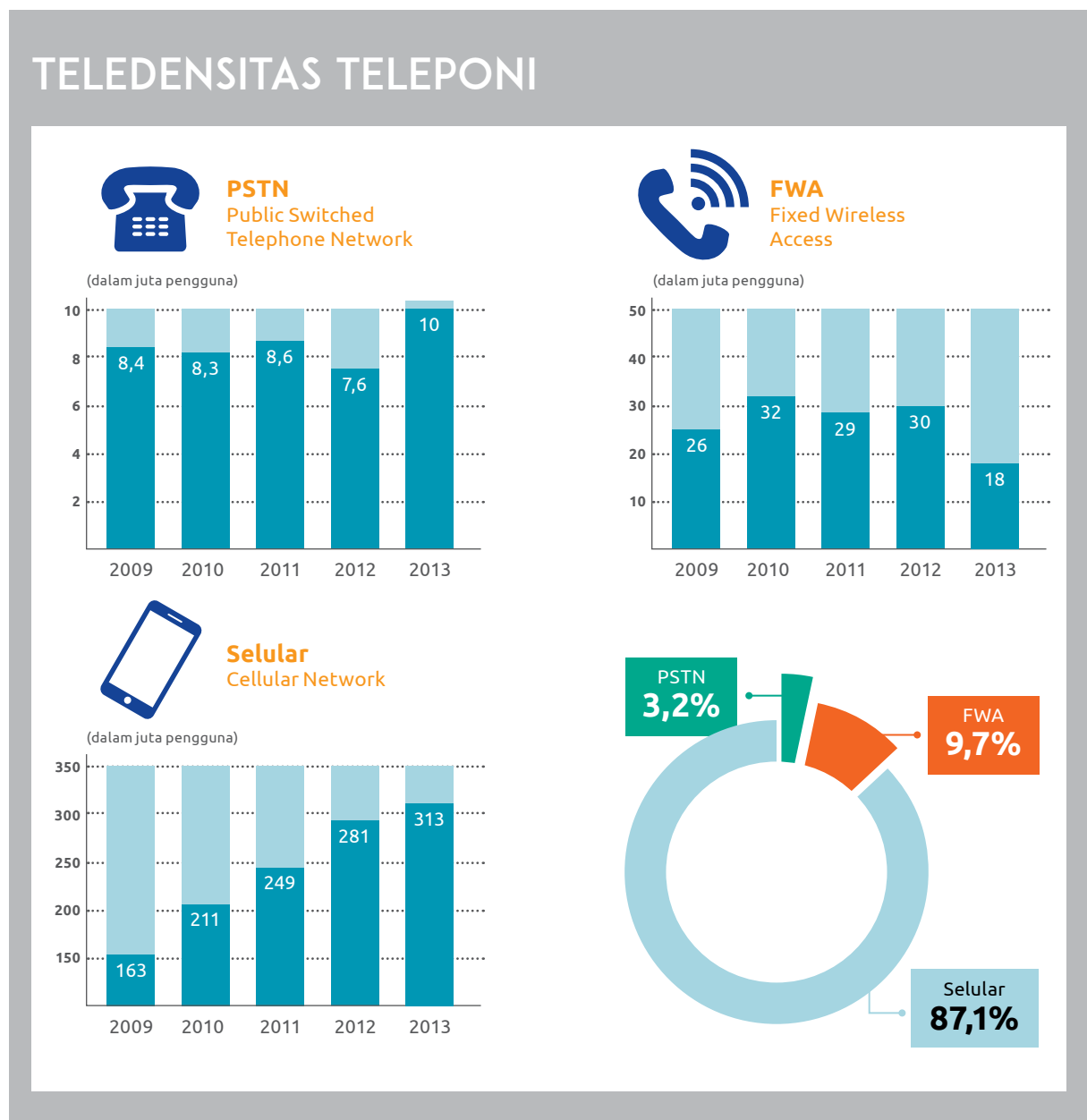
TELEDENSITAS TELEPONI

Pertumbuhan pelanggan telepon selular dan FWA mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, selular meningkat sebesar 31.263.249 atau 1,11% dan FWA meningkat sebesar 0,6%.

Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, pada tahun 2013, teledensitas telepon tetap kabel (PSTN) masih

berkisar di angka 10 juta, sedangkan untuk pelanggan selular sudah berkisar di angka 313 juta pelanggan.

Pada tahun 2013, pelanggan selular mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan FWA dan PSTN. Untuk melihat peningkatannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN) PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (*Operational Expenditure/Opex*) Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi mengatur ketentuan TKDN Capex minimal sebesar 30% dan untuk TKDN Opex minimal sebesar 50 % pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi seluler berbasis 3G.

Indikator ini dipilih dengan alasan bahwa capaian minimal TKDN dapat:

1. Mendorong penggunaan produk dalam negeri secara maksimal
2. Memacu industri telekomunikasi untuk selalu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta mutu produknya guna meraih kepercayaan konsumen dalam negeri.

3. Mendorong tumbuhnya produk-produk baru dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi.
4. Memperkuat basis produksi nasional agar mampu bersaing di pasar dalam negeri dan menjadi prioritas bagi belanja
5. Membangun kesadaran serta menciptakan pemahaman bahwa industri dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan pada tingkat tertentu.
6. Membangun kecintaan bangsa Indonesia terhadap produk dalam negeri.

Tabel 6.1 di bawah ini memperlihatkan prosentase pencapaian TKDN Capex dan Opex Tahun Buku 2013 hasil verifikasi Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika terhadap 5 penyelenggara seluler 3G, yakni Telkomsel, XL Axiata, Smart Telecom, H3I, dan Indosat.

Tabel 6.1 TKDN Capex dan Opex Penyelenggara Seluler Tahun Buku 2013

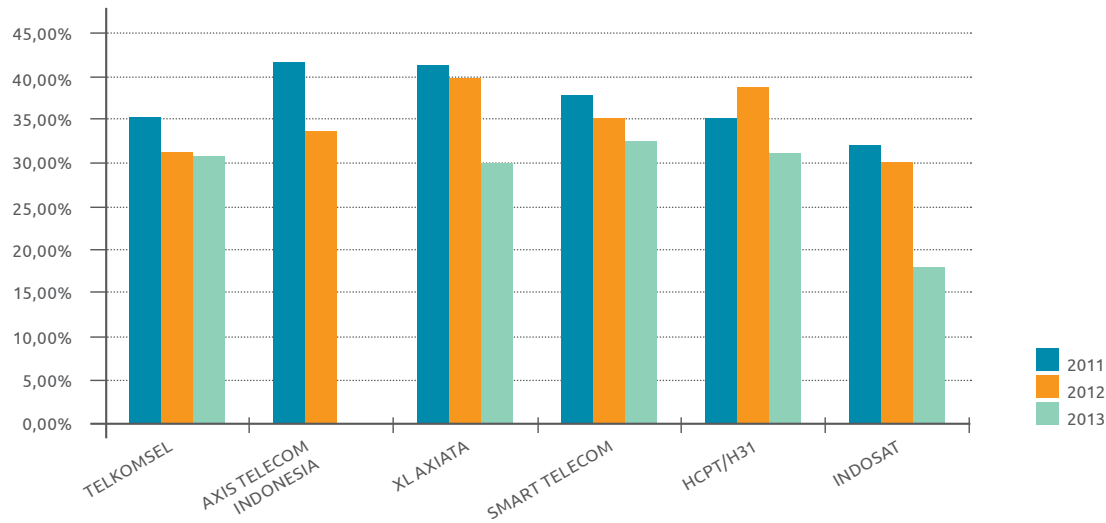
OPERATOR	CAPEX (Milyar Rp)	KDN CAPEX (Milyar Rp)	% TKDN	OPEX (Milyar Rp)	KDN OPEX (Milyar Rp)	% TKDN
Telkomsel	4.225.038	1.313.205	31,08	20.531.481	18.137.604	88,34
XL Axiata	565.385	171.380	30,31	3.136.433	2.229.087	71,07
Smart Telecom	69.395	22.825	32,89	876.775	782.170	89,21
H3I	2.979.437	935.553	31,40	6.356.608	4.585.644	72,14
Indosat	5.752.311	1.032.784	17,95	10.369.816	7.596.902	73,26

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa dari 10 parameter (2 parameter x 5 penyelenggara), 9 diantaranya memenuhi batas minimal. Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya Indosat yang tidak memenuhi batas

minimal TKDN Capex, dimana capaian TKDN Capexnya hanya sebesar 17,95%, jauh di bawah batas minimal 30%. Dengan demikian target sebesar 90% dapat dipenuhi.

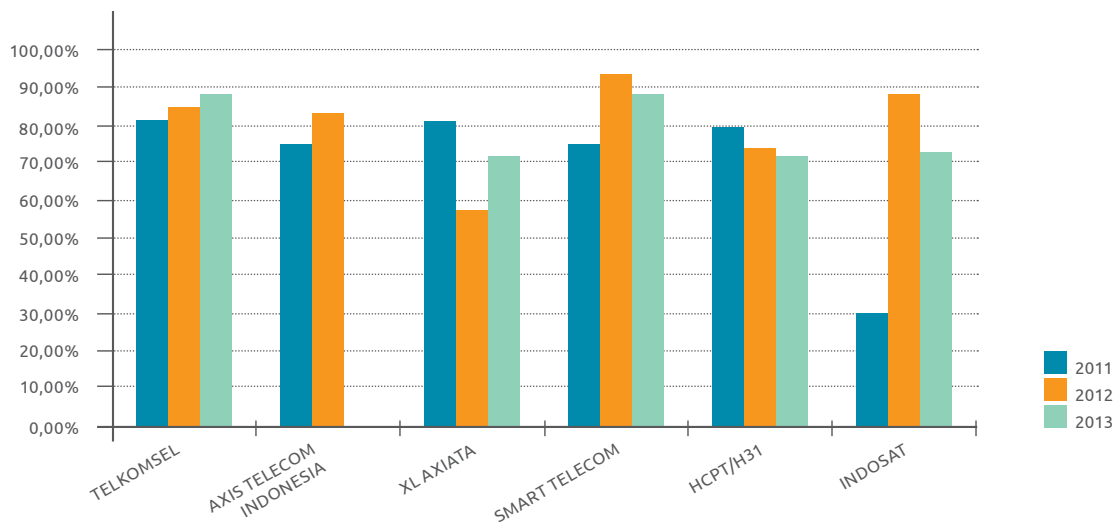
- Teledensitas Teleponi
- Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Penyelenggara Telekomunikasi

Gambar 6.2 TKDN Capex Tahun Buku 2011 - 2013



Gambar 6.2 menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2013, prosentase TKDN Capex seluruh operator mengalami tren penurunan sampai hampir mendekati ambang batas minimal sebesar 30%.

Gambar 6.3 TKDN Opex Tahun Buku 2011 - 2013



Gambar 6.3 menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2013, prosentase TKDN Opex seluruh operator mengalami fluktuasi, tetapi masih jauh di atas ambang batas minimal sebesar 50%, kecuali TKDN Opex Indosat Tahun Buku 2011 yang hanya mencapai 30%.

Sementara itu untuk TKDN perangkat telekomunikasi, Kemkominfo menerbitkan Peraturan Menteri nomor : 19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Berbasis Netral Teknologi yang di dalamnya memuat ketentuan bagi penyelenggara untuk memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) untuk *subscriber station* (SS) dan 40% (empat puluh persen) untuk *base station* (BS).

BAB 7

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)



- Pemingkatan E-Government (PeGi)
- Pengembangan Dan Implementasi Private Network Security (PNSBox)
- Pengembangan Dan Implementasi Government Service Bus (GSB)
- Sarana Dan Prasarana E-Learning Di Sekolah
- Relawan TIK
- Pusat Komunitas Kreatif
- Penerapan Aplikasi E-Business Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)
- Layanan Bidang e-Government
- Pembangunan Prototype Community Access Point (CAP) Dan Mobile Community Access Point (M-CAP)



PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT (PEGI)



Menkominfo dalam acara Penghargaan PeGI (kiri), Assesment PeGI wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua Barat di Makassar, 2014 (kanan)

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) adalah kegiatan tahunan Kemkominfo dalam rangka mengevaluasi penerapan *e-government* di Instansi Pemerintah tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota secara objektif dan komprehensif, mencakup aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan. Pemeringkatan e-Government

Indonesia (PeGI) ini dilakukan untuk: (1) menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah; (2) memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan objektif; (3) mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Tabel 7.1 Nilai Pemeringkatan *E-Government*

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kementerian	2.5	-	2.5	2.5	2.7	2.7
LPNK	-	-	-	-	2.7	2.7
Provinsi	-	-	2.4	2.2	2.6	2.4
Kabupaten/Kota	-	2.0	2.0	2.2	2.7	2.4
Rata-rata nilai PeGI	2.5	2.0	2.3	2.3	2.7	2.6

- Peningkatan E-Government (PeGi)
- Pengembangan Dan Implementasi Private Network Security (PNSBox)
- Pengembangan Dan Implementasi Government Service Bus (GSB)
- Sarana Dan Prasarana E-Learning Di Sekolah
- Relawan TIK
- Pusat Komunitas Kreatif
- Penerapan Aplikasi E-Business Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)
- Layanan Bidang e-Government
- Pembangunan Prototype Community Access Point (CAP) Dan Mobile Community Access Point (M-CAP)

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PRIVATE NETWORK SECURITY (PNSBOX)

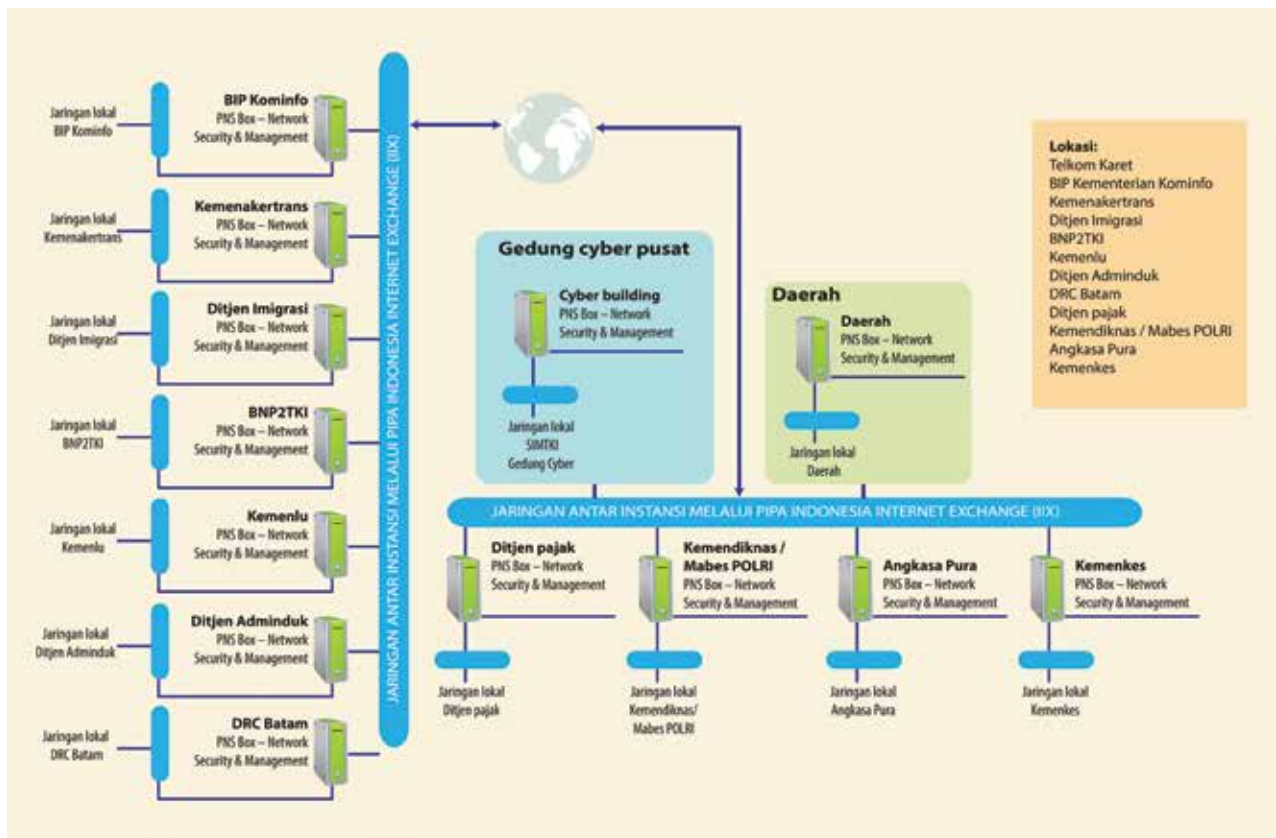
Fasilitas ini digunakan untuk membangun jaringan antar instansi pemerintah dengan Sistem Jaringan Private (Private Network Security) dengan menggunakan ISP lokal dan PNSBox sebagai router. PNS Box adalah sistem berbasis "Open-Source" dengan sistem operasi dasar FreeBSD PNS Box adalah solusi "All-in-a-Box" untuk jaringan berskala kecil dan besar,

yang memiliki fitur utama antara lain:

- Fungsi Pelayanan and Pengaturan Jaringan
- Fungsi Pengamanan Jaringan
- Fungsi Pelayanan Aplikasi dan Email

Fitur-fitur dalam PNS Box bersifat fleksibel yang dapat diaktif/non-aktifkan sesuai kebutuhan, skala jaringan, dan spesifikasi hardware.

Gambar 7.1 Implementasi pada jaringan e-Gov antar instansi dan daerah



PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI GOVERNMENT SERVICE BUS (GSB)

Sejak tahun 2011, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan aplikasi untuk Berbagi Pakai Data antar Sistem Elektronik dengan nama MANTRA singkatan dari Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data berbasis teknologi *Government Service Bus* (GSB). Aplikasi GSB-MANTRA merupakan orkestra layanan berbagi pakai data/informasi yang menerapkan metode interoperabilitas antar sistem elektronik sesuai amanat Inpres nomor 3 tahun 2003 dan dilandasi oleh Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 pasal 23. Pada tahun 2014 aplikasi MANTRA telah digunakan sebagai GSB untuk berbagi pakai data wajib pajak (dalam rangka memfasilitasi PMK No. 95/PMK.03/2013 dan No.132/PMK.03/2013) antara Sistem Elektronik

Ditjen Pajak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PDSI Kemkominfo dan DPKD Prov. Sumatera Barat.

Selama tahun 2014 pemanfaatan aplikasi MANTRA telah disosialisasikan dan dipasang melalui bimbingan teknis maupun pendampingan teknis di 9 (sembilan) instansi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Implementasi aplikasi MANTRA dapat difungsikan sebagai *Application Programming Interface* (API) Webservice dan GSB, dimana infrastruktur pengamanan jaringannya menggunakan PNS-Box. Adapun instansi-instansi yang mengimplementasikan GSB dan PNS Box dari tahun 2012 adalah :

Tabel 7.2 Jumlah instansi yang mengimplementasikan GSB

Tahun 2012 (19 Instansi)	Tahun 2013 (9 Instansi)	Tahun 2014 (9 Instansi)
- Ditjen Pajak	- BKN	- Kemsetneg
- SePP Kemenkominfo	- Kemenlu	- Pemkot Pekalongan
- Kemenpolhukam	- Kota Cimahi	- Pemkot Bontang
- Kementerian Kelautan dan Perikanan	- Kota Pekalongan	- Pemkab Cirebon
- Diskominfo Provinsi Jabar	- Kab. Belitung	- Pemkot Padang Panjang
- Dishubkominfo Kab. Demak	- Kab. Sleman	- Pemprov Lampung
- Diskominfo Lamongan	- Kab. Kulon Progo	- Pemprov Gorontalo
- Dishubkominfo Kab. Kudus	- Pemprov DIY	- Pemkab Rokan Hulu
- Dishubkominfo Kab. Surakarta	- Kota Pekanbaru	- Pemkab Maros
- Diskominfo Provinsi Jawa Timur		
- Diskominfo Kota Malang		
- Dishubkominfo Kab. Banyuasin, Sumsel		
- Diskominfo Kab. Padang Priaman		
- BNP2TKI		
- Kemenkes		
- Kemenlu		
- DPKAD Provinsi Sumbar		
- LKPP		
- Dishubkominfo Kab. Banyuwangi		

- Peningkatan E-Government (PeGi)
- Pengembangan Dan Implementasi Private Network Security (PNSBox)
- Pengembangan Dan Implementasi Government Service Bus (GSB)
- Sarana Dan Prasarana E-Learning Di Sekolah
- Relawan TIK

- Pusat Komunitas Kreatif
- Penerapan Aplikasi E-Business Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)
- Layanan Bidang e-Government
- Pembangunan Prototype Community Access Point (CAP) Dan Mobile Community Access Point (M-CAP)

SARANA DAN PRASARANA E-LEARNING DI SEKOLAH



E-Learning Yogyakarta merupakan upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Provinsi DIY dengan menyediakan infrastruktur 300 SD dan 200 SMP berupa laboratorium komputer, jaringan informasi antar sekolah, materi ajar berbasis TIK, perangkat lunak bagi pengembangan materi ajar dan peningkatan kapasitas guru-guru untuk memberikan pembelajaran berbasis TIK.

Ruang lingkup pekerjaan dari program ini adalah (1) Pengadaan peralatan IT/PC untuk 500 sekolah, (2) Pengembangan Sistem Internet Data Center (IDC), (3) Pengadaan materi ajar, dan (4) Pengadaan Jasa Konsultan.

Melalui kegiatan ini kualitas pendidikan serta pemerataan akses materi pendidikan di provinsi DIY dapat ditingkatkan dan digunakan sebagai model pemanfaatan TIK di sektor pendidikan di Indonesia.

Tabel 7.3 Jumlah Persebaran e-learning berdasarkan Kota dan Tahun

	SD	SMP	Total	Prosentase
Sleman	72	61	133	26.6%
Kulon Progo	38	25	63	12.6%
Yogya karta	47	30	77	15.4%
Bantul	78	50	128	25.6%
Gunungkidul	65	34	99	19.8%

RELAWAN TIK

Kegiatan Relawan TIK untuk mendukung program Internet Sehat dan Aman (INSAN). Pembentukan Relawan TIK untuk membangun jejaring sosial diantara pemuda, pelajar, mahasiswa dan masyarakat sebagai pengguna internet agar terbentengi dari pengaruh budaya global yang negatif. Organisasi Relawan TIK berdiri pada tanggal 4 Juli 2011 di Bogor dalam acara Forum Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, dan Kerjasama Komunitas TIK yang diikuti oleh peserta perwakilan TIK daerah, komunitas TIK, dan Kementerian Kominfo. Hingga saat ini, Relawan TIK telah terbentuk di 24 provinsi dan berjumlah 1.415 orang.

Para Relawan TIK tersebut telah berpartisipasi dalam pembentukan pangkalan Relawan TIK Daerah dan tempat penyelenggaraan Forum Komunikasi,

Koordinasi, Kolaborasi dan Kerjasama Komunitas TIK (FKST) tingkat Nasional. Pembentukan Relawan TIK juga telah merambah ke desa atas kerja sama dengan Gerakan Desa Membangun (GDM). Kegiatan Relawan TIK diantaranya adalah TIK masuk pesantren, Gaul IT Bareng Onno W Purbo (GALOW IT), bimtek *open source*, sosialisasi INSAN dan lain-lain.

Setiap tahun juga diselenggarakan Munas Relawan TIK yang dibarengi dengan kegiatan Festival TIK untuk rakyat berupa seminar nasional, workshop, pameran dan pagelaran seni yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh TIK, serta komunitas TIK dari seluruh Indonesia. Tahun 2014, Munas TIK dilaksanakan di Manado dengan tema "*si tou timou tu mou tou deng tik*".



Peserta yang ikut dalam festival TIK



Seminar bersama Onno W Purbo

PUSAT KOMUNITAS KREATIF

Pusat Komunitas Kreatif (Puskom Kreatif) merupakan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan, kreatifitas dan kemampuan komunitas kreatif di masyarakat setempat. Komunitas ini terdiri dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Fasilitas ini diharapkan dapat membantu percepatan transformasi dari bisnis

konvensional menjadi bisnis berbasis elektronik, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Sampai dengan tahun 2013 sudah dibangun 5 puskom kreatif di Lombok Utara, Lamongan, Palangkaraya, Pare-pare dan Payakumbuh. Tahun 2014 dibangun 2 Puskom kreatif yaitu di Temanggung dan Kutai Kartanegara.

Tabel 7.4 Lokasi Pusat Komunitas Kreatif

Tahun	Lokasi
2010	Lombok Utara, NTB
2011	Lamongan, Jawa Timur
2012	Palangkaraya, Kalimantan Tengah
2013	Payakumbuh, Sulawesi Barat dan Pare-Pare, Sulawesi Selatan
2014	Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Temanggung, Jawa Tengah

- Peningkatan E-Government (PeGi)
- Pengembangan Dan Implementasi Private Network Security (PNSBox)
- Pengembangan Dan Implementasi Government Service Bus (GSB)
- Sarana Dan Prasarana E-Learning Di Sekolah
- Relawan TIK
- Pusat Komunitas Kreatif
- Penerapan Aplikasi E-Business Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)
- Layanan Bidang e-Government
- Pembangunan Prototype Community Access Point (CAP) Dan Mobile Community Access Point (M-CAP)



Puskom Kreatif Kutai Kartanegara, 2014



Puskom Kreatif Temanggung, 2014

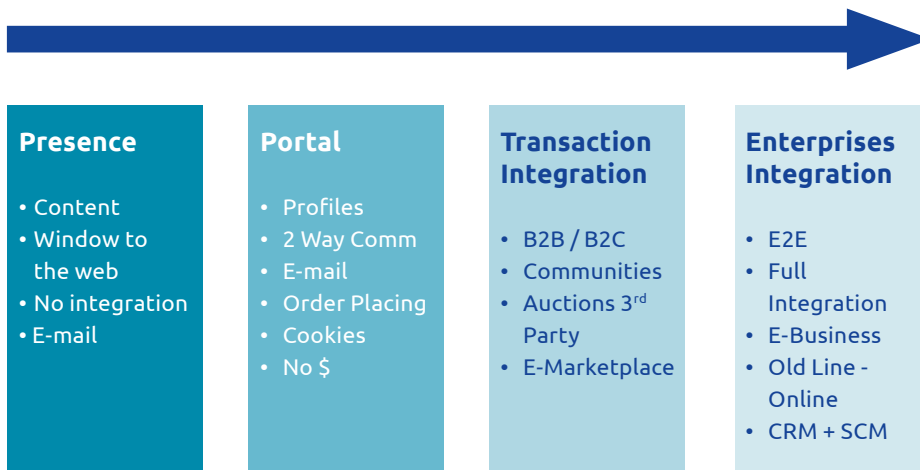
PENERAPAN APLIKASI E-BUSINESS PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

Pernyataan UKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa telah memunculkan sebuah konsekuensi bagi pemerintah agar mengupayakan bagaimana perdagangan di era pasar terbuka harus dapat digarap juga oleh para pelaku UKM, baik perdagangan di dunia nyata (*real market*) dan terlebih lagi perdagangan di dunia maya (*cyber market*) yang saat ini telah menjadi pasar yang sangat potensial dalam dunia perdagangan. Upaya nyata yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan bantuan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pelaku UKM di Indonesia untuk dapat berperan serta aktif

dalam perkembangan kemajuan perdagangan tersebut sehingga dapat mengkokohkan keberadaan mereka sebagai tulang punggung perekonomian bangsa sehingga pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi menerapkan aplikasi *e-business* kepada pelaku UKM untuk mendukung kemajuan usaha para pelaku UKM.

Terdapat 4 (empat) tahapan utama dalam model pengembangan *e-commerce* bagi UKM, seperti tertera pada gambar berikut :

Model Tahapan Pengembangan e-commerce bagi UKM (Rao, et.al 2003)



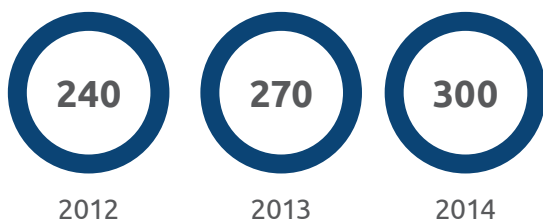


Bimtek Aplikasi e-Business di Kota Cirebon dan Kota Kudus

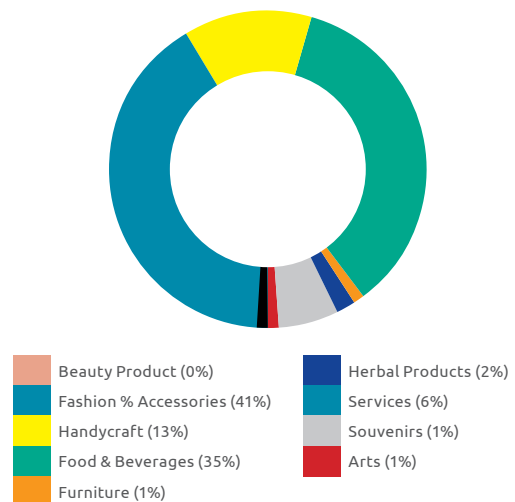
Merujuk pada model tahapan tersebut maka upaya awal pencapaian target penerapan aplikasi e-business di tingkat UKM, dengan menjalankan pencapaian model tahapan awal "Presence" melalui penyelenggaraan beberapa fasilitasi kegiatan dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis kepada para pelaku UKM dalam memulai masuk dalam lingkungan digital atau dunia e-commerce dengan target para pelaku UKM tersebut memiliki "Window to the Web" sesuai rekomendasi riset dari Rao, et.al (2003).

Target dari kegiatan ini diantaranya memberikan pelatihan / bimbingan teknis kepada pelaku UKM dalam memiliki akun surat elektronik atau email sebagai alat untuk berkomunikasi di dunia maya dalam konteks perdagangan elektronik dan pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada pelaku UKM untuk memiliki website satu arah yang ke depan ditujukan untuk memberikan informasi usaha kepada target konsumen melalui pemanfaatan Web Log atau blog sebagai sebuah alternatif marketing channel dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki oleh para pelaku UKM. Hingga tahun 2014, sejumlah 300 UKM sudah menerapkan aplikasi e-Business. Untuk mengetahui UKM yang sudah menerapkan aplikasi e-Business dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-business

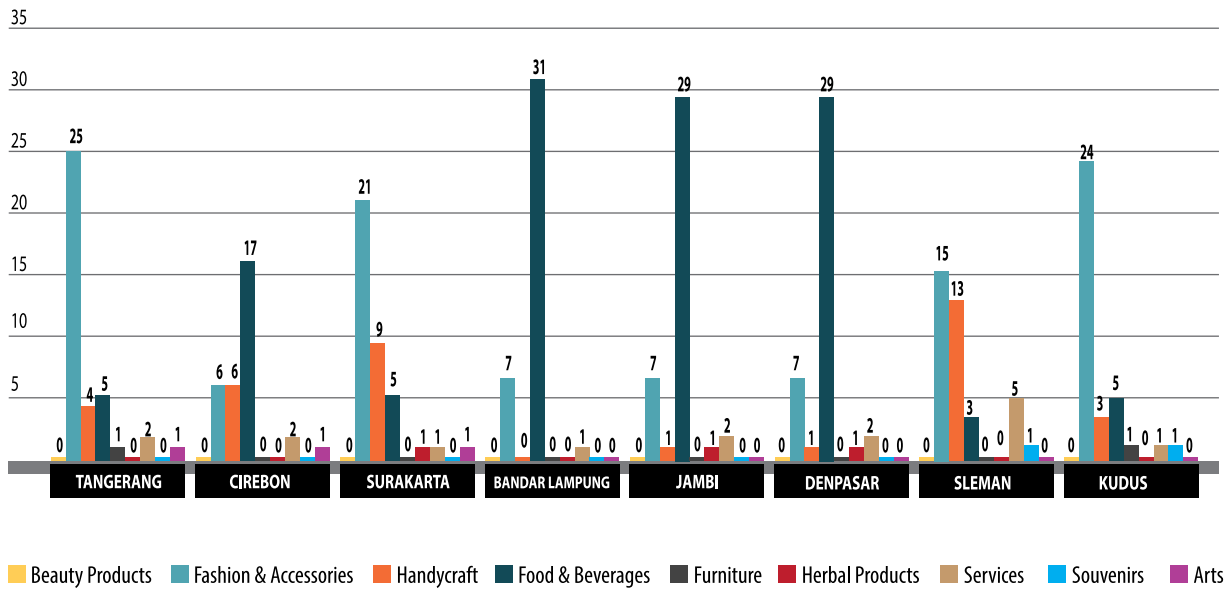


Data UKM yang menerapkan aplikasi e-business berdasar bidang usaha tahun 2014



- Peningkatan E-Government (PeGi)
- Pengembangan Dan Implementasi Private Network Security (PNSBox)
- Pengembangan Dan Implementasi Government Service Bus (GSB)
- Sarana Dan Prasarana E-Learning Di Sekolah
- Relawan TIK

- Pusat Komunitas Kreatif
- Penerapan Aplikasi E-Business Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)
- Layanan Bidang e-Government
- Pembangunan Prototype Community Access Point (CAP) Dan Mobile Community Access Point (M-CAP)



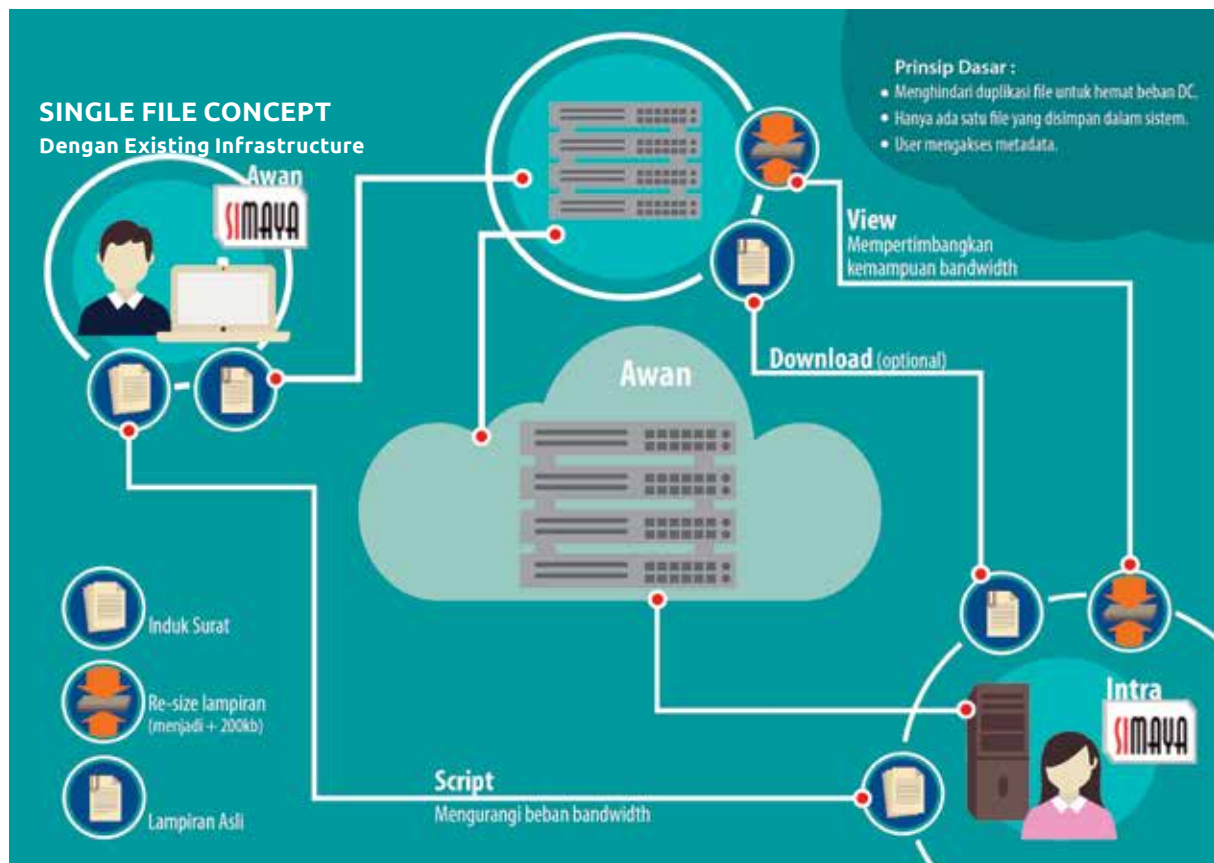
LAYANAN BIDANG E-GOVERNMENT

Administrasi perkantoran MAYA (siMAYA)

Aplikasi Perkantoran MAYA (siMAYA) merupakan digitalisasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Aplikasi ini telah disosialisasikan melalui bimbingan teknis di beberapa instansi pemerintahan baik pusat dan daerah di Indonesia antara lain di Pemkab Sukoharjo, Pemkab Bangka Tengah, Pemkab Ende, Pemkab Banyuwangi, Pemkot Tegal, Pemkab Pasaman, Direktorat

PII (Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo) dan Pemprov Jawa Tengah. Implementasi siMAYA sendiri dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode *cloud computing* dan metode *non cloud computing*. siMAYA menyediakan fitur adalah sebagai berikut:

- *Chatting* ala Facebook dan IRC seperti *chatroom*
- Sistem surat menyurat dan disposisi berhierarki
- Penyimpanan agenda pribadi, kantor dan bersama
- Pemesanan dan pencatatan fasilitas kantor
- Sistem share URL dan folder yang terintegrasi
- Buku alamat dan forum diskusi



- Pemeringkatan E-Government (PeGi)
- Pengembangan Dan Implementasi Private Network Security (PNSBox)
- Pengembangan Dan Implementasi Government Service Bus (GSB)
- Sarana Dan Prasarana E-Learning Di Sekolah
- Relawan TIK

- Pusat Komunitas Kreatif
- Penerapan Aplikasi E-Business Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)
- **Layanan Bidang e-Government**
- Pembangunan Prototype Community Access Point (CAP) Dan Mobile Community Access Point (M-CAP)

Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik (siCANTIK)

siCANTIK adalah Aplikasi Layanan Publik yang bersifat generik, sehingga dapat digunakan untuk berbagai bentuk layanan berdasarkan standar prosedur operasi yang ideal dengan akses yang mudah dilakukan dan persyaratan yang sederhana serta waktu penyelesaian yang cepat dengan biaya yang relatif murah. Aplikasi siCANTIK dikembangkan sebagai model aplikasi layanan perizinan terpadu yang dapat dimanfaatkan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Aplikasi ini bersifat generik sehingga dapat dikonfigurasi sesuai peraturan yang berlaku pada masing-masing instansi.

Fitur-fitur yang terdapat pada siCANTIK antara lain :

- Terdiri dari aplikasi website (untuk masyarakat) dan aplikasi *backoffice* (untuk pengelola perizinan) yang saling terintegrasi. Dapat diimplementasikan pada model PTSP dan PTSA.
- Pelayanan dapat didistribusikan hingga kecamatan.
- *Generic*, dapat di-*customize* (izin dapat ditambahkan dan di-setting oleh penyelenggara sesuai dengan PERDA yang berlaku.
- Pembatasan hak akses pengguna berdasarkan jenis perizinan maupun perannya
- Pimpinan Daerah/Instansi dapat *me-monitoring* perizinan yang telah dilayani

Gambar 7.3 Alur Perizinan siCantik



PNS MAIL

Selain siMaya, telah dikembangkan juga PNS Mail. PNS Mail merupakan email yang disediakan bagi PNS yang belum memiliki fasilitas email resmi kenegaraan. Untuk mendaftar dapat dilakukan melalui <http://www.pnsmail.go.id>. Layanan e-mail yang diperuntukkan bagi pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia dengan kuota mencapai 1GB.

Tabel 7.4 Jumlah instansi yang menggunakan PNS Mail

No	Bulan	2012	2013	2014
1	Januari	-	6	11.360
2	Februari	-	83	-
3	Maret	-	48	1
4	April	-	63	-
5	Mei	-	62	213
6	Juni	-	10.519	183
7	Juli	71	11.115	275
8	Agustus	23	4.447	
9	September	13	9.519	
10	Oktober	16	15.872	
11	November	20	8.963	
12	Desember	10	12.514	
		153	73.211	12.032
				85.396

PEMBANGUNAN PROTOTYPE COMMUNITY ACCESS POINT (CAP) DAN MOBILE COMMUNITY ACCESS POINT (M-CAP)

Community Access Point (CAP)

CAP adalah sebuah tempat dimana masyarakat dapat melakukan komunikasi, serta mengakses informasi melalui sarana telekomunikasi dan informasi. Kehadiran CAP telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. CAP juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kesempatan berusaha, kesempatan pendidikan dan kesehatan serta kesempatan untuk saling bekerjasama dengan orang lain, sehingga pada akhirnya diharapkan kualitas hidup mereka meningkat. Dengan keberhasilan program CAP dan semakin banyaknya permintaan

dari daerah. Kini CAP tidak dibangun secara massal namun lebih kepada prototipe CAP yang merupakan pengembangan dari model-model sebelumnya dan disesuaikan dengan penerima dan lokasi penempatan Prototipe CAP tersebut. Sejak tahun 2011 Prototipe CAP dibangun mengikuti sasaran wilayah pengguna antara lain prototipe CAP Pedesaan, CAP Perbatasan, dan CAP Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Tuna Netra). Prototipe CAP ini juga bertujuan untuk membantu program pengentasan kemiskinan, memperkecil kesenjangan digital dan mempercepat perwujudan Masyarakat berbasis Pengetahuan.

- Pemingkatan E-Government (PeGi)
- Pengembangan Dan Implementasi Private Network Security (PNSBox)
- Pengembangan Dan Implementasi Government Service Bus (GSB)
- Sarana Dan Prasarana E-Learning Di Sekolah
- Relawan TIK
- Pusat Komunitas Kreatif
- Penerapan Aplikasi E-Business Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)
- Layanan Bidang e-Government
- Pembangunan Prototype Community Access Point (CAP) Dan Mobile Community Access Point (M-CAP)

Mobile Community Access Point (M-CAP)



Guna memperluas layanan akses internet dan pemanfaatan TIK, khususnya dikawasan dan komunitas yang sulit mendapatkan akses internet, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan pemerintah daerah mengembangkan layanan *Mobile Community Access Point* (MCAP) yang merupakan pengembangan dari konsep CAP sejak tahun 2007.

Bila CAP bersifat statis, maka M-CAP bersifat bergerak untuk tujuan promosi, komunikasi dan pembelajaran dengan memanfaatkan TIK, sehingga menjadi

semacam warnet keliling tanpa dipungut biaya. Bantuan MCAP ke pemerintah daerah juga dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen bersama dalam menanggulangi kesenjangan digital dan memberikan akses untuk aktifitas edukatif dan ekonomis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, serta untuk menyebarkan dan mengimplementasikan piranti lunak berbasis *open source*.

Adapun jenis dan lokasi penempatan Prototype CAP/ M-CAP tahun 2011 - 2014 adalah sebagai berikut:

Gambar 7.4 Peta Persebaran M-CAP



Untuk memberdayakan CAP yang diberikan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan CAP, maka pada tahun 2013 dilaksanakan Festival Desa TIK (DesTIKa). Festival ini khusus untuk masyarakat perdesaan dan menggerakkan komunitas-komunitas desa dalam kegiatan

pembangunan dengan memberdayakan potensi desa melalui pemanfaatan TIK secara sehat, aman, cerdas, kreatif dan produktif melalui berbagai workshop, FGD dan peluncuran aplikasi Mitra Desa yang merupakan hasil kerjasama Direktorat Pemberdayaan Informatika dengan Jaringan Gerakan Desa Membangun (GDM).

BAB 8

KEAMANAN INFORMASI DAN JARINGAN INTERNET NASIONAL

- Peningkatan Indeks Keamanan Informasi
- Keamanan Jaringan Internet



- Peningkatan Indeks Keamanan Informasi
- Keamanan Jaringan Internet

PEMERINGKATAN INDEKS KEAMANAN INFORMASI

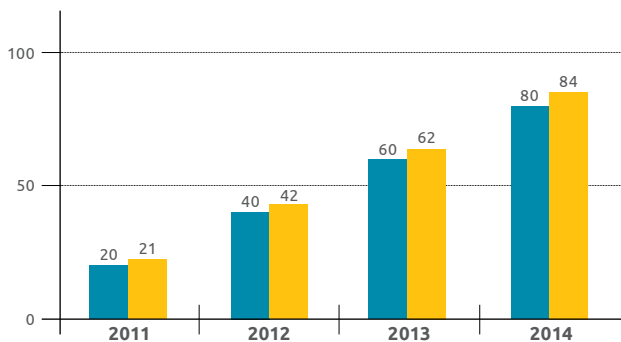
Kegiatan Peningkatan Keamanan Informasi dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi terhadap hasil pengisian Aplikasi Indeks KAMI. Peningkatan ini merupakan tahap awal kajian penerapan tata kelola keamanan informasi di instansi pemerintah. Hasil peningkatan memberikan masukan bagi instansi pemerintah yang bersangkutan tentang kekuatan dan kelemahan aspek-aspek pengamanan informasi di instansinya serta langkah-langkah peningkatan yang diperlukan untuk menguatkan profil keamanan informasi.

Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga

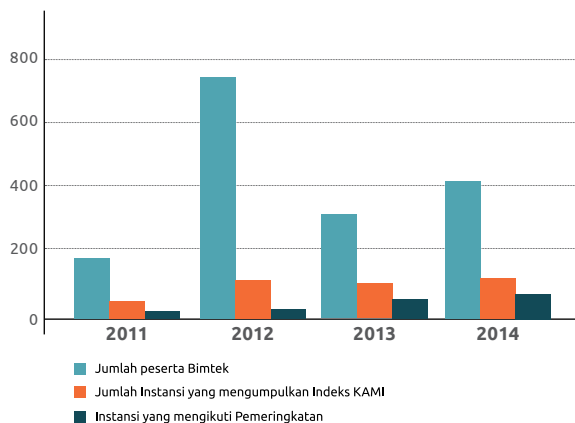
memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009. Hasil evaluasi indeks KAMI menggambarkan tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 dan peta area tata kelola keamanan sistem informasi di instansi pemerintah. Penilaian dalam Indeks KAMI dilakukan dengan cakupan keseluruhan persyaratan pengamanan yang tercantum dalam standar ISO/IEC 27001:2009, yang disusun kembali ke dalam beberapa area yaitu: tata kelola keamanan informasi; pengelolaan risiko keamanan informasi; kerangka kerja keamanan informasi; pengelolaan aset informasi; teknologi keamanan informasi; dan peran TIK.



Jumlah Instansi yang mengikuti peningkatan Indeks KAMI tahun 2011-2014



Indeks KAMI tahun 2011-2014



KEAMANAN JARINGAN INTERNET

Berawal dari maraknya kasus dan pengaduan dari berbagai negara terhadap kasus carding di Indonesia sekitar tahun 2000, kasus *web deface* pemilu tahun 2004 serta tuntutan dari APEC serta ITU, maka pemerintah dan lembaga-lembaga terkait menyepakati untuk bersama-sama membangun ekosistem internet yang sehat di Indonesia. Maka pada tahun 2007 dengan ditetapkannya Permen Kominfo No. 26 Tahun 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet, dibentuklah Id-SIRTII (*Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure*).

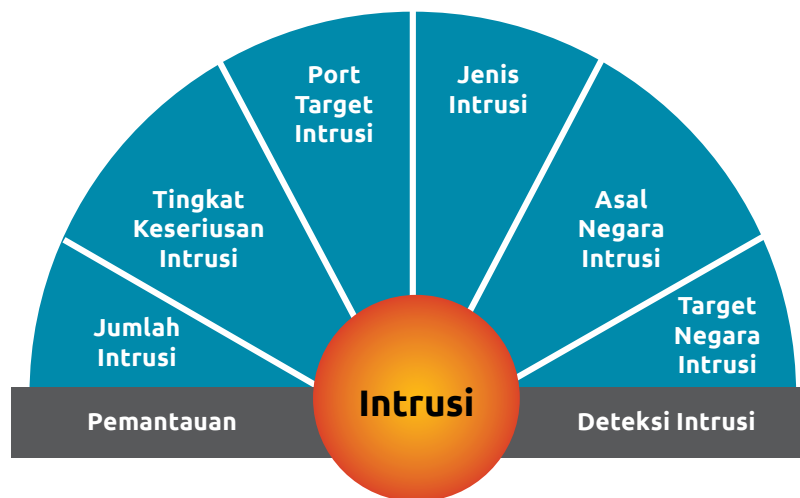
Tugas utama dari Id-SIRTII ini yaitu melaksanakan Pemantauan dan deteksi dini insiden jaringan internet

kemudian melakukan penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan semester, Sosialisasi dan FGD *awareness* keamanan jaringan internet, Pelatihan/ workshop keamanan jaringan internet, keikutsertaan di forum keamanan internet dan pembuatan MoU antar CERT

Pemantauan Trafik dan Deteksi Intrusi

Sistem pemantauan dan deteksi Id-SIRTII mencatat serangan berdasarkan anomali-anomali yang terdeteksi. Anomali tersebut berpotensi sebagai ancaman dan gangguan terhadap infrastruktur internet di Indonesia.

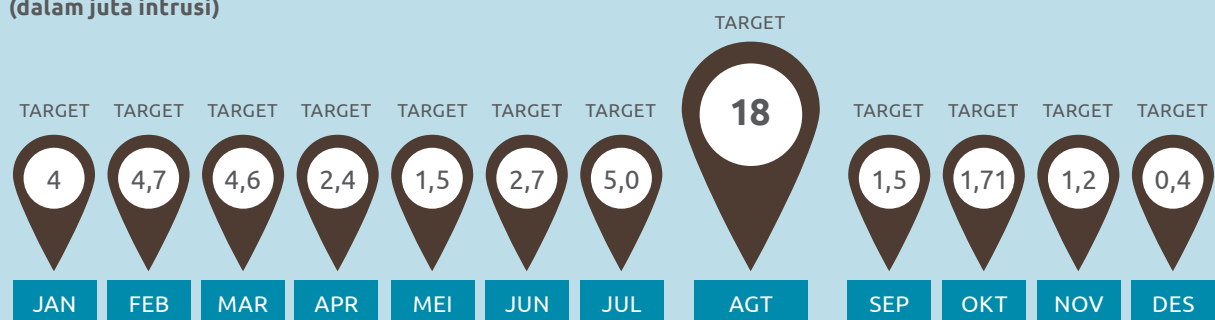
Berikut adalah hasil pelaksanaan tugas Id-SIRTII selama tahun 2014:



Dalam kurun waktu Januari – Pertengahan Desember 2014, total data serangan yang tercatat oleh sistem pemantauan mencapai 48.4 juta (data diperoleh dari

3 sensor yang dimiliki Id-SIRTII). Serangan tertinggi tercatat pada bulan Agustus dengan jumlah 18 juta serangan.

Total Jumlah Intusi Trafik (dalam juta intrusi)

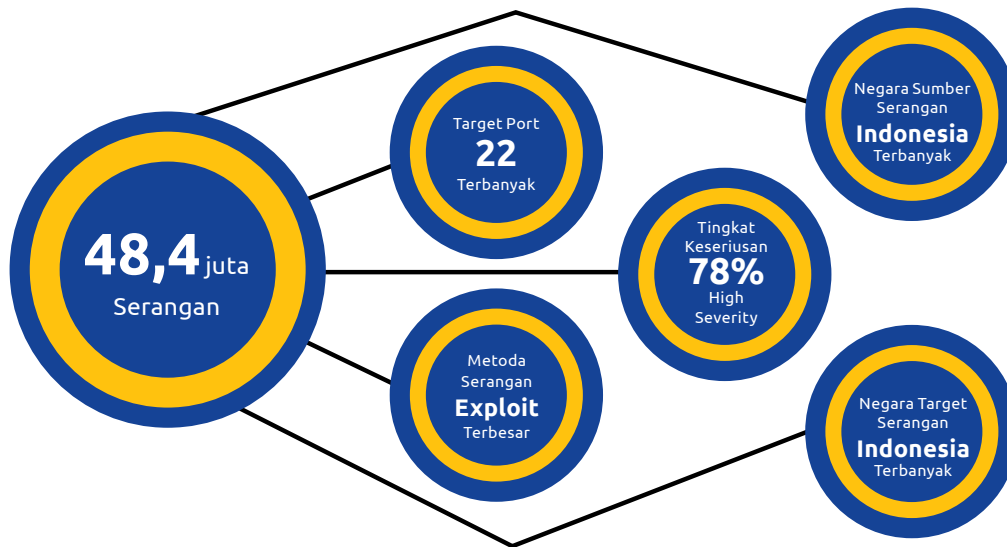


- Peningkatan Indeks Keamanan Informasi
- Keamanan Jaringan Internet

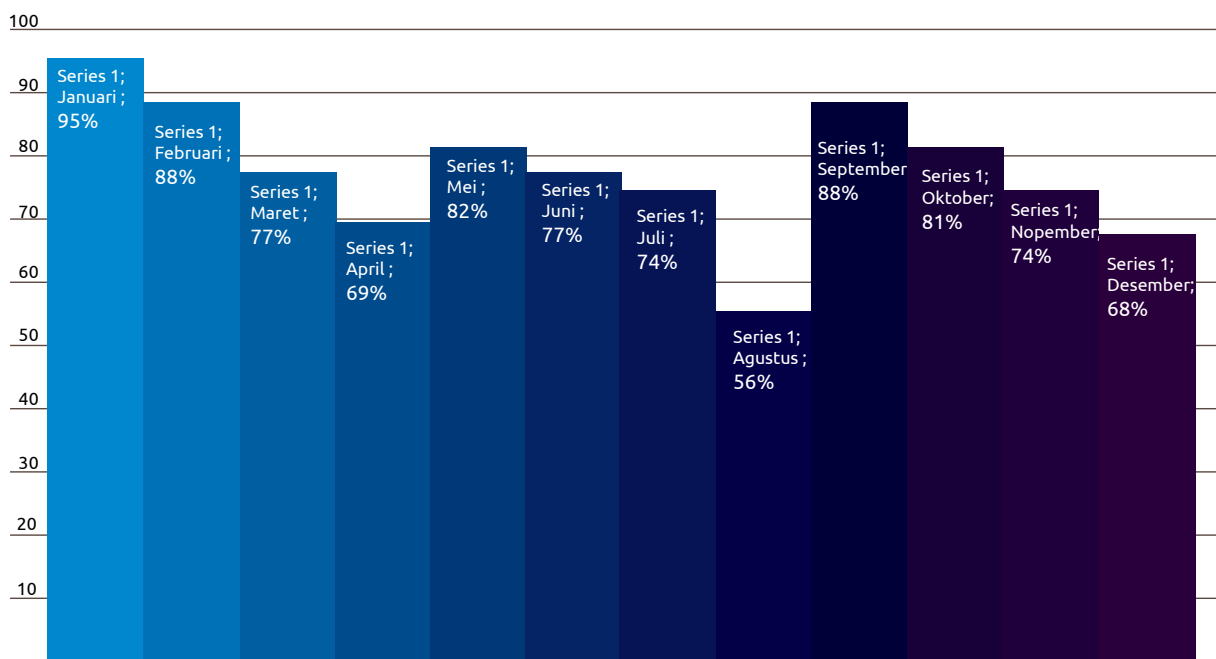
Tingkat Keseriusan Intrusi

Tingkat keseriusan intrusi adalah klasifikasi intrusi berdasarkan pada ancaman yang akan terjadi. Berdasarkan tingkat keseriusannya, intrusi dapat dikelompokkan kedalam *High* (Sangat Serius), *Medium* (Biasa), dan *Low* (Tidak Serius). Dalam rentang waktu

Januari – pertengahan Desember 2014, memiliki rata-rata tingkat keseriusan 78% (High). Tingkat keseriusan paling tinggi tercatat pada bulan Januari dengan tingkat keseriusan 95%.



Gambar 8.2 Grafik Tingkat Keseriusan (High) Dalam Rentan Waktu Januari – Desember 2014



Negara Sumber Intrusi

Data berikut adalah persentase negara yang menjadi sumber dari sebuah serangan. Dalam kurun waktu Januari – Desember 2014, negara yang menjadi sumber serangan terbesar yaitu Indonesia dengan menempati persentase terbesar dalam setiap bulannya, diikuti dengan Cina dan USA pada urutan berikutnya.

Tabel 8.2 Jumlah Negara Sumber Intrusi

Negara	%	Negara	%	Negara	%
Januari		Februari		Maret	
ID	93%	ID	45%	ID	45%
CN	3%	CN	2%	CN	2%
US	1%	US	1%	US	2%
April		Mei		Juni	
ID	78%	ID	58%	ID	63%
CN	9%	CN	18%	CN	18%
US	4%	US	5%	US	5%
Juli		Agustus		September	
ID	54%	ID	67%	ID	95%
CN	15%	CN	9%	US	3%
PK	6%	US	7%	NL	1%
Oktober		November		Desember	
ID	96%	ID	98%	ID	88%
US	2%	US	2%	US	8%
NL	1%	DE	0	NL	1%

Negara Tujuan Intrusi

Data berikut adalah persentase negara yang menjadi target dari sebuah serangan. Dalam kurun waktu Januari – Desember 2014, negara yang menjadi sumber serangan terbesar yaitu Indonesia dengan menempati persentase terbesar dalam 6 bulan, diikuti oleh USA dengan 3 bulan.

Tabel 8.3 Jumlah Negara Tujuan Intrusi

Negara	%	Negara	%	Negara	%
Januari		Februari		Maret	
US	32%	JP	31%	ID	27%
JP	23%	ID	16%	US	19%
FR	9%	US	13%	SE	13%
April		Mei		Juni	
ID	39%	ID	43%	ID	44%
US	17%	US	13%	US	14%
DE	16%	DE	4%	IN	5%
Juli		Agustus		September	
ID	47%	ID	36%	US	27%
US	16%	US	24%	CN	8%
KR	5%	FR	4%	MY	7%
Oktober		November		Desember	
CN	23%	US	18%		
JP	13%	JP	12%		
US	9%	CN	11%		

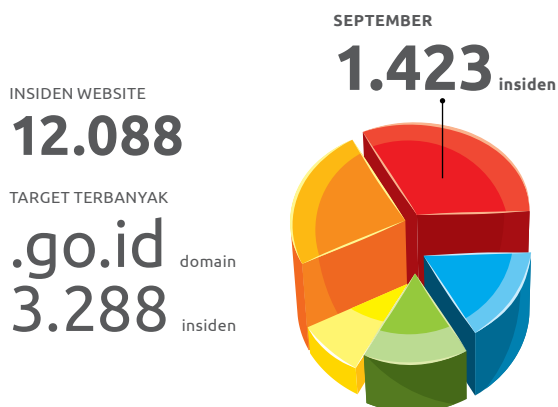
- Peningkatan Indeks Keamanan Informasi
- Keamanan Jaringan Internet

PEMANTAUAN INSIDEN

Insiden Website

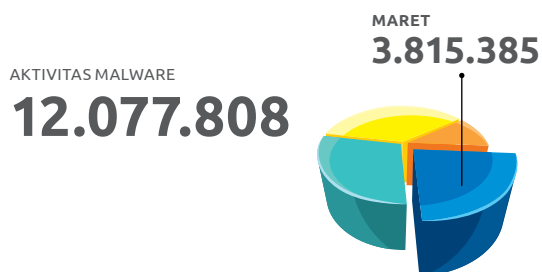
Insiden WEBSITE (Defacement) pada tahun 2014 (Januari – November 2014) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan total defacement 12.088 insiden.

Serangan target website dengan peringkat terbanyak yaitu website pemerintah (domain .go.id) dengan total 3.288 insiden. Insiden website tertinggi terjadi pada bulan September 2014 dengan jumlah 1.423 insiden.



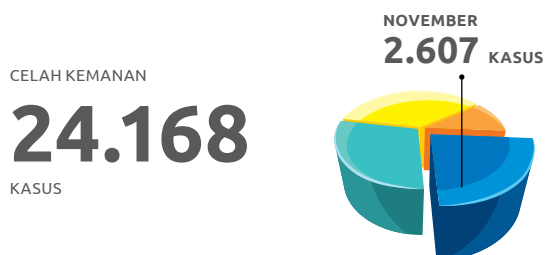
Aktifitas Malware

Aktifitas malware pada tahun 2014 dari bulan Januari – November 2014 mencapai 12.007.808. Jumlah aktifitas tertinggi terjadi pada bulan Maret 2014 dengan jumlah 3.815.385 kejadian.



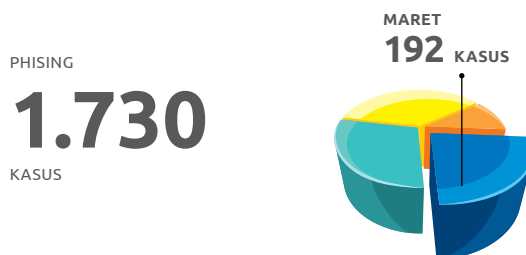
Informasi Celah Keamanan

Informasi celah keamanan dalam kurun waktu Januari sampai November 2014 sebanyak 24.168 kasus. Adapun kasus tertinggi celah keamanan terjadi di bulan November sebanyak 2.607 kasus.



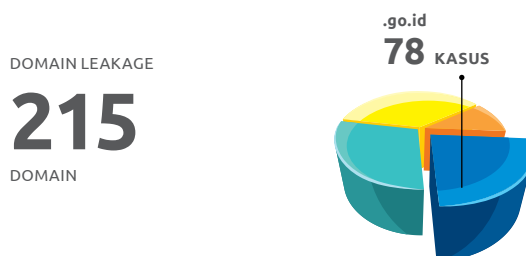
Phising

Dalam kurun waktu Januari hingga November 2014, jumlah Phising yang didapat sebanyak 1.730 kasus yang mempergunakan web sebagai medianya. Adapun data terbanyak yang didapat yaitu pada bulan Maret sebanyak 192 buah.



Domain Leakage

Kebocoran data pada domain web yang tercatat sejak Januari hingga November 2014 sebanyak 215 domain .id. Adapun jumlah domain web yang paling banyak mengalami kebocoran data adalah domain .go.id sebanyak 78 kejadian.



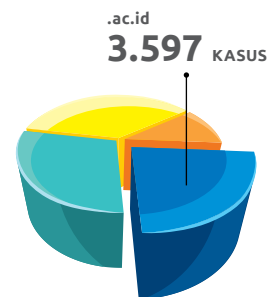
Record Leakage

Record leakage adalah banyaknya kebocoran data dari setiap domain leakage. Dalam kurun waktu Januari hingga November 2014 didapatkan sebanyak 5.970 buah dengan kebocoran data tertinggi pada domain ac.id sebanyak 3.597 kasus.

RECORD LEAKAGE

5.970

KASUS



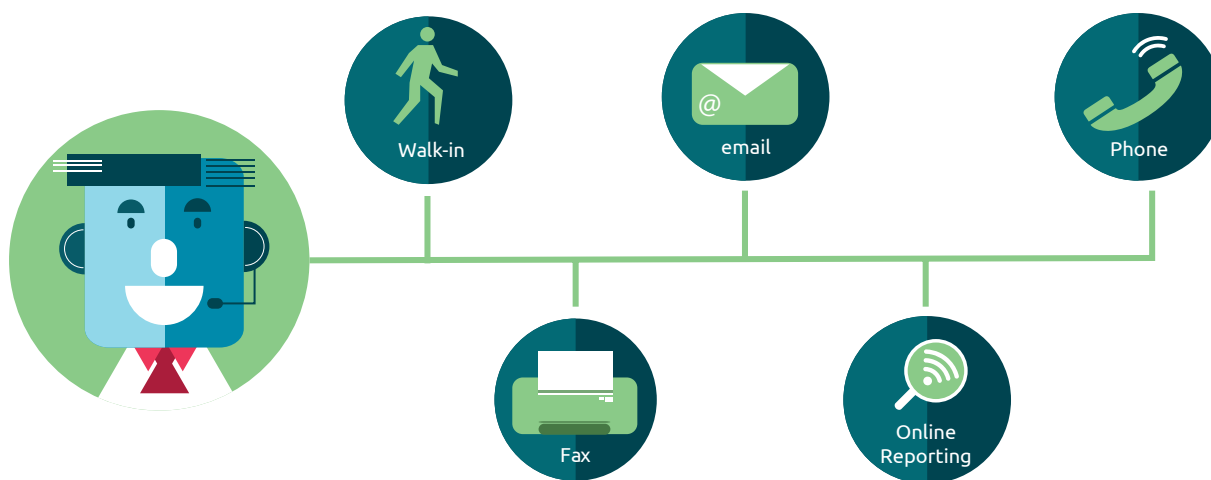
LAYANAN PUBLIK

Penerimaan Laporan Insiden

Id-SIRTII membuka layanan pengaduan insiden kepada publik melalui beberapa jalur. Layanan pengaduan ini tidak hanya menerima laporan insiden yang berasal dari dalam negeri, tapi juga dapat digunakan oleh pihak luar negeri yang melaporkan adanya

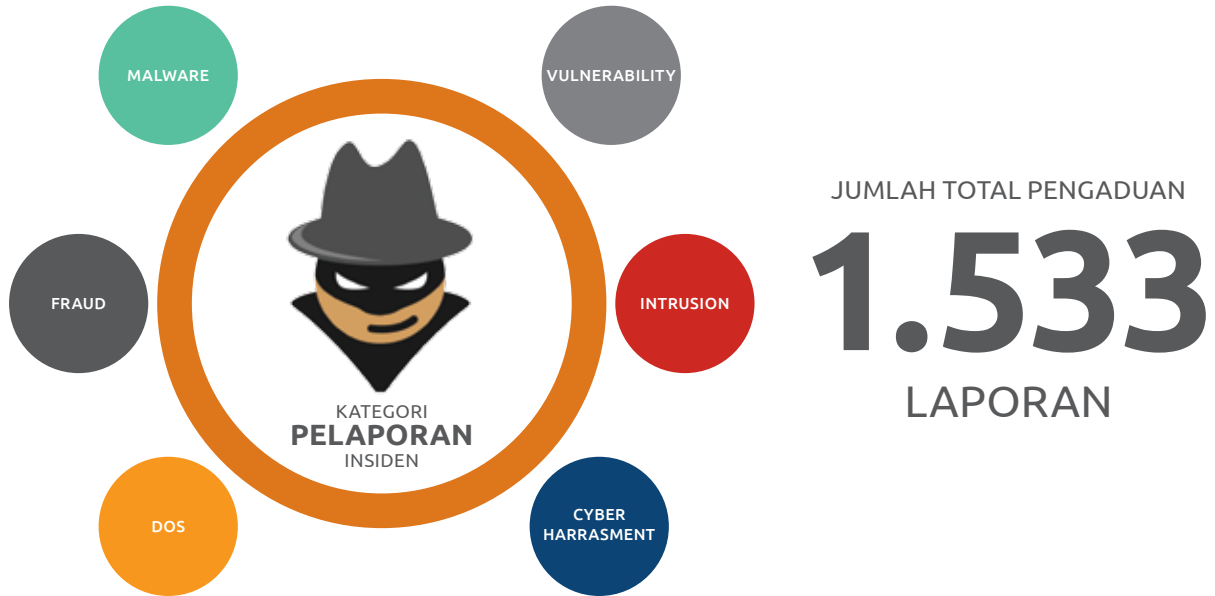
insiden yang melibatkan negara lain.

Berikut dibawah ini adalah bebrapa jalur yang dapat digunakan untuk melaporkan insiden yang terjadi di internet:



- Peningkatan Indeks Keamanan Informasi
- Keamanan Jaringan Internet

Adapun laporan yang diterima oleh Id-SIRTII akan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Berikut dibawah ini adalah kategori pelaporan insiden:



Dalam rentang waktu bulan Januari hingga pertengahan Desember 2014, total pengaduan mencapai 1.533 laporan.

Kategori pengaduan terbesar adalah laporan malware dengan presentase sebesar 69%, kemudain dilanjutkan dengan fraud dengan 16%, vulnerability 8%, DOS 1%, dan harassment 0%.



BAB 9

PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- Pembangunan Dan Penguatan Media Center
- Bantuan Mobil Dan Motor Pusat Teknologi Informasi Komunitas



- Pembangunan Dan Penguatan Media Center
- Bantuan Mobil Dan Motor Pusat Teknologi Informasi Komunitas

PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN MEDIA CENTER

Dalam rangka merajut kembali komunikasi yang terputus antara Pusat dan Daerah, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat program Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Layanan Informasi Publik di daerah, yakni Pembangunan dan Penguatan Media Center. Media Center tersebut dimaksudkan sebagai satuan gugus tugas yang berada dan melekat secara operasional pada lembaga informasi yang ada di Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pembangunan dan penguatan media center di wilayah terluar, terdepan, dan pasca konflik merupakan salah satu upaya dalam penyebaran, pemerataan, dan penyerapan informasi publik ke masyarakat yang minim akses informasi. Setiap tahunnya Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang dipandang layak untuk mengelola dan memanfaatkan informasi publik. Pada tahun 2014, realisasi Penguatan *media center* dilaksanakan 10 lokasi dikarenakan hasil *monitoring*

dan evaluasi hanya menghasilkan 10 lokasi yang memenuhi kriteria calon penerima penguatan media center. Akhirnya diputuskan 5 alokasi dipindahkan ke pembangunan media center (menjadi 25 lokasi dari target 20 lokasi) dalam kaitannya untuk mempercepat penetrasi penyebaran media center daerah. Sementara realisasi M-Pustika tidak mencapai target terkait re-alokasi anggaran tahun 2014. Jumlah Media Center dari awal program tahun 2007(program Badan Informasi Publik) hingga tahun 2014 berjumlah 196 lokasi yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten dan kota dengan kriteria daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan / pascakonflik. Adapun target kelompok yang menerima bantuan *media center* ini adalah:

- Dinas Kominfo
- Dishub Kominfo, Disbudpar Kominfo
- Biro Kominfo
- Bagian Humas Sekretariat Daerah
- Kelompok masyarakat (Muslimat NU, PMI, Pramuka, Pondok pesantren dan organisasi keagamaan lainnya)

Tabel 9.1 Penerima Pembangunan Media Center

Penerima Pembangunan Media Center

- | | |
|--|---|
| 1. Dishubkominfo Kab.Dharmasraya Prov Sumbar | 14. Dishubkominfo Kab.Mamasa |
| 2. Dishubkominfo Kota Tual Prov Maluku | 15. Dishubkominfo Kab.Takalar |
| 3. Dishubkominfo Kab.Maluku Tengah | 16. Dishubkominfo Kab.Talaut |
| 4. Dishubkominfo Kab. Asmat Prov Papua | 17. Dishubkominfo Kab.Jembrana |
| 5. Dishubkominfo Kab.Donggala Prov.Sulteng | 18. Dishubkominfo Kab.Minahasa Utara |
| 6. Dishubkominfo Kota Sitoli Prov Sumut | 19. Dinas Kominfo Kota Kupang |
| 7. Dishubkominfo Kab.Mentawai | 20. Dishubkominfo Kab.Batang |
| 8. Dishubkominfo Kab.Supiori | 21. Bagian Humas Sekda Kab.Garut |
| 9. Dishubkominfo Kab.Siak | 22. Dishubkominfo Kab.Pesisir Barat Lampung |
| 10. Dishubkominfo Kab.Bengkulu Utara | 23. Dishubkominfo Kab.Bulungan Prov Kaltim |
| 11. Dishubkominfo Kab.Buru | 24. Majelis Ulama Indonesia |
| 12. Dishubkominfo Kab.Lampung Utara | 25. Lembaga Kajian Islam Al-Karim Kab.Agam |
| 13. Bagian Humas Sekda Kab.Gresik | |

Tabel 9.2 Penerima Penguatan Media Center

Penerima Penguatan Media Center

1. Bagian Humas Setda Kab.Banjar Prov.Kalsel
2. Dishubkominfo Kab.Bengkulu Selatan
3. Bagian Humas Setda Kota Balikpapan Prov Kaltim
4. Dinas Kominfo Kota Manado
5. Dinas Kominfo Kota Banda Aceh
6. Dinas Kominfo Kota Tarakan
7. Bagian Humas Setda Kab.Semarang
8. Badan Kominfo Kota Batam
9. Dishubkominfo Kab.Maluku Tenggara
10. Bag Humas Setda Kab.Tana Toraja
11. Dishubkominfo Kab.Bulungan Prov Kaltim
12. Majelis Ulama Indonesia
13. Lembaga Kajian Islam Al-Karim Kab.Agam

Gambar 9.1:
Contoh Operasional Media Center Bagian Humas dan Protokol Pemkot Pematang Siantar



Dukungan Media Center Kemenkominfo pada SAIL RAJA AMPAT 2014



- Pembangunan Dan Penguatan Media Center
- Bantuan Mobil Dan Motor Pusat Teknologi Informasi Komunitas

Dukungan dan fasilitas yang diberikan pada acara Sail Raja Ampat Tahun 2014 meliputi penyediaan Media Center untuk memberikan pelayanan kepada wartawan dan media, turis dan masyarakat Raja Ampat dalam bentuk informasi umum, fasilitas perangkat komputer/laptop, wifi gratis, telepon gratis, *press release* dan jumpa pers;

Media Center (MC) Sail Raja Ampat 2014 diselenggarakan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pihak yang telah mengelola gedung dan fasilitas pusat informasi pariwisata (*Tourism Information Center*) di kompleks Akropora, Kabupaten Raja Ampat. Ditjen IKP diminta untuk mengoptimalkan gedung tersebut menjadi MC Sail Raja Ampat 2014 yang letaknya sangat dekat dengan lokasi acara puncak.

Gedung MC Sail Raja Ampat 2014 terdiri dari ruang kerja wartawan dengan daya tampung hingga 25 orang yang dilengkapi dengan 20 laptop bebas pakai. Selain itu juga tersedia sambungan telepon (SLI/SLJJ), faksimili dan wifi gratis dari PT. TELKOM sebesar 10Mbps yang dapat menampung hingga 100 pengguna. Di pelataran Pantai WTC, dihadirkan 2 (dua) unit Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Raja Ampat untuk wilayah Waisai dan sekitarnya. Secara umum, MC beroperasi pada jam 08.00 – 21.00 WITA.

BANTUAN MOBIL DAN MOTOR PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNITAS



Dalam rangka penyebaran informasi publik dan melaksanakan komunikasi dengan masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan sarana kendaraan penyuluhan informasi publik kepada sejumlah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Hingga tahun 2014 Pelaksanaan program penyebaran informasi dan komunikasi publik dengan pemberian kendaraan penyuluhan informasi publik dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan

nama Mobil Pusat Teknologi Informasi Komunitas (M-Pustika).

Adapun komponen system kendaraan unit penyuluhan dan siaran keliling tersebut, yaitu mobil unit siaran keliling dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Isuzu Byson
- b. Double garden
- c. Digital Camera
- d. Handled Wireless
- e. Handycam
- f. LCD Proyektor
- g. Generator Set
- h. Cabel Extention
- i. Stabilizer
- j. Laptop
- k. Radio komunikasi
- l. Amplifier
- m. Portable DVD Player
- n. Pemadam kebakaran
- o. Load speaker
- p. Flexible standing sc
- q. Roof rack dan tangga
- r. Lemari
- s. Kuris putar

- Pembangunan Dan Penguatan Media Center
- Bantuan Mobil Dan Motor Pusat Teknologi Informasi Komunitas

Tabel 9.3 Penerima M-Pustaka 2014

Penerima M-Pustaka 2014

1. Diskominfo Prov Papua
2. Diskominfo Kab. Merauke
3. Diskominfo kab. Mandailing Natal
4. Dishubkominfo Kab. Seram Barat
5. Dishubkominfo Kab. Kapuas
6. Dishubkominfo Kab. Kotabaru
7. Dishubkominfo Kab. Pohnohu
8. Dishubkominfo Kab. Kutai Kartanegara
9. Dishubkominfo Kab. Mesuji
10. Dishubkominfo Kab. Belu

BAB 10

PENELITIAN

PENGEMBANGAN SDM

BIDANG KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

- Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika
- Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika



PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kebijakan pemerintah yang berdasarkan hasil riset dan kajian adalah penting dimana kebijakan tersebut memiliki pondasi kontekstual yang kokoh untuk menjawab tantangan kekinian dan masa depan. Oleh karena itu, Kemkominfo berupaya menumbuhkembangkan iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika. Pada tahun 2014, Kemkominfo melalui Badan Penelitian dan Pengembangan SDM melaksanakan empat puluh tujuh penelitian dan studi yang dilaksanakan secara swakelola baik melalui tim peneliti, tim riset bersama (*joint research*) dengan peneliti dari lembaga penelitian eksternal serta oleh peneliti mandiri. Adalah sangat penting melandaskan suatu kebijakan pemerintah berdasarkan hasil riset dan/kajian sehingga kebijakan tersebut memiliki pondasi kontekstual yang kokoh untuk menjawab tantangan kekinian dan masa depan.

Titik berat dari riset Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah pada kajian kebijakan dan/atau makalah kebijakan bidang komunikasi dan informasi. Di samping itu yang menjadi perhatian utama dari framework penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah diseminasi informasi baik melalui jurnal penelitian maupun melalui media lainnya. Berikut antara lain topik penelitian yang diselesaikan di TA 2014:

1. Studi Pemetaan Industri Perangkat Telekomunikasi Seluler Indonesia
2. Analisis Kebutuhan Spektrum Frekuensi PPDR Pita Lebar di Indonesia
3. Analisis Tekno-Ekonomi Implementasi Teknologi LTE 1.8GHz bagi Operator Seluler di Indonesia
4. Peran Sektor TIK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
5. Penelitian Kajian Tentang Urgensi Perlindungan data Pribadi bagi Pengguna Akses Informasi
6. Kajian tentang Konsolidasi Industri Telekomunikasi
7. Kajian Skema Strategi Pembangunan dan Aspek Pembiayaan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia (Kajian Implementasi USO Di Indonesia dan Konsep Ideal Tata kelola Serta Pengembangannya)
8. *Joint Research*: Efektivitas Penyelenggaraan Layanan Pos Universal/LPU (Analisis Deskriptif Kualitatif Penyelenggaraan LPU di Kota Bandung)

9. Studi Pengembangan Database SDM TIK di Lingkungan Instansi Pemerintah
10. Kajian Pasokan dan Permintaan (Supply and Demand) SDM TIK di Bidang Industri

Untuk mengukur indikator prosentase karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika, pada bulan Maret-April 2014, dilakukan survei terhadap 64 unit kerja eselon II dan III mengenai persepsi satuan kerja di Kementerian Kominfo terhadap hasil penelitian dan pengembangan Balitbang SDM. Hasil survei menunjukkan bahwa 61% responden menyetujui bahwa hasil penelitian dan pengembangan mereka sudah memanfaatkan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan satuan kerja mereka. Dari segi kuantitas, jumlah karya riset yang telah dilaksanakan telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan dimana hasil riset telah disampaikan sebagai rekomendasi dan masukan kepada satuan kerja di lingkungan Kemkominfo. Sedangkan dari segi kualitas, hasil survei persepsi responden tentang hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada lingkungan internal Kemkominfo menunjukkan bahwa persepsi pengguna terhadap penelitian dan pengembangan yang dilakukan berada pada range cukup baik. Hasil survei menunjukkan hasil dari penelitian dapat dipercaya sebagai sumber referensi dan informasi serta memberikan peran dalam membuat kebijakan-kebijakan di setiap satuan kerja di lingkungan Kemkominfo. Dengan demikian, prosentase karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan bidang komunikasi dan informatika telah memenuhi target yang ditetapkan.

Penelitian tahun 2014 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM mendukung penetapan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dibagi ke dalam 4 (empat) bagian meliputi Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi. Salah satu studi menunjukkan bahwa peta *value chain* Industri di Indonesia sudah tergolong lengkap namun masih bertipe relasional dimana terdapat ketergantungan kuat antara merk dan manufaktur. Studi ini juga memberikan rekomendasi yang dapat diambil pemerintah untuk membangun industri perangkat

handset telekomunikasi di Indonesia seperti skema insentif, regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan struktur *value-chain* yang perlu perubahan, sehingga dapat mengurangi defisit nilai perdagangan. Penelitian lain terkait Ekosistem TIK juga memperlihatkan bahwa kebijakan dalam ekosistem TIK di Indonesia masih terkotak-kotak sehingga diperlukan dorongan untuk menghasilkan kolaborasi simbiosis mutualisme antar masing-masing layer dalam ekosistem TIK di Indonesia. Diharapkan setiap regulator fokus pada pembuatan regulasi pada tiap layer yang berpihak pada industri lokal dan ekonomi kreatif dalam negeri dimana regulator terkait perlu mulai membuat pola spesifikasi ataupun lisensi yang memungkinkan industri lokal TIK berperan dalam ekosistem TIK Indonesia serta mendorong kondisi ekosistem TIK Indonesia yang lebih baik dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur ekosistem TIK secara konvergen.



ICT White Paper Kominfo 2014 (Buku Putih Kominfo)

ICT White Paper disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk informasi terdokumentasi mengenai perkembangan TIK di Indonesia dan memahami arah pengembangan dan kebijakan serta pembangunan TIK yang telah dilakukan.

Buku Putih Kominfo 2014 berfokus pada agenda pembangunan TIK diantaranya mengenai Rencana Pita Lebar Indonesia, infrastruktur dan penggunaan TIK serta benchmarking sebagai *positioning* pembangunan TIK Indonesia terhadap negara lainnya.



Survei Indikator Akses dan Penggunaan TIK di Kalangan Individu dan Rumah Tangga

Survei Indikator Akses dan Penggunaan TIK merupakan suatu upaya yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memperoleh data dan informasi mengenai akses dan penggunaan TIK oleh rumah tangga dan individu dalam skala nasional. Survei mulai

dilaksanakan sejak tahun 2009 meliputi data mengenai akses telepon genggam, telepon kabel, komputer, televisi, radio dan internet di 140 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi di Indonesia dan selalu diperbaharui setiap

tahunnya. Desain survei dikembangkan berdasarkan Indikator Pengukuran TIK yang digunakan International Telecommunication Union (ITU) dan telah diadopsi oleh berbagai negara. Survei ini menjadi vital karena merupakan referensi alternatif terhadap survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei internasional tentang indikator TIK di seluruh Indonesia.

Jurnal Ilmiah Terakreditasi

Berbagai publikasi berisi penelitian dan hasil kajian juga diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, diantaranya jurnal yang telah diakreditasi oleh Lembaga Ilmu



Pengetahuan Indonesia (LIPI) yaitu 1) Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kominfo, 2) Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, 3) Buletin Pos dan Telekomunikasi, 4) Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 5) Jurnal Penelitian Komunikasi dan 6) Jurnal Komunikasi, Informatika dan Kebijakan IPTEK-KOM. Jurnal-jurnal tersebut berisi dengan hasil penelitian dan studi para peneliti baik di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM maupun peneliti dari perguruan tinggi atau instansi eksternal lainnya yang telah melalui *peer review* dari mitra bestari.

PENGEMBANGAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pengembangan Kompetensi Aparatur Negara

Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang diperlukan dalam pembangunan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kemkominfo menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk menjamin terciptanya SDM bidang kominfo yang kompeten dan kompetitif baik melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi bagi aparatur pemerintah.

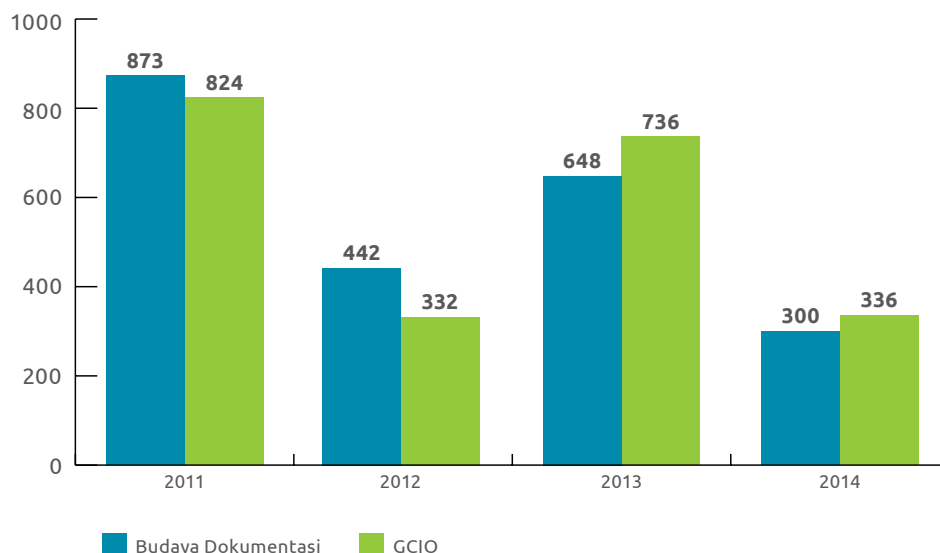
Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi

Bimbingan Teknis Budaya Dokumentasi ini merupakan pelatihan yang ditujukan untuk memberikan kompetensi dasar atau kompetensi minimal kepada aparatur pemerintah di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan memanfaatkan TIK dan membantu penyediaan calon-calon pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di seluruh Indonesia sesuai dengan telah diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sejak Mei 2010. Pada tahun 2014, materi telah memasuki tingkat lanjutan dan dilaksanakan di enam lokasi dengan total 300 peserta dimana 210 peserta diantaranya berhasil memperoleh sertifikat sesuai dengan tingkatan sertifikasi yang diikuti.

Pelatihan dan Sertifikasi Chief Information Officer (CIO)

Pelatihan CIO merupakan bagian dari usaha peningkatan literasi masyarakat melalui upaya peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan, pengendalian operasional serta evaluasi di bidang pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan E-Government, dan diatur menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Tata Kelola TIK dimana menyebutkan bahwa setiap institusi pemerintahan harus menetapkan *Chief Information Officer* (CIO) untuk memastikan kapasitas kepemimpinan pengelolaan TIK di semua level pemerintahan. Pada tahun 2014, 138 dari 336 peserta memperoleh sertifikasi tingkat dasar ataupun tingkat lanjutan setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan di tujuh lokasi. Grafik di bawah menampilkan jumlah peserta Bimbingan Teknis dan sertifikasi Budaya Dokumentasi dan GCIO tahun 2011-2014.

Gambar 10.1 Jumlah Peserta Pelatihan dan Sertifikasi CIO



Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan PP Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. SKKNI menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, tidak saja dalam perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan penempatan, serta penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, tetapi juga dalam meningkatkan manajemen kinerja dan penilaian kompetensi, serta menetapkan bentuk dan besaran kompensasi bagi SDM bidang Kominfo.

Kemenkominfo memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun Rancangan SKKNI bidang komunikasi dan informatika yang selanjutnya disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Pada tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun empat Rancangan SKKNI yaitu *Enterprise Architecture Design*, Auditor Komunikasi, Pengarah Acara dan *Data Centre Management*. Selain itu, lima Rancangan SKKNI yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya telah disahkan menjadi SKKNI, yaitu Telekomunikasi, ICT Project Management, Periklanan, Produser TV dan Layanan Komunikasi Tertulis/Elektronik dan Paket (Perposan). Dengan demikian, hingga 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun 15 SKKNI dan 5 Rancangan SKKNI bidang komunikasi dan informatika.

Tabel 10.1 Rancangan SKKNI dan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika

No	SKKNI / RSKKNI	Keterangan	Tahun
1	Operator Komputer	KEP.94/MEN/IV/2005	2005
2	Programer Komputer	KEP.142/MEN/IV/2005 Updating: KEP.615/ 2012	2005
3	Computer Technical Support	KEP.272/MEN/VI/2006	2006
4	Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi	KEP.269/MEN/VII/2006	2006
5	Multimedia	KEP.115/MEN/III/2007	2007
6	Kehumasan	KEP.39/MEN/II/2008	2008
7	Teknisi Telekomunikasi Satelit	KEP.114/MEN/VI/2008	2008
8	Desain Grafis	KEP.109/MEN/VI/2010	2010
9	Manajemen Layanan Teknologi Informasi	KEP.610 Tahun 2012	2012
10	Teknik (instalasi) Fiber Optik	KEP.717 Tahun 2012	2012
11	Telekomunikasi	KEP. 165 Tahun 2014	2014
12	ICT Project Managemet	KEP. 349 Tahun 2014	2014
13	Periklanan	KEP. 351 Tahun 2014	2014
14	Layanan Komunikasi Tertulis/Elektronik dan Paket (Perposan)	KEP. 354 Tahun 2014	2014
15	Produser TV	KEP. 352 Tahun 2014	2014
16	IT Security	Konvensi Tahun 2011 (ada Revisi)	2011
17	Auditor TI	Konvensi Tahun 2012 (Ada Revisi)	2012
18	Animasi	Proses Pengesahan	2012
19	Data Centre Management	Proses Pengesahan	2014
20	Enterprise Architecture Design	Proses Pengesahan	2014
21	Auditor Komunikasi	Proses Pengesahan	2014
22	Pengarah Acara	Proses Pengesahan	2014

- Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika
- Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Pelatihan dan Sertifikasi SKKNI



Sertifikasi Kompetensi Berbasis SKKNI Bidang Keahlian Junior Programmer, Grafika Administrator dan Junior Graphic Designer - Cikarang, 2014



Sertifikasi Kompetensi Berbasis SKKNI Bidang Keahlian Junior Multimedia dan Grafika Fundamental - Yogyakarta 2014

Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang kominfo, khususnya dalam Rencana Aksi Perluasan dan Penciptaan Lapangan Kerja bagi angkatan kerja muda, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi sertifikasi nasional berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

bagi angkatan kerja muda. Fasilitasi Sertifikasi Berbasis SKKNI dilaksanakan di sepuluh lokasi dengan tingkat kelulusan 88% atau 639 dari 727 orang dan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang komunikasi dan Informatika.

Pelatihan Komunikasi Publik

Pelatihan komunikasi publik merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi TIK masyarakat melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis dan seminar. Pelatihan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan penguasaan masyarakat mengenai cara-cara pengaksesan dan pemberdayaan informasi. Kegiatan yang telah diadakan diantaranya KOMINFO Goes to Mall, Bimtek Literasi TIK untuk UMKM dan

Bimtek Literasi TIK untuk anak-anak, perempuan, dan difabel. Pada tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan pelatihan komunikasi publik kepada 1.008 orang di 10 lokasi. Dengan demikian sejak dilaksanakan pertama kalinya pada tahun 2009, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan pelatihan komunikasi publik kepada 2.956 orang



Peningkatan Literasi TIK bagi Anak dan Remaja - Padang 2014



Peningkatan Literasi TIK bagi Masyarakat Disabilitas - Banyuwangi 2014

Pelatihan Internet Sehat dan Aman



Perkembangan media internet yang amat pesat mendorong penggunaan internet di berbagai lini masyarakat dengan peruntukkan yang beragam. Untuk menghindari dampak yang tidak diharapkan seperti akses dan penyebaran dan konten negatif melalui internet, masyarakat memerlukan pengetahuan mengenai penggunaan internet secara sehat dan aman, khususnya bagi anak-anak, remaja dan ibu rumah tangga. Oleh karena itu, Pelatihan Internet Sehat

dan Aman (INSAN) dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai internet sehat dan aman bagi masyarakat serta penggunaan Nawala untuk penyaringan konten negatif, baik bagi anak-anak, remaja dan ibu rumah tangga. Kementerian Komunikasi dan Informatika secara rutin melaksanakan pelatihan INSAN melalui BPPTIK Cikarang dan BPRTIK Pustiknas.

Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri



Program Beasiswa Dalam Negeri

Program Beasiswa S2 Dalam Negeri merupakan salah satu program

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi aparatur

Negara bidang komunikasi dan informatika. Program beasiswa ini diperuntukkan bagi aparatur pemerintah pusat dan daerah dengan jurusan bidang studi Magister CIO dan Magister Ilmu Komunikasi. Beasiswa diberikan bekerjasama dengan ITS, UI, UGM, ITB, UNP, Universitas Hasanuddin, USU, Universitas Andalas, Universitas Sebelas Maret, Universitas Airlangga, dan Universitas Syiah Kuala dimana pada tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan beasiswa kepada 350 mahasiswa dengan total penerima beasiswa S2 Dalam Negeri tahun 2009-2014 sebanyak 1259 orang.

- Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika
- Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Program Beasiswa Luar Negeri



Pre-Departure Briefing dan Pelepasan Penerima Beasiswa S2 Luar Negeri Tahun 2014

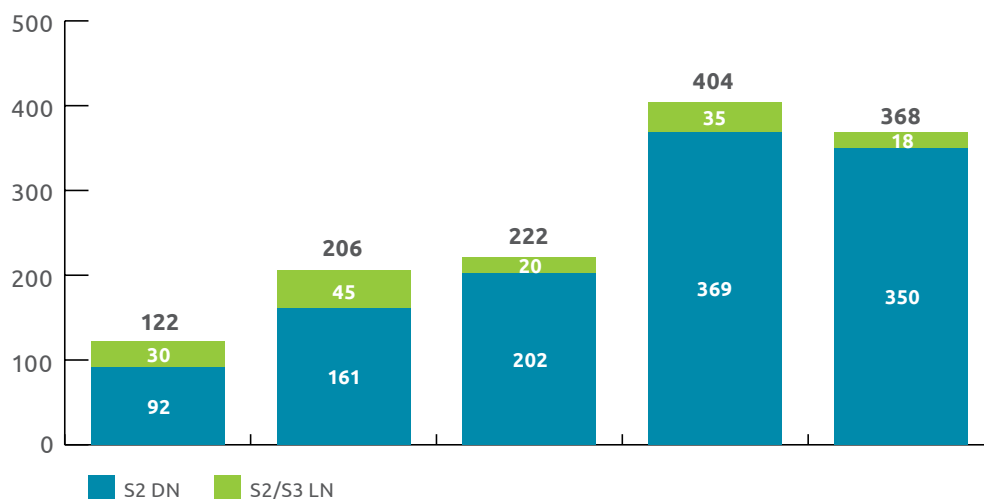


Seminar dan Temu Alumni Beasiswa Kementerian Kominfo - Yogyakarta 2014

Program Beasiswa S2 Luar Negeri merupakan salah satu program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan kapabilitas dan daya saing SDM Indonesia di bidang komunikasi dan informatika sehingga dapat berperan sebagai agen-agen perubahan sosial di lingkungan masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan visi Indonesia sebagai ASEAN ICT Leading Nation pada tahun 2015. Program beasiswa ini di peruntukkan bagi aparatur pemerintah, pegawai BUMN/BUMD dan Industri TIK serta

masyarakat umum dengan jurusan komunikasi dan informatika serta bidang terkait TIK lainnya seperti *Cyber Law, e-Commerce, e-Business, Accounting and Financial Information System, Computer Science, Electronical Engineering, Communication, Journalism, Public Relations, Digital Media, New Media, dan Broadcasting*. Pada tahun 2014, 18 penerima beasiswa telah diberangkatkan ke beberapa Negara tujuan yaitu Belanda, Inggris, Jerman dan Jepang. Berikut merupakan diagram perkembangan jumlah penerima beasiswa dalam dan luar negeri tahun 2010-2014.

Tabel 10.2 Jumlah Penerima Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri Tahun 2010-2014



BAB 11

EKONOMI BIDANG SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

- Pengujian Perangkat
- Standarisasi Perangkat
- Perkembangan Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi
- Peran Sektor Pos Dan Telekomunikasi Dalam Pendapatan Nasional



- Pengujian Perangkat
- Standarisasi Perangkat
- Perkembangan Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi
- Peran Sektor Pos Dan Telekomunikasi Dalam Pendapatan Nasional

PENGUJIAN PERANGKAT

Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebelum diperdagangkan dan dipergunakan di wilayah Indonesia. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut, setiap alat dan perangkat telekomunikasi harus terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk melihat kesesuaiannya dengan standard yang ditetapkan di Indonesia.

Data Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) terhadap alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan negara asal alat dan perangkat yang dilakukan selama Semester-2 Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 11.1 berikut ini.

Tabel 11.1 RHU Semester-2 Tahun 2013 dan 2014 Berdasarkan Negara Produsen Alat dan Perangkat.

No	NEGARA	Jul		Agt		Sep		Okt		Nov		Des		Sem 2014	Sem 2013	Δ %	Proporsi	
		2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013				2014	2013
1	Tiongkok	152	284	158	134	229	222	195	188	162	227	205	239	1.101	1.294	-14,915	64,99%	70,90%
2	Malaysia	13	2	5	6	17	10	7	7	14	3	12	13	68	41	65,85%	4,01%	2,25%
3	Taiwan	4	13	2	5	10	16	11	13	8	8	5	11	40	66	-39,29%	2,36%	3,62%
4	Jepang	10	29	11	8	12	10	10	8	17	14	17	17	77	86	-10,47%	4,55%	4,71%
5	Indonesia	14	1	11	5	9	2	22	5	8	6	15	1	79	20	295,00%	4,66%	1,10%
6	Amerika Serikat	10	16	4	7	9	14	3	7	5	15	6	20	37	79	-53,16%	2,18%	4,33%
7	Vietnam	17	4	5		14	11	8	3	6	3	2	6	52	27	92,59%	3,07%	1,48%
8	Thailand	16	7	3	2	3	4	10	5	15	12	5	4	52	34	52,94%	3,07%	1,86%
9	Korea Selatan	6	10	14	5	4	5	3	4	3	4	6	7	36	35	2,86%	2,13%	1,92%
10	Jerman	2	3	2		2	3	2	6	4	3	10	2	22	17	29,41%	1,30%	0,93%
11	Meksiko	2	3		1	4	2	5	9	5	4	4	1	20	20	0,00%	1,18%	1,10%
12	Singapore	1	-		-	6	-	4	-	3	-	3	-	17	-	-	1,00%	0,00%
13	Inggris	3	2	1	1		2	2		2	2	2	3	10	10	0,00%	0,59%	0,55%
14	Itali	2	2	1	1				3	2	6			5	12	-58,33%	0,30%	0,66%
15	Kanada		2		4		2		9	1	2	2		3	19	-84,21%	0,18%	1,04%
16	Lainnya	9	14	7	5	11	13	14	13	17	11	17	9	75	65	15,38%	4,43%	3,56%
	Total	261	392	224	184	330	316	296	280	272	320	311	333	1.694	1.825	-7,18%	100%	100%

Catatan : Δ % = Persentase Kenaikan/Penurunan.

Pada Tabel 11.1 terlihat bahwa pada selama Tahun 2014 penerimaan SP2 terbesar berasal dari alat dan perangkat telekomunikasi yang berasal dari Tiongkok dengan proporsi (shared) sebesar 70,76%. Proporsi ini menurun jika dibandingkan dengan proporsi pada Tahun 2013 yang berada pada nilai 75,80%. Besarnya penerimaan SP2 dari alat dan perangkat telekomunikasi yang berasal dari Tiongkok sejalan dengan jumlah SP2 yang diterbitkan yang jauh lebih besar dari pada alat dan perangkat yang berasal dari negara lainnya.

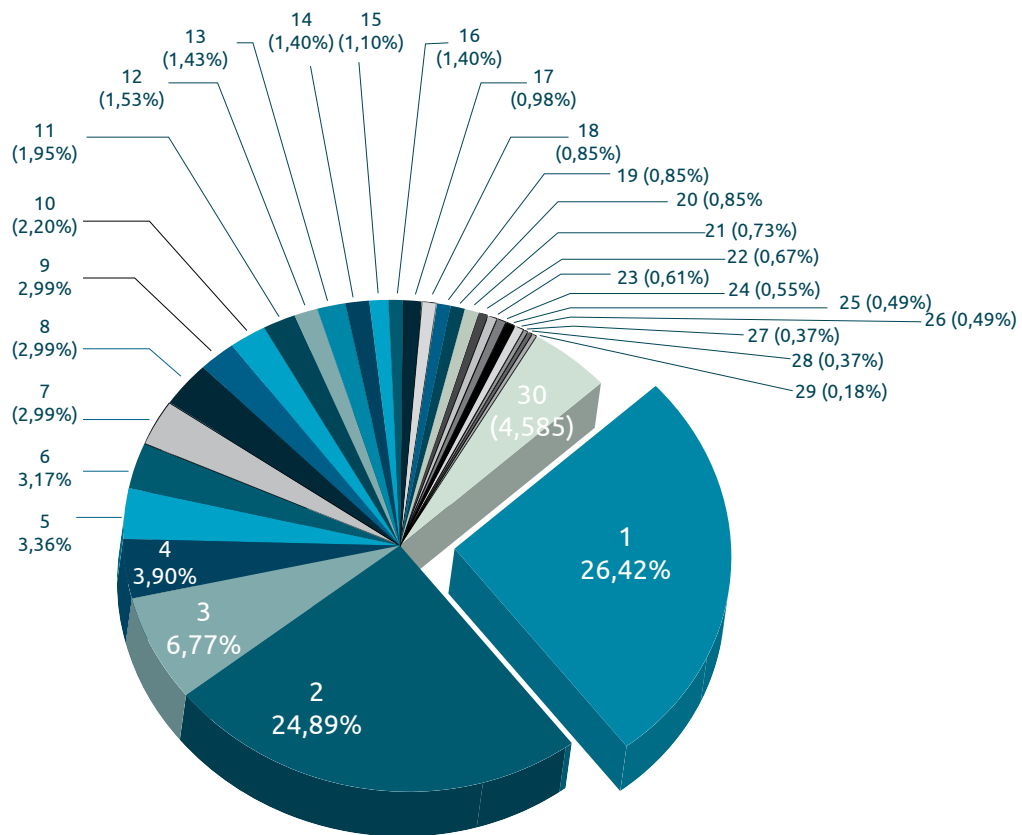
Jika dianalisis persentase kenaikan jumlah alat dan perangkat yang diuji pada Semester-2 Tahun 2014 dibandingkan dengan Semester-2 Tahun 2013, maka diperoleh data bahwa persentase kenaikan pengujian alat dan perangkat yang diproduksi dalam negeri

(Indonesia) mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 295%. Fakta ini mengindikasikan meningkatnya produksi dalam negeri untuk alat dan perangkat telekomunikasi.

Jumlah penduduk Indonesia yang banyak dengan berbagai strata ekonomi merupakan pasar yang menarik bagi produsen dan vendor berbagai alat dan perangkat telekomunikasi, terutama telepon seluler (Ponsel) untuk menawarkan produknya di Indonesia dengan berbagai jenis dan kelas harga. *Wireless, Bluetooth* dan Tablet PC dengan berbagai macam tipe dan aksesories untuk mengakses internet juga sudah menjadi produk perangkat telekomunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia sehari-hari.

Alat dan perangkat telekomunikasi yang paling banyak dilakukan pengujian di BBPPT pada Semester-2 Tahun 2014 adalah Wireless (peralatan dan aksesorisnya), disusul berikutnya oleh telepon seluler (Ponsel). Dominansi Wireless dan Ponsel diantara alat dan

perangkat telekomunikasi lainnya yang dilakukan pengujian di BBPPT terlihat dalam komposisi alat dan perangkat telekomunikasi yang diuji menurut jenis perangkat selama Semester-2 Tahun 2014 seperti disajikan dalam Gambar 11.1 berikut ini.



Gambar 11.1 Komposisi Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang diuji menurut Jenis Alat dan Perangkat Telekomunikasi pada Semester-2 Tahun 2014.

No	Nama Alat dan Perangkat	No	Nama Alat dan Perangkat
1	Wireless Equipment & Accesories	17	IP Phone & Equipment
2	Ponsel	18	Radio Trunking
3	Bluetooth	19	TV Siaran Analog & Digital
4	Tablet PC	20	Radio (Maritim, Microwave, Modem & Paging)
5	Printer Multifungsi	21	Personal Access Network
6	Ethernet Switch	22	Mesin Fotocopy
7	HT & Fixed Mobile (komrad)	23	LNB & LNBF
8	Modem	24	Mesin Multifungsi
9	Notebook PC	25	Set Top Box
10	Antena	26	Radar
11	Repeater (CDMA, DCS, UMT & Komrad)	27	Radio Siaran FM
12	GPS (Navigation, Receiver & Tracker)	28	Pesawat Telepon Analog
13	BTS & Accessoris	29	Pos Terminal
14	Router	30	Macro Radio Remote UNit
15	DECT Phone & Pesawat Telepon	31	Lainnya
16	Receiver Satellite		

- Pengujian Perangkat
- Standarisasi Perangkat
- Perkembangan Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi
- Peran Sektor Pos Dan Telekomunikasi Dalam Pendapatan Nasional

STANDARISASI PERANGKAT

Tiongkok merupakan Negara utama dimana alat dan perangkat yang diterbitkan sertifikat standarnya berasal pada setiap Semester Tahun 2011 – 2014. Pada Tabel 11.2 terlihat bahwa jumlah penerbitan sertifikat alat dan perangkat negara Tiongkok sangat dominan dibandingkan dengan negara lainnya. Jumlah sertifikat yang diterbitkan pada Semester-1 Tahun 2011 sampai dengan Semester-2 Tahun 2014 berkisar antara 1.320 – 2.563 sertifikat. Negara asal alat dan perangkat terbesar berikutnya yang diterbitkan sertifikat alat dan perangkatnya adalah Amerika Serikat, Jepang dan Taiwan namun dengan jumlah yang jauh lebih

kecil daripada sertifikat untuk produk perangkat asal Tiongkok. Meksiko muncul sebagai negara yang juga cukup banyak diterbitkan sertifikat untuk perangkatnya, yang berada di urutan ke-5. Hal ini karena Meksiko kini menjadi lokasi vendor pembuat alat Pelanggan (CPE) Nirkabel sebagai perluasan dari lokasi di Amerika Serikat. Sehingga produk alat pelanggan (CPE) nirkabel dari Meksiko juga banyak yang masuk ke Indonesia meskipun bukan negara asal merek produk tersebut. Namun jumlah sertifikat perangkat asal keempat negara tersebut sangat jauh lebih rendah dibanding sertifikat alat dan perangkat asal Tiongkok.

Tabel 11.2 Jumlah dan Persentase Penerbitan Sertifikat menurut Jenis Perangkat dan Negara Asal Semester-2 Tahun 2014

No	Negara Asal/ Buatan	Jenis Perangkat										Total	%
		CPE Kabel		CPE Nirkabel		Transmisi		Penyiaran		Sentral			
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%		
1	Tiongkok	82	63,08	1.376	66,06	449	54,49	2	10,00	7	33,33	1.916	62,25
2	Meksiko	0	0,00	27	1,30	14	1,70	0	0,00	0	0,00	41	1,33
3	Amerika Serikat	17	13,08	55	2,64	76	9,22	2	10,00	4	19,05	154	5,00
4	Taiwan	0	0,00	55	2,64	34	4,13	0	0,00	0	0,00	89	2,89
5	Jepang	1	0,77	139	6,67	46	5,58	0	0,00	0	0,00	186	6,04
6	Malaysia	7	5,38	78	3,74	19	2,31	0	0,00	0	0,00	104	3,38
7	Korea Selatan	0	0,00	37	1,78	14	1,70	0	0,00	0	0,00	51	1,66

Berdasarkan Tabel 11.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah 3.078 alat dan perangkat yang diterbitkan pada Semester-2 Tahun 2014, sebagian besar (62,25%) berasal dari negara Tiongkok. Hal ini juga menunjukkan semakin dominannya alat dan perangkat telekomunikasi asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Negara asal alat dan perangkat terbesar berikutnya yang diterbitkan sertifikat alat dan perangkatnya adalah Jepang (6,04%), Amerika Serikat (5,00%), dan Taiwan (2,89%) namun dengan persentase yang jauh lebih kecil daripada sertifikat alat perangkat asal Tiongkok. Berdasarkan jenis sertifikat dan asal negaranya maka dapat dijelaskan bahwa hampir semuanya jumlah penerbitan sertifikat baru lebih besar dibandingkan dengan penerbitan jenis sertifikat yang lainnya.

Persentase penerbitan sertifikat standar alat dan perangkat asal Indonesia hanya 2,92%. Hal ini menunjukkan masih kurangnya produksi alat dan perangkat telekomunikasi asal Indonesia yang diajukan untuk memperoleh sertifikat. Padahal peningkatan penjualan produk telekomunikasi khususnya alat pelanggan merupakan peluang bagi produk alat dan perangkat telekomunikasi asal Indonesia untuk masuk ke dalam pasar dan untuk itu perlu didukung dengan sertifikasi alat dan perangkat.

PERKEMBANGAN EKSPOR IMPOR ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Di era globalisasi ini, kegiatan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia berlangsung semakin terbuka. Keterbukaan kegiatan ekonomi dapat dilihat dari aktivitas ekspor dan impor suatu negara atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan nasional. Kegiatan ekspor dan impor suatu negara akan mempengaruhi cadangan devisa negara tersebut.

Sektor komunikasi juga melakukan kegiatan ekspor dan impor terutama pada alat dan perangkat komunikasi. Apabila nilai ekspor (biasanya diukur dalam US Dollar) alat dan perangkat komunikasi lebih besar dibandingkan dengan nilai impornya, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan perdagangan di sektor ini berlangsung surplus dan memberikan kontribusi yang positif terhadap devisa negara Indonesia. Sebaliknya apabila nilai impor alat dan perangkat komunikasi lebih besar

dibandingkan dengan nilai ekspornya, maka dapat dikatakan bahwa perdagangan di sektor ini mengalami defisit dan memberikan kontribusi yang negatif terhadap penerimaan negara. Dengan kata lain, Indonesia masih sangat tergantung kepada alat dan perangkat telekomunikasi dari negara lain. Perkembangan ekspor impor alat dan perangkat telekomunikasi dapat memberikan indikasi ketersediaan sumber daya di negara Indonesia dalam upaya mendukung aktivitas kegiatan telekomunikasi dan juga menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk dapat berinovasi dalam teknologi terkini guna penyediaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri. Dengan memproduksi alat dan perangkat komunikasi di dalam negeri maka penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dapat dinikmati oleh Indonesia.

Tabel 11.3 Ekspor dan Impor alat dan Perangkat Telekomunikasi dari 2008 sampai Semester-2 tahun 2014.

Tahun	Ekspor		Impor	
	Nilai (US\$)	Berat (Kg)	Nilai (US\$)	Berat (Kg)
2008	1.044.207.325	55.282.207	1.130.915.894	20.398.992
2009	1.886.732.217	42.314.730	2.503.657.803	48.611.492
2010	2.310.105.995	56.333.735	3.619.695.162	62.600.497
2011	2.681.090.192	66.745.199	4.246.802.605	55.264.763
2012	1.284.076.360	28.578.023	3.893.405.777	51.044.989
Semester 1 – 2013	669.116.102	13.767.983	2.035.674.327	22.676.997
Semester 2 – 2013	485.887.207	10.843.837	2.022.716.088	20.334.297
Semester 1 – 2014 *	350.710.403	7.124.544	3.021.832.445	26.080.680
Semester 2 – 2014 *	777.375.750	14.926.725	5.792.440.367	55.428.205

*Sumber BPS (www.bps.go.id), data sementara

- Pengujian Perangkat
- Standarisasi Perangkat
- Perkembangan Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi
- Peran Sektor Pos Dan Telekomunikasi Dalam Pendapatan Nasional

Sebagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya terlihat bahwa pada semester 2 Tahun 2014 neraca perdagangan bidang alat dan perangkat komunikasi mengalami defisit. Hal ini terlihat dari nilai impor yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai eksportnya. Bahkan pada semester 2 Tahun 2014, defisit neraca perdagangan bidang alat dan perangkat telekomunikasi mencapai nilai tertinggi dibandingkan periode sebelumnya, yaitu sebesar US\$ 5,02 Miliar. Jika diamati lebih lanjut impor (baik dari sisi volume maupun nilainya) selalu mengalami peningkatan di setiap periode termasuk pada Semester 2 Tahun 2014. Penyebab utama kenaikan nilai dan volume impor tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan impor komponen perangkat nirkabel (Tabel 10.18).

Pada semester 2 Tahun 2014, nilai impor kelompok HS berbasis nirkabel mencapai US\$ 2,66 Miliar atau berkontribusi sebesar 46% dari total nilai impor alat dan perangkat komunikasi. Angka tersebut jauh diatas nilai eksportnya yang hanya sebesar US\$ 51,87 juta atau sekitar 7% dari total nilai ekspor alat dan perangkat komunikasi. Dengan demikian defisit neraca perdagangan yang terjadi pada komponen perangkat nirkabel pada semester 2 Tahun 2014 mencapai US\$ 2,63 Miliar. Kelompok HS berbasis nirkabel meliputi berbagai alat dan perangkat telekomunikasi, yaitu *Terrestrial BTS, Access point WLAN, Wi-Fi, Wireless LAN, Pemancar Radio khusus, Pemutar suara dan gambar dengan wireless LAN, bluetooth, terminal pesawat seluler GSM, pesawat telepon, komputer genggam, personal Digital Assistant (PDA)* dan alat perangkat sejenis lainnya.

Tabel 11.4 Komposisi Ekspor Impor Semester-2 Tahun 2014 berdasarkan kelompok HS (Harmonize Sistem)

Tahun	Ekspor		Impor	
	Nilai (US\$)	Berat (Kg)	Nilai (US\$)	Berat (Kg)
Kelompok HS berbasis Kabel	32.406.012	642.891	1.390.783.416	17.295.150
Kelompok HS berbasis kabel dan nirkabel	625.210.397	12.054.563	975.363.020	8.587.156
Kelompok HS berbasis nirkabel	51.865.773	317.713	2.685.955.289	12.637.907
Kelompok HS pendukung akses	11.327.284	1.402.933	217.199.280	11.946.762
Kelompok HS pendukung CPE	52.036.925	458.974	47.682.294	805.815
Kelompok HS pendukung jaringan	3.162.607	36.790	85.852.468	1.983.144
Kelompok HS Sentral	788.474	9.570	51.344.856	1.228.075
Kelompok HS Transmisi	578.278	3.291	338.259.744	944.196
Total	777.375.750	14.926.725	5.792.440.367	55.428.205

*1. Harmonized system (HS) adalah standar penomoran yang ditetapkan secara Internasional dalam aktivitas Perdagangan Internasional.

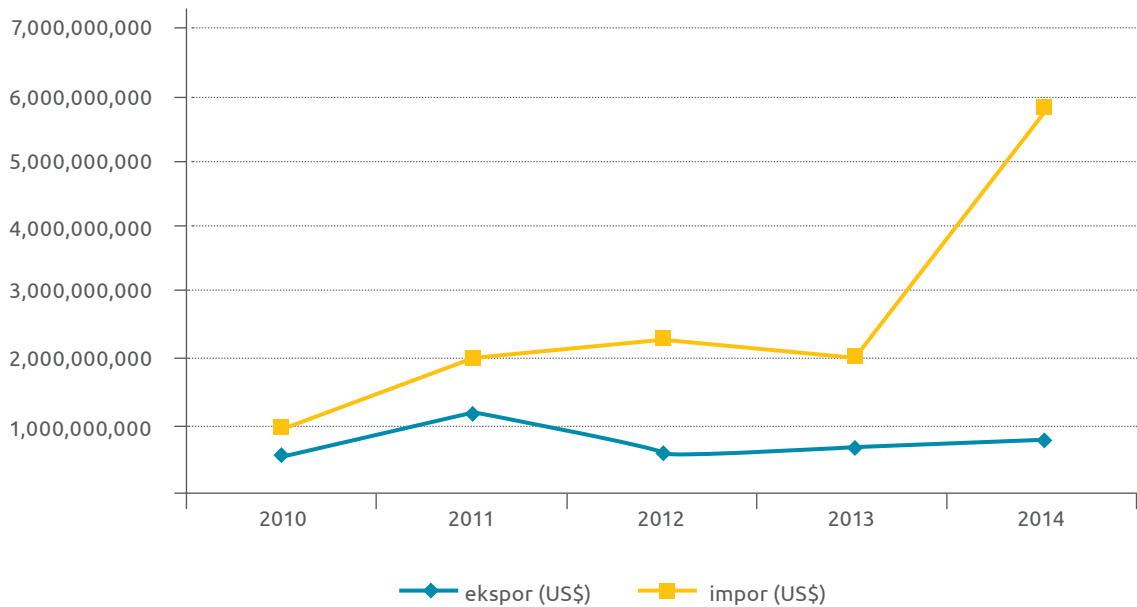
*2. Penetapan penomoran Harmonized system (HS) untuk alat dan perangkat telekomunikasi dalam Perdagangan Internasional Indonesia diatur di dalam Peraturan Menteri no 5 tahun 2013 tentang alat dan perangkat Telekomunikasi

*Sumber: www.bps.go.id (data diolah).

Berdasarkan data pada Tabel 11.4 kelompok kabel dan nirkabel memberikan kontribusi ekspor terbesar yaitu sebesar 80%. Berbagai alat dan perangkat telekomunikasi yang termasuk didalam kombinasi nirkabel dan kabel adalah set top box kabel TV analog, IP set top box, Set top box penerima satelit, perangkat TV siaran analog digital, dan alat perangkat penunjang lainnya. Posisi kedua ekspor ditempati oleh kelompok HS pendukung CPE (7%) dan kelompok HS berbasis nirkabel (7%).

Trend perkembangan ekspor impor berdasarkan nilainya untuk bidang alat dan perangkat telekomunikasi periode 2010-2014 disajikan pada Tabel 11.4. Data perkembangan nilai impor setiap semester selama kurun 2010 – 2014 mengindikasikan trend yang semakin meningkat. Perkembangan teknologi terkini berbasis informatika dan telekomunikasi menjadi salah satu faktor pencetus peningkatan kebutuhan impor dalam upaya penyesuaian gaya hidup dan kegiatan usaha berbasis teknologi yang menjadi salah satu faktor dalam keunggulan bersaing di era global terkini. Sebaliknya, trend perkembangan nilai ekspor alat dan perangkat telekomunikasi menunjukkan penurunan.

Gambar 11.2 Grafik Trend Perkembangan Nilai Ekspor Impor Semester-2 tahun 2010 – 2014



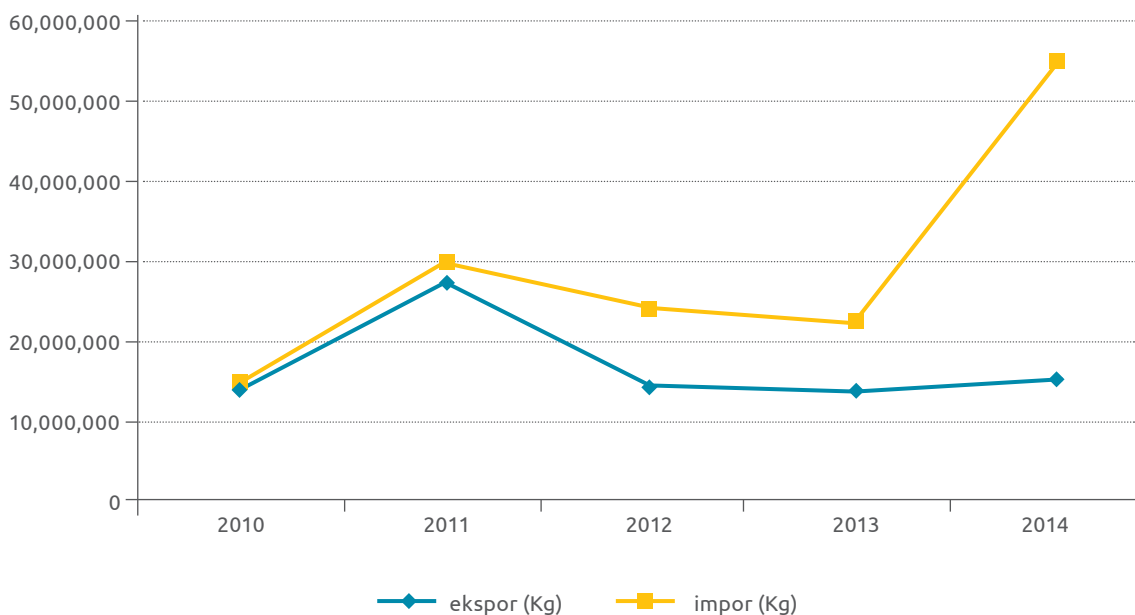
Gambar 11.5 Grafik Trend Perkembangan Nilai Ekspor Impor Semester-2 tahun 2010 – 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Ekspor (US\$)	541.761.117	1.166.864.420	572.553.293	669.116.102	777.375.750
Impor (US\$)	952.338.261	2.016.547.891	2.313.117.007	2.035.674.327	5.792.440.367

Adapun trend perkembangan ekspor impor berdasarkan berat (volume) untuk bidang alat dan perangkat telekomunikasi periode 2010-2014 disajikan pada Gambar 10.15. Sama halnya dengan perkembangan impor berdasarkan nilai, data perkembangan impor

berdasarkan berat disetiap semester selama kurun 2010 – 2014 mengindikasikan trend yang semakin meningkat. Adapun trend perkembangan ekspor alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan beratnya menunjukkan penurunan.

Gambar 11.3 Grafik Trend Perkembangan Berat Ekspor Impor (2010–2014)



- Pengujian Perangkat
- Standarisasi Perangkat
- Perkembangan Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi
- Peran Sektor Pos Dan Telekomunikasi Dalam Pendapatan Nasional

Gambar 11.6 Grafik Trend Perkembangan Berat Ekspor Impor (2010 – 2014)

	2010	2011	2012	2013	2014
Ekspor (US\$)	13.555.499	27.481.304	15.045.934	13.767.983	14.926.725
Impor (US\$)	14.853.406	29.686.103	24.292.660	22.676.997	55.428.205

PERAN SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI DALAM PENDAPATAN NASIONAL

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, peran sektor pos dan telekomunikasi dalam pendapatan nasional dilihat dari kontribusinya terhadap PDB (atas dasar harga konstan). Perhitungan PDB dilakukan berdasarkan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. PDB berdasarkan lapangan usaha dihitung berdasarkan nilai output dari sembilan sektor utama penyusun PDB. Nilai output dari jasa pos dan telekomunikasi tercatat dalam sektor komunikasi. Pada Tabel 10.1 terlihat bahwa sektor komunikasi merupakan sub sektor dari sektor pengangkutan dan komunikasi. Adapun PDB berdasarkan pengeluaran di hitung dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan dan asing yaitu dari komponen net ekspor (Tabel 10.2).

Berdasarkan Tabel 10.1 terlihat bahwa kontribusi sektor komunikasi terhadap PDB berdasarkan lapangan usaha masih di bawah sektor-sektor primer dan tersier (misalnya pertanian dan industri pengolahan). Namun perkembangan sektor komunikasi menjadi bagian

penting dari proses transformasi perekonomian dari sektor primer dan sekunder ke sektor tersier. Proses transformasi tersebut (dari sektor primer ke tersier dan sekunder) terjadi di sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data pada Tabel 11.6, peran sektor komunikasi selama tiga tahun terakhir (2012-2014) selalu mengalami peningkatan di setiap kuartalnya. Sebagai contoh pada kuartal 1 tahun 2012, kontribusi sub sektor komunikasi terhadap PDB sebesar 6,35% dan pada kuartal 3 tahun 2014, kontribusi sub sektor komunikasi sudah mencapai 7,03%. Kontribusi sektor komunikasi tersebut lebih besar dibanding dengan kontribusi sektor pertambangan, Lisgair (listrik, gas dan air bersih), dan konstruksi. Dengan kata lain perkembangan sektor telekomunikasi menjadi bagian penting pengembangan sektor tersier (sektor jasa) yang ke depan menjadi sektor utama perekonomian terutama pada saat sektor primer dan sekunder pertumbuhannya sudah jenuh. Diperkirakan pada masa yang akan datang, kontribusi sektor komunikasi terhadap PDB akan terus mengalami peningkatan seiring kenaikan permintaan terhadap jasa komunikasi di masa yang akan datang.

Tabel 11.7 Persentasi Kontribusi Setiap Lapangan Usaha terhadap PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000(%)

No	Lapangan Usaha	2012				2013*				2014**		
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	13,07	13,08	13,49	10,52	12,79	12,78	13,2	10,33	12,54	12,57	13,04
2	Pertambangan dan penggalian	7,64	7,43	7,17	7,27	7,21	6,98	6,93	7,15	6,83	6,62	6,62
3	Industri pengolahan	25,31	25,31	25,48	26,24	25,31	25,36	25,33	26,14	25,29	25,33	25,23
4	Listrik, gas dan air bersih	0,76	0,77	0,75	0,79	0,77	0,76	0,74	0,80	0,77	0,78	0,75
5	Konstruksi	6,35	6,44	6,47	6,83	6,39	6,49	6,51	6,90	6,49	6,57	6,59
6	Perdagangan, hotel & restoran	17,75	18,05	17,84	18,61	17,83	18,15	17,92	18,44	17,76	18,05	17,79
7	Pengangkutan dan komunikasi	10,06	9,97	10,07	10,43	10,40	10,46	10,48	10,88	10,90	10,92	10,88
	a. Pengangkutan	3,72	3,7	3,73	3,81	3,71	3,76	3,76	3,88	3,82	3,86	3,85
	b. Komunikasi	6,35	6,27	6,34	6,62	6,69	6,69	6,71	6,99	7,08	7,06	7,03
8	Keuangan, real estat dan jasa perusahaan	9,72	9,62	9,52	9,79	9,92	9,80	9,70	9,89	10,01	9,90	9,79
9	Jasa-jasa	9,34	9,33	9,20	9,53	9,38	9,22	9,20	9,49	9,43	9,27	9,33

*Sumber : BPS

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, kontribusi penyusun terbesar PDB adalah pengeluaran konsumsi. Jika diamati lebih lanjut pengeluaran konsumsi terbesar berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi selalu berada di atas 50% di setiap kuartalnya sepanjang tahun 2012-2014. Salah satu

pengeluaran konsumsi tersebut adalah pengeluaran untuk jasa telekomunikasi dan informatika. Dengan demikian, tidak mengherankan jika sektor komunikasi memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap PDB secara keseluruhan

Tabel 11.8 Distribusi PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran atas dasar harga konstan 2000 Tahun 2012 – 2014

No	Lapangan Usaha	2012				2013*				2014**		
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
1	Pengeluaran konsumsi	61,54	62,41	61,80	65,84	60,81	61,84	61,95	65,67	60,93	61,67	62,12
2	Rumah tangga	55,44	54,78	54,46	55,62	55,03	54,46	54,38	55,37	55,24	54,70	54,61
3	Pemerintah	6,10	7,63	7,34	10,22	5,78	7,37	7,56	10,30	5,69	6,97	7,52
4	Pembentukan modal tetap domestik bruto	24,25	25,07	24,96	26,13	24,13	24,76	24,70	25,79	24,32	24,78	24,47
5	Perubahan Inventori	3,01	3,89	1,15	-0,27	3,31	3,83	1,00	-0,28	3,65	3,31	2,39
6	Diskrepansi Statistik 1)	0,72	1,09	1,79	-0,14	0,23	0,55	2,03	-2,87	0,11	0,17	0,28

*Sumber : BPS

Pertumbuhan sektor komunikasi relatif stabil pada setiap kurtal di sepanjang tahun 2012-2014. Sektor tersier dan sekunder, yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan, walaupun memiliki kontribusi terhadap PDB yang tinggi, namun pertumbuhan sektor-sektor tersebut sangat berfluktuasi, bahkan terkadang mengalami pertumbuhan yang negatif.

Pada Tabel 11.8 terlihat bahwa pada periode tersebut, sektor komunikasi selalu mengalami pertumbuhan positif, yaitu rata-rata di atas 2% di tahun 2012-2014. Bahkan jika diamati lebih lanjut, pertumbuhan sektor komunikasi selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDB total. Hal ini menunjukkan peran penting sub sektor komunikasi terhadap PDB Indonesia.



